

Lampiran 1

P R O G R A M PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH TAHUN: 1985 – 1990

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

MUQADDIMAH

Sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dan bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT., Muhammadiyah mempunyai rangkaian program berjangka lima tahun sebagaimana ditetapkan oleh muktamarnya dalam rangka mencapai tujuan dan cita-citanya.

Program-program Persyarikatan Muhammadiyah periode 1985 – 1990 merupakan kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya serta menjadi dasar bagi pembuatan program periode berikutnya lewat proses evaluasi dan revisi, oleh karenanya kesinambungan antara program dari satu muktamar dengan program muktamar lainnya merupakan suatu keharusan. Di samping itu setiap rangkaian program yang telah ditetapkan oleh muktamar pada hakekatnya menjadi garis-garis besar haluan amal usaha persyarikatan, yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan atau cita-cita Muhammadiyah.

Walaupun program-program yang telah ditetapkan menyangkut berbagai bidang kegiatan dan amal usaha, namun tidak boleh dilupakan bahwa pelaksanaan program harus dilakukan dengan dasar keseimbangan. Jangan sampai terjadi adanya pelaksanaan program bidang tertentu saja dengan mengabaikan bidang lainnya. Sudah barang tentu pelaksanaan program sangat tergantung pada potensi yang ada di daerah masing-masing dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang cenderung selalu berubah, akan tetapi usaha-usaha untuk menyeimbangkan program-program antar bidang harus dilakukan secara optimal.

Untuk menyukseskan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan muktamar, harus diusahakan sejauh mungkin terciptanya lingkungan dakwah yang memungkinkan bagi kegiatan-kegiatan amal usaha Muhammadiyah serta peningkatan sarana/prasarana yang ada. Termasuk dalam usaha menciptakan lingkungan dakwah yang baik adalah:

1. mengembangkan ruh Islam di kalangan Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya;
2. menanamkan dan menyuburkan jiwa tabligh di seluruh jajaran warga Muhammadiyah;
3. mengusahakan kerjasama dengan pemerintah sebaik-baiknya;
4. bekerjasama dengan organisasi-organisasi Islam lain seluas-luasnya;
5. menjadikan masjid sebagai satu pusat kegiatan dakwah.

Sedangkan yang termasuk dalam peningkatan sarana/prasarana adalah:

1. memperbaiki manajemen dan mekanisme organisasi persyarikatan, termasuk fungsi kontrol dua arah, dari atas ke bawah dan sebaliknya;

2. pembinaan personil kepemimpinan persyarikatan dalam setiap eselon agar masing-masing menjadi pemimpin yang tangguh dan beraqidah;
3. penyediaan dana dengan jalan menggali sumber-sumber dana, terutama yang bersifat internal.

TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP PROGRAM

TUJUAN:

Terbinanya Keluarga Sejahtera sebagai sendi dan syarat mutlak menuju terwujudnya masyarakat sejahtera.

Adapun gambaran Keluarga Sejahtera dimaksud adalah keluarga yang dalam kehidupan kesehariannya:

1. Bersendi kepada:

- a. Agama yang dita'ati, dengan mengindahkan hukum-hukumnya dan melakukan ibadah dengan tekun.
- b. Penghasilan dan harta yang diperolehnya secara baik dan halal digunakan untuk memenuhi hajat hidup keluarga jasmaniah dan rohaniah dalam keseimbangan.
- c. Pendidikan anggota keluarga terutama anak, baik keberagamaannya, kecerdasannya, maupun perkembangan sosial dan budaya.
- d. Orang tua yang sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya.
- e. Kasih sayang dan kedamaian dalam keluarga dan lingkungan.

2. Berfungsi sebagai:

- a. Tempat bagi suami-isteri dan anggota keluarga untuk menegakkan rumah-tangga sebagai yang dikehendaki oleh ajaran agama.
- b. Tempat pendidikan dan pembinaan anak-anak dan remaja, mengarahkan kepada ketaqwaan kepada Allah SWT, peningkatan kecerdasan, pengembangan watak, dan kepribadian mulia.
- c. Tempat memberikan suasana aman, tenang, damai, dan bahagia.
- d. Faktor yang mampu memberikan kemaslahatan bagi lingkungan dan masyarakat, dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, serta amal kebajikan sesuai dengan keadaan dan kemampuan.
- e. Faktor yang mampu memanfaatkan kemaslahatan dari lingkungan dan masyarakat.

3. Mencerminkan:

- a. Keberagamaan yang dalam.
- b. Kedamaian dan kasih sayang.
- c. Kegiatan dan kebajikan yang bermaslahat.
- d. Ukhuwah dan solidaritas dengan lingkungan.
- e. Akhlaq yang luhur.

SASARAN:

1. Mengembangkan organisasi untuk memantapkan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah dan Gerakan Tajdid. Pengembangan organisasi diselenggarakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip: kebersamaan, ukhuwah, dan profesionalisme.
2. Terciptanya iklim dan lingkungan yang mendukung terselenggaranya dakwah amar

ma'ruf nahi munkar dan penyiaran Islam, baik secara perorangan maupun secara jama'ah.

3. Mengembangkan sarana dan prasarana dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi, untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna amal usaha-amal usaha Persyarikatan.

PRINSIP PROGRAM:

1. Pemurnian dan Peningkatan Amal Usaha Persyarikatan.

- a. Amal usaha Persyarikatan harus sesuai dengan fungsi dan tujuannya sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka mencapai tujuan Persyarikatan.
- b. Langkah-langkah pemurnian:
 - Meneliti dan menilai kembali semua amal usaha untuk dapat ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya;
 - Menertibkan pengelolaan amal usaha dengan menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk itu.
 - Memberikan bimbingan dan pengarahan secara kontinyu kepada pimpinan dan pelaksana amal usaha.
 - Menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesama dan antar amal usaha Muhammadiyah.
 - Menimbulkan rasa tanggungjawab dan partisipasi pada anggota/keluarga Persyarikatan terhadap kemajuan amal usaha di tempatnya.

2. Orientasi kepada Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar.

- a. Sesuai dengan sifat Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah, maka semua program Persyarikatan harus berorientasi kepada dan dilaksanakan untuk tujuan dalam arti yang sebenar-benarnya.
- b. Dakwah secara keseluruhan

3. Lingkungan Kegiatan/Program: Bidang Kemasyarakatan.

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan menempatkan diri sebagai Gerakan Dakwah Islam dan Amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang kemasyarakatan, yakni keseluruhan aspek kehidupan masyarakat.

4. Pengembangan Organisasi.

Program Persyarikatan Muhammadiyah 1985 – 1990 ditetapkan berdasarkan konsep pengembangan organisasi, dimana tidak hanya ada satu prioritas program. Karena Muhammadiyah merupakan Gerakan Dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, maka semua sektor dakwah dan penyiaran Islam akan dikembangkan secara simultan, terpadu, dan menyeluruh.

BIDANG-BIDANG PROGRAM

A. KONSOLIDASI ORGANISASI

1. Target:

- a. Meningkatkan kualitas dan disiplin anggota dan pimpinan serta pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai Kemuhamma- diyahan.
- b. Tertibnya peningkatan kualitas dan dayaguna aparatur dan administrasi Persyarikatan.
- c. Meningkatkan system pengelolaan keuangan Persyarikatan.

- d. Terbentuknya kelembagaan-kelembagaan baru guna mendukung pelaksanaan program dan amal usaha Persyarikatan.
2. **Langkah-langkah:**
 - a. **Peningkatan kualitas dan disiplin serta pemahaman dan penghayatan anggota akan nilai-nilai Kemuhammadiyah.**
 - 1) Meneliti dengan lebih selektif penerimaan anggota dengan memperhatikan i'tikad baik serta kemampuannya memenuhi kewajiban terhadap Persyarikatan berupa amal nyata, dan membaginya menjadi:
 - simpatisan
 - anggota intiPembagian tersebut berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
 - 2) Menertibkan pendaftaran dan melakukan pendaftaran ulang anggota di Ranting, Cabang, dan Pimpinan Pusat.
 - 3) Mengintensifkan penyelenggaraan pengajian-pengajian dan penataran Kemuhammadiyah di Ranting dan Cabang dalam usaha membina anggota, terutama diarahkan untuk menjadi anggota inti.
 - 4) Memantapkan dan meningkatkan potensi Ranting sebagai wadah dan alat pembinaan anggota untuk membimbing kehidupan jama'ah dan pelaksanaan Da'wah Jama'ah dalam lingkungannya.
 - 5) Memantapkan dan meningkatkan potensi Cabang sebagai wadah dan alat pendayagunaan organisasi dalam penyelenggaraan amal usaha Persyarikatan, serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan anggota dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Persyarikatan.
 - 6) Meningkatkan pendayagunaan seluruh anggota, terutama Angkatan Muda Muhammadiyah, dalam penyantunan amal usaha Persyarikatan.
 - 7) Menentukan dan melaksanakan tindakan administratif terhadap anggota yang tidak memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya, terutama terhadap anggota yang merugikan nama baik serta perjuangan Persyarikatan, setelah diusahakan perbaikan (ishlah) dengan nasehat-nasehat yang tidak berhasil. Tuntunan tentang disiplin organisasi dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - b. **Peningkatan kualitas dan disiplin Pimpinan**
 - 1) Mengadakan penelitian secara seksama terhadap setiap calon anggota Pimpinan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Persyarikatan dan tuntunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - 2) Mengintensifkan pendidikan kader Pimpinan dengan mendayagunakan organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah dan lembaga pendidikan/ perguruan Muhammadiyah serta memusatkan pendidikan kader bertingkat di tiap-tiap Wilayah dengan membentuk satu Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) Muhammadiyah. Tuntunan Pusdiklat tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- 3) Menyelenggarakan Darul Arqam secara teratur dalam rangka penyegaran (*refreshing*) dan peningkatan (*upgrading*) anggota Pimpinan di semua tingkat.
- 4) Mengintegrasikan pengajian-pengajian dan penataran Kemuhimmadiyah untuk meningkatkan kualitas anggota Pimpinan di semua tingkat secara terarah dan berencana.
- 5) Dengan penuh kebijaksanaan menentukan dan melaksanakan tindakan disiplin organisasi dan administrasi terhadap anggota Pimpinan yang merugikan nama baik dan perjuangan Persyarikatan.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Pasal 13 tentang Pemilihan Pimpinan dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 15 ayat (1) alinea b. tentang syarat kesetiaan kepada Persyarikatan.

c. Peningkatan kualitas dan disiplin lembaga-lembaga Pimpinan

- 1) Mengusahakan adanya kantor di semua tingkat Pimpinan Persyarikatan serta berkantor secara tetap dan mengadakan petugas yang menekuni pekerjaan. Untuk kantor Pimpinan Wilayah diharuskan ada paling tidak seorang tenaga tetap (*full-timer*).
- 2) Mengadakan perlengkapan tata-usaha dan tata-laksana perkantoran dengan memanfaatkan teknologi dan manajemen modern.
- 3) Menyelenggarakan rapat Pimpinan secara periodik, setidaknya-tidaknya sekali dalam sebulan, baik rapat pleno maupun rapat harian, bagi semua tingkat Persyarikatan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan organisasi.
- 4) Mengadakan rapat bersama (rapat kerja) dengan badan-badan pembantu Pimpinan (Majelis/Bagian) dan pimpinan Organisasi Otonom, setidaknya-tidaknya sekali dalam tiga bulan di tingkat masing-masing.
- 5) Menetapkan dan melaksanakan sanksi organisatoris dan administratif terhadap lembaga-lembaga pimpinan yang melanggar ketentuan-ketentuan organisasi. Tuntutan tentang sanksi-sanksi ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- 6) Menghindarkan sejauh mungkin terjadinya perangkapan jabatan dalam Pimpinan.
- 7) Melaksanakan amal usaha Persyarikatan secara murni dan konsekuen dalam lembaga-lembaga Persyarikatan, terutama mengenai pelaksanaan keputusan Tarjih.

d. Penertiban aparatur/pelaksana amal usaha Persyarikatan

- 1) Penerimaan dan penampilan tenaga sebagai aparatur/ pelaksana amal usaha Persyarikatan oleh setiap Pimpinan dan lembaga amal usaha Muhammadiyah harus berdasar persyaratan umum dan khusus untuk masing-masing bidang amal usaha. Tuntutan tentang persyaratan tersebut ditetapkan oleh PP Muhammadiyah.
- 2) Meningkatkan pembinaan aparatur/pelaksana amal usaha Persyarikatan terutama tentang pengertian, kesadaran, dan kemandirian beragama dan kesadaran serta kesetiaan ber-Muhammadiyah, melalui pengajian-pengajian dan penataran-penataran secara teratur dan berkelanjutan oleh masing-masing tingkat Pimpinan yang membawahnya.

- 3) Meningkatkan pendayagunaan amal usaha yang diarahkan untuk sarana dan alat dakwah Islam.
 - 4) Melaksanakan sanksi jabatan terhadap aparatur/pelaksana amal usaha Persyarikatan yang merugikan nama baik dan perjuangan Persyarikatan.
 - 5) Mengutamakan penempatan aparatur/pelaksana amal usaha Persyarikatan dari anggota atau keluarga besar Muhammadiyah, terutama Angkatan Muda Muhammadiyah, dengan tidak mengabaikan persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing bidang.
- e. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan Persyarikatan**
- 1) Mengadakan sistem dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja Persyarikatan serta pengelolaannya berdasarkan ketentuan-ketentuan manajemen keuangan Persyarikatan.
 - 2) Mengadakan latihan jabatan (*job training*) mengenai pembukuan dan administrasi keuangan Persyarikatan di setiap tingkat.
- f. Lembaga Inspeksi/Pengawasan**
- 1) Melembagakan dan mengaktifkan serta meluaskan tugas Inspeksi/pengawasan di tingkat Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
 - 2) Mengintensifkan usaha-usaha penelitian dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan organisasi di tiap tingkatan.
- g. Pembentukan Lembaga-lembaga**
- 1) Membentuk Lembaga Pengkajian dan Penelitian Muhammadiyah (LPPM) di tingkat Pimpinan Pusat, untuk melakukan pengkajian dan penelitian tentang keagamaan, kemasyarakatan, dan sosial budaya, serta gerakan amal usaha Muhammadiyah.
 - 2) Membentuk Lembaga Pengembangan Masyarakat Muhammadiyah (LPMM) di tingkat Pimpinan Pusat, untuk melakukan kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*), terutama untuk membina dan melatih tenaga-tenaga lapangan untuk pengembangan masyarakat tertentu.
 - 3) Membentuk Pusat Informasi dan Dokumentasi (PIDM) di tingkat Pimpinan Pusat, untuk memberikan pelayanan informasi dan menyimpan dokumentasi Persyarikatan.
 - 4) Membentuk Lembaga Penerbitan dan Kepustakaan Muhammadiyah (LKPM) di tingkat Pimpinan Pusat, untuk menerbitkan publikasi-publikasi tentang Islam dan umat Islam, Muhammadiyah, dan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan.
 - 5) Membentuk Badan Ta'mirul Masjid Muhammadiyah (BTMM) di semua tingkat organisasi, untuk menggerakkan dan mengkoordinasi pengelolaan masjid-masjid yang ada di bawah naungan Muhammadiyah untuk dijadikan sarana dan alat dakwah Islam dan pembinaan umat/jama'ah.
- h. Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah**
- 1) Mempersiapkan dan mengarahkan Angkatan Muda Muhammadiyah agar dapat melanjutkan kepemimpinan Muhammadiyah di kalangan masyarakat Indonesia dan umat Islam pada khususnya.

- 2) Mempersiapkan dan memanfaatkan aktivis-aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah yang berkemampuan di berbagai lapangan kegiatan Persyarikatan dalam rangka menunjang kelangsungan hidup Persyarikatan sesuai dengan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah.
- 3) Mewujudkan organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah sebagai organisasi kader Muhammadiyah dalam rangka memantapkan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dan meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan nasional.
- 4) Menciptakan hubungan yang integral di antara komponen Angkatan Muda Muhammadiyah, sehingga dapat mencerdaskan kepemimpinan yang kolegal antara sesama ortom dan Muhammadiyah dalam bentuk satu ukhuwah. Untuk itu perlu diselenggarakan kegiatan dan pertemuan bersama secara berkala antar ortom-ortom Angkatan Muda Muhammadiyah di semua tingkat organisasi.
- 5) Menciptakan keseragaman sikap dan pola berpikir di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah.
- 6) Mengikutsertakan unsur Angkatan Muda Muhammadiyah dalam setiap kegiatan Persyarikatan, dalam rangka membina jiwa tanggungjawab sebagai seorang pemimpin.
- 7) Senantiasa menumbuhkan iklim dialogis dan demokratis dalam hubungan Muhammadiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah serta memberikan kesempatan/peranan pada Angkatan Muda Muhammadiyah dalam ikut memecahkan masalah-masalah Persyarikatan guna menumbuhkan tanggungjawab dan kedewasaan.
- 8) Meningkatkan pembinaan prestasi akademis bagi Angkatan Muda Muhammadiyah dengan menyelenggarakan program pendidikan lanjutan di dalam dan luar negeri.
- 9) Mengaktifkan Badan Koordinasi Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah (BKP AMM) untuk berfungsi sebagai koordinator pembinaan AMM dan menyelenggarakan pertemuan nasional BKPAMM minimal sekali setahun.

B. PENYIARAN ISLAM DAN BIMBINGAN KEAGAMAAN

1. Mengintensifikasi dan Pengembangan Gerakan Jama'ah.

- a. Menyebar-luaskan pengertian Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah.
- b. Mengusahakan agar setiap anggota menyadari pentingnya arti dan peranan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah, serta bersedia melaksanakan program Jama'ah dan Da'wah Jama'ah.
- c. Mengaktifkan Majelis/Bagian Tabligh sebagai penanggungjawab, penggerak dan koordinator Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah di setiap tingkat Persyarikatan.
- d. Membina dan melatih kader menentukan motivator Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah lewat Darul Arqam (Latihan Motivator Masyarakat) di setiap tingkat Cabang.
- e. Pimpinan Pusat supaya menentukan Pilot Proyek dalam pelaksanaan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah pada suatu desa dalam tiap-tiap wilayah/daerah, setelah ditanya kesanggupan wilayah/daerah yang bersangkutan.

2. Peningkatan dan Pengembangan Penyiaran Islam (tabligh).

- a. Mengintensifkan bimbingan ke-Islaman bagi anak-anak dan remaja, dengan menghidupsuburkan dan memajukan pengajian anak-anak dan remaja, serta menyalurkan bakat dan daya kreativitas mereka dalam berbagai bentuk kegiatan rekreatif yang tidak menyalahi ajaran Islam.
- b. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam bagi orang dewasa dengan menyelenggarakan pengajian-pengajian rutin.
- c. Memfungsikan masjid-masjid yang berada di bawah naungan Muhammadiyah sebagai pusat kegiatan pengajian anak-anak, remaja, dan orang dewasa, serta kegiatan pembinaannya.
- d. Memberikan pengertian tentang kebenaran dan kesempurnaan ajaran Islam kepada golongan elite, baik elite politik, elite ekonomi, maupun elite ilmu pengetahuan.
- e. Meningkatkan penyelenggaraan tabligh melalui segala bentuk dan media komunikasi dengan mempergunakan juga teknologi maju, seperti pembuatan film, slide, pita rekaman, yang bertemakan da'wah Islam serta meningkatkan volume dan frekuensi siaran Ad-Dinul Islam di TVRI, RRI dan non RRI.
- f. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah tertentu yang berkemampuan agar memiliki pemancar radio da'wah.
- g. Memberikan bimbingan kepada lapisan masyarakat yang kurang mampu/lemah taraf kehidupan sosialnya (dhuafa') serta mengalami cacat/tuna sosial, ke arah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.
- h. Menggalakkan aksi pemberantasan buta aksara Al-Quran lewat TVRI dan mengusahakan siaran pelajaran bahasa Al-Quran lewat TVRI dan RRI.
- i. Meningkatkan tenaga pelaksana tabligh (muballigh/muballighat) baik kualitatif maupun kuantitatif, serta membentuk Korps Muballigh Muhammadiyah di setiap tingkat organisasi di bawah pimpinan Majelis/Bagian Tabligh.
- j. Menata dan menertibkan organisasi Majelis/Bagian Tabligh sehingga lebih efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dengan menempatkan petugas yang memiliki managerial skill walaupun ia bukan muballigh.
- k. Mengintensifkan kaderisasi muballigh dengan keseragaman konsep kaderisasi dari Pimpinan Pusat, dan mengeluarkan Kartu Tanda Anggota Korps Muballigh Muhammadiyah.
- l. Mengembangkan profesionalisme dalam pengorganisasian dan proses tabligh serta mengimbau Majelis Tarjih untuk melahirkan ketentuan hukum Islam tentang kewajiban jama'ah memberi infaq fi sabilillah bagi kesejahteraan para muballigh.
- m. Meningkatkan kerjasama antara Majelis Tabligh, Majelis Tarjih, Majelis PKU, Majelis Pustaka, Majelis P & K, dan Biro Hikmah.
- n. Mengusahakan agar di setiap Ranting Muhammadiyah ada sebuah masjid untuk dijadikan sebagai pusat pembinaan jama'ah atau umat dan membentuk Badan Bimbingan Keagamaan.

3. Gerakan Penyadaran/Pembangunan Umat.

- a. Menggalakkan gerakan untuk menumbuhkan kesadaran umat untuk meningkatkan keimanan dan akhlaqul karimah yang kemudian

dijelmakan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

- b. Mengintensifkan kegiatan dalam menggerakkan umat untuk menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah, serta mefungsikan Baitul Mal Muhammadiyah.
 - c. Mengintensifkan kegiatan dalam pembasmian bentuk penyimpanan aqidah Islamiyah di kalangan umat Islam, dengan meneruskan gerakan pembasmian bid'ah, khurafat, dan tahayul.
 - d. Mengaktifkan diri dalam ikut menanggulangi kenakalan remaja dan dekadensi moral di kalangan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, kehidupan seks yang bebas dan lain sebagainya.
- 4. Pembinaan Aqidah, Akhlaq, dan Peribadatan.**
- a. Menertibkan penegasan pandangan Muhammadiyah tentang persoalan-persoalan aqidah Islamiyah, terutama untuk kemantapan keyakinan bagi warga Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai macam persepsi di kalangan umat Islam.
 - b. Mengintensifkan pembinaan aqidah dan akhlaq pada lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
 - c. Mengembangkan keteladanan di kalangan Pimpinan Muhammadiyah dalam memanifestasikan aqidah dan akhlaq dalam kehidupan sehari-hari.
 - d. Memasyarakatkan keputusan Majelis Tarjih tentang peribadatan (dalam arti sempit), terutama tentang kaifiyat shalat, sehingga anggota dapat menjalankan dengan baik dan benar setelah memahami alasan-alasan pentarjihannya.
 - e. Membina Pimpinan dan aparatur/pelaksana amal usaha Muhammadiyah untuk dapat menjalankan peribadatan (dalam arti sempit) sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Tarjih.
- 5. Pengembangan Perwakafan, Zakat, Infaq, dan Shadaqah.**
- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta keagairahan umat Islam umumnya, keluarga Muhammadiyah khususnya, untuk berwakaf dan memanfaatkan sebaik-baiknya harta wakaf yang sudah ada.
 - b. Menggiatkan inventarisasi dan registrasi harta wakaf dan harta benda Persyarikatan lainnya, untuk dikelola dengan manajemen yang baik.
 - c. Mengintensifkan pengurusan serta penyelesaian surat bukti tanah (sertifikasi) bagi tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Persyarikatan pada kantor agraria setempat.
 - d. Menyelesaikan pendaftaran tanah wakaf yang diurus oleh Persyarikatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
- 6. Pembinaan masyarakat Suku Terasing/Muallaf, dan Transmigrasi.**
- a. Membentuk suatu badan khusus yang mengorganisir pembinaan dan da'wah di kalangan masyarakat suku terasing, dan meningkatkan jumlah dan mutu pembina/da'i untuk masyarakat suku terasing.
 - b. Memberikan perhatian secara khusus terhadap pembinaan pengetahuan, kesadaran, dan penghayatan kehidupan keagamaan terhadap para muallaf.
 - c. Menjalin hubungan dan mendukung organisasi-organisasi muslim Tionghoa dalam melakukan peng-Islaman dan proses pembauran.
 - d. Mengusahakan perkawinan muballigh dengan penduduk asli suku terasing.

- e. Mengambil pemuda/pemudi suku terasing untuk dididik oleh Muhammadiyah, sehingga dapat menjadi kader masyarakat mereka sendiri.
- f. Memberikan bimbingan kepada para transmigran dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam, baik sebelum berangkat, dalam perjalanan, maupun setelah tiba di lokasi baru.
- g. Mengusahakan dan membantu pendirian tempat ibadah di lokasi transmigrasi dengan bekerjasama dengan Departemen Transmigrasi.
- h. Menjajagi kemungkinan diadakannya transmigrasi keluarga Muhammadiyah, dan koordinasi pelaksanaannya serta bimbingan agama kepada masyarakat transmigrasi.
- i. Menyelenggarakan transmigrasi keluarga Muhammadiyah yang dikoordinir oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah setempat.
- j. Membentuk badan khusus pembina masyarakat transmigrasi di bawah Persyarikatan dengan pembinaan di segala bidang.

C. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Peningkatan Pendidikan.

- a. Meningkatkan daya tampung lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, baik dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan yang baru maupun merehabilitasi yang sudah ada, dengan memperhatikan hajat masyarakat dan hajat Muhammadiyah.
- b. Meningkatkan mutu semua jenis dan jenjang pendidikan Muhammadiyah.
- c. Meningkatkan fungsi lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai tempat pembibitan tenaga penerus Persyarikatan Muhammadiyah.
- d. Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga pengajar dari kalangan Muhammadiyah di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
- e. Mempertahankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus/Perguruan Tinggi Muhammadiyah bagi semua jenjang dan jenis pendidikan Muhammadiyah secara sentralisasi.
- f. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan bagi perguruan Muhammadiyah dan mengusahakan penyempurnaan organisasi dan administrasi pendidikan yang tepatguna dengan memperhatikan keragaman dalam Muhammadiyah.
- g. Mengusahakan terwujudnya suasana keilmuan, ke-Islaman, dan ke-Muhammadiyah di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah.
- h. Mengefektikan hubungan antar lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah dengan masyarakat dan pemerintah dalam rangka memperkuat eksistensi pendidikan Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat.
- i. Mengadakan reorganisasi kurikulum pendidikan Muhammadiyah secara menyeluruh dan dengan menekankan pada penyempurnaan kurikulum Al-Islam dan ke-Muhammadiyah secara integratif untuk mencapai tujuan Muhammadiyah dan lembaga-lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- j. Mengusahakan lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang secara khusus direncanakan untuk pendidikan ulama.

- k. Menjadikan Pengurus/Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai basis pembinaan kader penerus Muhammadiyah lewat pembinaan IPM dan IMM.
- l. Meningkatkan pembinaan Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat sebagai lembaga pengkaderan dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah.
- m. Menyelenggarakan pondok pesantren Muhammadiyah untuk semua tingkat Daerah sebagai wadah perkaderan anak-anak Muhammadiyah.
- n. Menyelenggarakan pondok pesantren di daerah transmigrasi.
- o. Inventarisasi lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
- p. Menyeragamkan hari libur sekolah secara nasional dengan ketentuan, waktu diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah cq. Majelis Pendidikan dan Kebudayaan.
- q. Perlu intensifikasi pengkaderan di sekolah-sekolah Muhammadiyah mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi melalui IPM dan IMM.
- r. Perlu memasyarakatkan busana muslimah bagi siswi-siswi di sekolah-sekolah dan perguruan Muhammadiyah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Pusat.
- s. Perlu diadakan penataran guru/tenaga di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan PTM tentang Al-Islam dan ke-Muhammadiyah.
- t. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan perlu menerbitkan dan memasyarakatkan majalah remaja/anak-anak di sekolah-sekolah Muhammadiyah.
- u. Memantapkan IPM/IMM sebagai organisasi di sekolah/perguruan tinggi Muhammadiyah sebagaimana qa'idah PPDM.
- v. Program pendidikan secara keseluruhan agar lebih diorientasikan pada kebutuhan pembangunan dengan menyelenggarakan jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- w. Mengadakan Ikatan Guru Muhammadiyah di kalangan perguruan Muhammadiyah.
- x. Perlu meningkatkan peranan Bapendapca, Mapendapda dalam mengelola lembaga pendidikan yang relevan/sesuai dengan Qa'idah.
- y. Perlu meningkatkan jumlah sekolah paramedis.
- z. Penyelenggaraan pelajaran Bahasa Arab di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi Muhammadiyah.
- aa. Meningkatkan baca tulis huruf Al-Quran di lingkungan SPG sehingga output SPG mampu membaca dan menulis huruf Al-Quran.
- bb. Menyelenggarakan symposium tentang sistem pendidikan Muhammadiyah secara menyeluruh.
- cc. Perlu adanya Pusdiklat di tingkat Wilayah untuk mengkaji masalah pendidikan.
- dd. Perlu penyebaran tenaga-tenaga pengajar Muhammadiyah ke sekolah-sekolah Muhammadiyah di daerah terpencil dan luar Jawa.
- ee. Menerbitkan majalah untuk anak-anak yang bernafaskan Islam sesuai dengan tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual mereka.

2. Pembinaan Kebudayaan

- a. Membangkitkan kesadaran dan kemampuan serta memberikan tuntunan kepada keluarga Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk

menentukan dan menciptakan kebudayaan yang tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, yang diarahkan bagi kemanfaatan hidup beragama dan sarana da'wah.

- b. Membangkitkan kesadaran dan memberikan tuntunan kepada keluarga Muhammadiyah dan masyarakat luas bahwa penciptaan kebudayaan yang tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam itu akan merupakan ibadah kepada Allah SWT.
- c. Menggembirakan dan menggairahkan kegiatan kebudayaan nasional guna menampung bakat/minat keluarga Muhammadiyah dan masyarakat luas, disertai dengan bimbingan sehingga tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.
- d. Mengaktifkan Ikatan Seni Budaya Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai ranting.

D. SOSIAL DAN KESEHATAN

1. Peningkatan Pelayanan Sosial.

- a. Meningkatkan usaha penyantunan/perlindungan terhadap yatim piatu, anak-anak terlantar, fakir-miskin, jompo, cacat mental dan fisik, serta segala bentuk tuna, dan menjadikannya sebagai tempat penyaluran beramal bagi anggota dan masyarakat.
- b. Meningkatkan jumlah dan mutu serta sistem pengelolaan Panti Asuhan/ Penyantunan dan Asuhan Keluarga, sesuai dengan fungsinya sebagai sarana da'wah.
- c. Meluaskan jangkauan program kependudukan dan keluarga sejahtera, kelestarian lingkungan hidup dan pendidikan kesehatan jiwa dengan menertibkan usaha-usaha pelaksanaan perencanaan keluarga sejahtera sesuai dengan ajaran Islam dan tuntunan Persyarikatan yang tidak membenarkan abortus dan cara-cara sterilisasi/pemandulan (vasectomi/tubektomi).
- d. Menghidupsuburkan rasa tolong-menolong antar keluarga Muhammadiyah/ masyarakat, terutama pada saat ditimpa musibah/ malapetaka.
- e. Menghidupkan kembali adanya Badan Perbaikan Perkawinan yang mencakup konsepsi tatacara pernikahan menurut Islam di semua tingkat Persyarikatan.
- f. Meningkatkan dan menertibkan usaha-usaha pelaksanaan "Perencanaan Keluarga Sejahtera" dan Pendidikan Kependudukan sesuai dengan ajaran Islam dan tuntunan Persyarikatan yang tidak membenarkan abortus dan cara-cara sterilisasi (vasectomi dan tubectomi) dalam rangka Keluarga Berencana.
- g. Menghidupsuburkan usaha-usaha yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat pedesaan (*community development*).
- h. Menggerakkan anggota dan masyarakat serta mengorganisir pemberian santunan keluarga (beasiswa) kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan kepada putera-puteri Muhammadiyah berprestasi untuk melanjutkan studinya.
- i. Perlu mengadakan/memberikan jaminan sosial yang layak bagi para karyawan dan peningkatan kesejahteraannya.

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

- a. Meningkatkan penyuluhan kesehatan untuk menanamkan kesadaran anggota dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan jasmani dan rohani (mental) serta pemeliharannya menurut agama Islam.
- b. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana pemeliharaan kesehatan seperti: rumah-sakit, balai pengobatan, rumah-bersalin/BKIA, usaha kesehatan sekolah (UKS), poliklinik/PKU keliling, dan sebagainya, dan lebih memantapkan sebagai sarana da'wah serta tempat penyaluran kesadaran beramal anggota dan masyarakat.
- c. Mengusahakan adanya sarana yang dapat menciptakan suasana ke-Islaman dalam lingkungan rumah-sakit/balai-pengobatan/ rumah-bersalin/BKIA/ Poliklinik/PKU keliling dan sebagainya, di samping bimbingan kerohanian kepada pasien.
- d. Menyeragamkan pola pembinaan rumah-sakit/balai-pengobatan/ rumah-bersalin/BKIA dan sebagainya, baik organisasi dan personil maupun keuangan, serta meningkatkan pengelolaannya dengan manajemen yang baik.
- e. Menanamkan jiwa pengabdian kepada semua personil yang bekerja pada rumah-sakit/balai-pengobatan/rumah-bersalin/ BKIA/UKS/Poliklinik/ PKU Keliling dan sebagainya.
- f. Mengusahakan kemungkinan diadakan usaha Dana Kesehatan dan Dana Kematian dalam rangka pelaksanaan kehidupan tolong-menolong, dengan membentuk Badan Pengurus Janazah Muhammadiyah.
- g. Majelis/Bagian PKU Muhammadiyah harus tanggap kepada adanya peristiwa/musibah gempa bumi, kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya, dan aktif menggerakkan anggota dan masyarakat untuk memberikan bantuan.
- h. Menyelenggarakan Balai Pengobatan/Puskesmas Muhammadiyah di daerah transmigrasi dan suku terasing.
- i. Menjalinkan kerjasama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Transmigrasi dalam penempatan tenaga paramedis di kalangan transmigrasi.

3. Pengembangan Masyarakat dan Potensi Manusia (Human Resources).

- a. Membina dan mengembangkan potensi manusia khususnya bagi anggota/ warga Muhammadiyah dengan menyelenggarakan latihan-latihan berdasarkan motivasi ajaran Islam.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan latihan pengembangan masyarakat dalam berbagai bentuk dari tingkat pusat (nasional), wilayah (regional), dan daerah (lokal).
- c. Menyelenggarakan latihan pemandu latihan (*training of Trainers*) guna menyediakan tenaga-tenaga pelatih pengembangan masyarakat dari kalangan sendiri.
- d. Mengadakan aksi pengembangan masyarakat di tingkat Cabang dan Ranting dengan menempatkan kader-kader pengembangan masyarakat yang sudah dilatih sesuai dengan lingkungan sasaran yang dibina/ dikembangkan.

4. Pembinaan Karyawan dan Tenaga Kerja.

- a. Meningkatkan pembinaan ke-Islaman dan ke-Muhammadiyah bagi karyawan/aparatur pelaksana amal usaha Muhammadiyah.
- b. Mengusahakan peningkatan kesejahteraan dan disiplin serta profesionalisme bagi karyawan Muhammadiyah, dengan menjalankan pendidikan

ketrampilan serta keahlian bagi karyawan Muhammadiyah menurut profesi masing-masing.

E. HUKUM, POLITIK DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI.

1. Pengembangan Pemikiran dan Hukum Islam.

- a. Mefungsikan Majelis Tarjih sebagai forum untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran ke-Islaman, di samping hukum-hukum Islam, dengan menyusun keanggotaan Majelis Tarjih yang terdiri dari pada ulama dari berbagai kalangan (disiplin ilmu).
- b. Meningkatkan penggalan Hukum Islam untuk pemurnian pemahaman syari'at dan kemajuan hidup bergama dan mengaktifkan pendidikan ulama dengan mendirikan perguruan, kursus-kursus.
- c. Memperbanyak dan meningkatkan mutu ulama dengan antara lain menyelenggarakan latihan/kursus bagi anggota Angkatan Muda Muhammadiyah lulusan perguruan tinggi.
- d. Lebih meningkatkan terselenggaranya forum pembahasan tentang pemikiran-pemikiran ke-Islaman dan Hukum Islam pada khususnya, dan masalah-masalah lain yang mempunyai hubungan dengan Islam dan umat Islam.
- e. Menyelenggarakan forum-forum ketarjihannya yang rutin, selain Muktamar Tarjih, guna membahas tanggapan-tanggapan Muhammadiyah terhadap masalah-masalah kemasyarakatan/ umat yang timbul.
- f. Menyediakan juru bicara Muhammadiyah di bidang keagamaan.
- g. Melengkapi Buku Himpunan Putusan Tarjih dengan penjelasan-penjelasan yang autentik.
- h. Mengusahakan adanya tarjamah/tafsir Al-Quran yang diterbitkan oleh Muhammadiyah.

2. Pembinaan (Pendidikan dan Kesadaran) Politik.

- a. Muhammadiyah sebagai gerakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar yang bergerak di tengah-tengah masyarakat dan dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat menghindarkan diri dari pemikiran masalah-masalah nasional yang menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu Muhammadiyah sebagai Persyarikatan dari warganegara yang sadar sesuai sifat da'wahnya, harus menempatkan diri, berfungsi dan berperan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dalam batas-batas tidak melakukan kegiatan politik praktis.
- b. Sehubungan dengan itu, maka anggota Muhammadiyah sebagai warganegara yang sadar, perlu memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah kenegaraan, baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu perlu diadakan pendidikan politik, terutama bagi Pimpinan/Calon Pimpinan Persyarikatan.

3. Peningkatan Hubungan Luar Negeri.

- a. Hubungan dan kerjasama dalam bidang da'wah, pendidikan, dan sosial dengan organisasi-organisasi dan umat Islam di luar negeri yang selama ini telah berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan dan dikembangkan, dalam rangka mempererat hubungan sesama muslim.
- b. Meningkatkan hubungan dan kerjasama Muhammadiyah dengan organisasi-organisasi Islam di luar negeri untuk saling tukar-menukar pengalaman, dengan jalan mengadakan studi perbandingan.

- c. Mengembangkan solidaritas dengan sesama umat Islam di luar negeri, dengan jalan memberikan dukungan baik moril maupun spirituil/materiil.
- d. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri, untuk menjajagi kemungkinan penerimaan beasiswa bagi kader-kader Muhammadiyah.
- e. Meneruskan usaha pemrakarsaan berdirinya dan pembinaan organisasi-organisasi di luar negeri yang memakai nama Muhammadiyah dan mempunyai kesamaan pandangan keagamaan dengan Persyarikatan Muhammadiyah.

F. EKONOMI

- 1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan serta bimbingan ke arah peningkatan ekonomi anggota keluarga dengan antara lain penyebaran petunjuk-petunjuk praktis, kursus-kursus ketrampilan dan sebagainya.
- 2. Menghimpun usahawan-usahawan Muhammadiyah, meningkatkan mutu serta kemampuannya dengan dilandasi ajaran Islam, sehingga mampu memberikan sumbangan dan darma baktinya untuk kepentingan agama, negara, dan masyarakat.
- 3. Menggerakkan usahawan-usahawan Muhammadiyah dalam usaha-usaha praktis dan mengusahakan adanya suatu pilot proyek usaha ekonomi yang bersifat nasional.
- 4. Menggerakkan dan mendorong usaha perkoperasian dalam usaha meningkatkan kehidupan ekonomi anggota/keluarga.
- 5. Menggerakkan Ikatan Pengusaha Muhammadiyah.
- 6. Perlu menggalakkan bentuk-bentuk usaha produktif di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha perdagangan di kalangan anggota Muhammadiyah dan bagi tingkat Pimpinan.

G. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

- 1. **Pengkajian dan Penelitian Agama dan Kemasyarakatan.**
 - a. Menggalakkan penelitian tentang kehidupan dan perkembangan agama-agama yang hidup di Indonesia dan di luar negeri.
 - b. Mengintensifkan pengkajian tentang trend perubahan sosial dan implikasinya bagi perkembangan dan kehidupan beragama.
 - c. Menyenggarakan forum-forum ilmiah secara rutin, dengan mengundang para cendekiawan, terutama dari keluarga Muhammadiyah, untuk mengkaji masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan serta masalah-masalah yang dihadapi oleh Muhammadiyah.
 - d. Menghimpun para cendekiawan dari keluarga Muhammadiyah untuk dijadikan sebagai dapur konsep bagi Persyarikatan.
 - e. Mengadakan forum ilmiah guna merumuskan refleksi nilai-nilai Islam tentang etos kehidupan, etos kerja, dan lain sebagainya.
- 2. **Penerbitan dan Kepustakaan.**
 - a. Menggerakkan kegemaran membaca di kalangan anggota terutama di kalangan Pimpinan Persyarikatan semua tingkat serta mengusahakan tersedianya pepustakaan yang representatif.
 - b. Menggerakkan penulis-penulis Islam terutama di kalangan keluarga Muhammadiyah untuk menulis buku-buku tentang Islam dan kemasyarakatan, terutama buku-buku yang berhubungan dengan Persyarikatan Muhammadiyah.

- c. Mengusahakan adanya lembaga penerbitan yang menerbitkan secara berencana dan strategis buku-buku atau terjemahan buku-buku yang menopang pencerdasan kehidupan Muhammadiyah.
- d. Mengusahakan agar setiap tahun ada penerbitan Buku Almanak Muhammadiyah.
- e. Menggerakkan anggota Persyarikatan di daerah-daerah/wilayah-wilayah untuk menulis sejarah perjuangan Muhammadiyah dalam berbagai aspek/bidang.
- f. Mengusahakan buku bacaan anak-anak dan remaja yang bernafaskan Islam.
- g. Menggalakkan penerbitan majalah-majalah dan surat kabar milik Muhammadiyah.
- h. Menerbitkan bulletin-bulletin atau sejenisnya yang berisi perkembangan dan gerak dinamika Muhammadiyah dari bawah.

* * * *

Lampiran II-a

USUL DAN SARAN

(yang disampaikan oleh peserta Mukhtamar)

Usul-usul dan saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. MAJELIS TARIJH

- a. Agar kegiatan Majelis Tarjih ditingkatkan
- b. Agar Keputusan Majelis Tarjih dijabarkan dengan bahasa yang mudah difahami oleh anggota Muhammadiyah dan masyarakat luas.
- c. Agar tuntunan-tuntunan untuk muballigh, guru, dan buku-buku pelajaran bagi PDM (pendidikan dasar dan menengah) dan PTM (perguruan tinggi Muhammadiyah) didasarkan pada Putusan Tarjih.
- d. Agar dalam pembahasan masalah-masalah Muhammadiyah, Majelis Tarjih mengikutsertakan ilmuwan-ilmuwan dan cendekiawan yang ahli di bidangnya masing-masing.
- e. Agar Majelis Tarjih sering mengadakan forum pengkajian/ pembahasan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan beragama, dengan mengikutsertakan para cendekiawan dan para ahli.

2. MAJELIS TABLIGH

- a. Tabligh Muhammadiyah diharap lebih mengembangkan metode tabligh bilhal dalam kaitannya dengan program pengembangan masyarakat. Maka untuk itu perlu diadakan tuntunan.
- b. Perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para muballigh/da'i yang sudah ada dan mengadakan pendidikan calon muballigh (Kader Muballigh).
- c. Program Da'wah Jama'ah perlu ditingkatkan pelaksanaannya dengan memberikan tuntunan yang lebih praktis dan diadakan pilot proyek di tiap-tiap daerah.
- d. Supaya Majelis Tabligh membuat brosur-brosur, siaran-siaran kecil, rekaman kaset, untuk dapat disiarkan seluas-luasnya, seperti kepada turis ke dalam bahasa asing.

3. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

a. Guru:

- 1) Agar guru-guru Muhammadiyah – baik guru agama maupun umum – supaya ditatar terutama mengenai pemahaman dan penghayatan ke-Muhammadiyah.
- 2) Di tiap-tiap perguruan Muhammadiyah supaya diadakan pengajian/ceramah agama sebulan sekali kepada tenaga pengajar dan karyawan. Dan untuk tingkat Daerah diadakan tiga bulan sekali.
- 3) Sesama guru dan karyawan di lingkungan PDM dan PTM mengenakan pakaian sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) Dalam rangka meningkatkan karier guru supaya diadakan/ diusahakan adanya penataran/kursus, program diploma, dan penataran kepemimpinan bagi Kepala Sekolah.
- 5) Agar para guru yang pernah mendapat penataran kependudukan baik yang diadakan oleh Muhammadiyah maupun oleh Pemerintah, supaya menyumbangkan ilmunya dan menularkan/mentransferkan

pengetahuannya itu kepada guru-guru lain, agar dapat membantu pelaksanaan program pemerintah setempat.

b. Pembinaan Pelajar:

- 1) Menertibkan pakaian pelajar dan mahasiswa sesuai dengan tuntunan Islam.
- 2) Agar tiap-tiap sekolah Muhammadiyah didirikan dan dibina IPM supaya berfungsi, dan IMM di PTM.
- 3) Pelaksanaan olah raga bagi pelajar putri supaya mendapat perhatian khusus, baik yang mengenai pakaian maupun cabang olah raga yang dipilih, dan hendaknya dipisahkan antara pelajar putera dan putri.
- 4) Pelaksanaan pendidikan Al-Islam dan ke-Muhammadiyah untuk semua PDM dan PTM ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Qa'idah:

Agar PP Muhammadiyah menyempurnakan Qa'idah PDM dan PTM.

d. Mengingatn terhadap Keputusan Muktamar ke-40 tentang libur sekolah pada hari Jum'at.

4. MAJELIS P. K. U.

- a. Agar PKU lebih menggiatkan pelaksanaan bidang ibadah sosial (menyantuni fakir-miskin, merawat jenazah, orang sakit, orang jompo); juga menyempurnakan pelaksanaan zakat fithrah, shadaqah dan sebagainya.
- b. Agar PKU dapat mengusahakan beasiswa bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga miskin (seperti sistem orang tua asuh) dan memberi pelayanan kepada pasien dengan baik.
- c. PKU dalam menangani pengembangan masyarakat supaya bekerjasama dengan Majelis Tabligh khususnya dalam bidang dakwah bil-hal, sehingga terwujud dakwah pembangunan yang terpadu.
- d. PKU dalam peran-sertanya dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana agar dapat menampung saran-saran dari masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, dan mengkonsultasikan kepada Pemerintah.
- e. Dalam rangka pembinaan tenaga medik dan paramedik agar PKU dapat memberikan tuntunan penghayatan ke-Muhammadiyah kepada mereka.
- f. PKU harus meningkatkan citra Rumah Sakit Muhammadiyah dan rumah sakit lainnya yang dalam pembinaan PKU, antara lain dengan cara mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap rumah-sakit rumah-sakit tersebut.

5. MAJELIS EKONOMI:

- a. Agar Majelis Ekonomi dapat membuat tuntunan praktis dan menyelenggarakan penataran-penataran kepada pengusaha di lingkungan Muhammadiyah untuk memajukan usahanya.
- b. Supaya Majelis Ekonomi mengadakan usaha-usaha/langkah-langkah dalam rangka menanggulangi pengangguran.

6. KEPUSTAKAAN DAN PENERBITAN:

- a. Agar Muhammadiyah dengan sungguh-sungguh mengadakan penerbitan buku-buku, baik buku mengenai Muhammadiyah, ke-Islaman, maupun buku-buku umum, khususnya buku bacaan anak-anak.
- b. Supaya Muhammadiyah menggiatkan kembali perpustakaan (bibliotik) dan dokumentasi, guna menjadi pusat informasi tentang perkembangan Muhammadiyah.

7. KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

- a. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah melaksanakan penulisan sejarah tentang Muhammadiyah.
- b. Agar Muhammadiyah mengadakan suatu lembaga kesenian dengan tugas mengadakan pengkajian tentang perkembangan kesenian, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan mengadakan seleksi terhadap hasil-hasil pengkajian tersebut, mana yang baik untuk dikembangkan dalam lingkungan keluarga Muhammadiyah dan mana yang tidak sepatutnya.

8. ORGANISASI

Dalam rangka konsolidasi dan pemurnian amal usaha Muhammadiyah perlu diupayakan secara sungguh-sungguh:

- a. Agar semua Pimpinan Persyarikatan, Majelis, Biro, Lembaga-lembaga, dan Badan, Organisasi Otonom, supaya berfungsi penuh sesuai dengan tugas serta kewajibannya dan dilaksanakan segera setelah Muktamar ke-41 ini.
- b. Agar semua Keputusan Muktamar ke-41 ini segera dijabarkan dengan tuntunan praktis dan sejauh mungkin dengan ketentuan sasaran-sasaran minimal yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- c. Rangkaian jabatan dalam satu struktur harus dihindarkan, seperti jabatan anggota pimpinan persyarikatan yang membawahi langsung amal usaha tidak dibenarkan dirangkap dengan jabatan pimpinan amal usaha yang bersangkutan.
- d. Dalam rangka pembinaan personil dalam amal usaha Muhammadiyah, maka tenaga-tenaga dari luar Muhammadiyah, baik yang berupa bantuan dari pemerintah maupun yang diterima langsung dari masyarakat, perlu mendapatkan informasi dan bimbingan tentang ke-Muhammadiyahannya sehingga mereka menjadi akrab dalam suasana ke-Muhammadiyahannya.
- e. Agar Muhammadiyah mengadakan dan mulai memikirkan penyantunan kesejahteraan dan hari tua kepada karyawan yang bekerja di lingkungan amal usaha Muhammadiyah.
- f. Agar diadakan sistem periodisasi jabatan, evaluasi dan pertanggungjawaban bagi semua pimpinan amal usaha Muhammadiyah.
- g. Agar semua amal usaha Muhammadiyah menunjukkan identitas Muhammadiyah baik secara fisik, seperti memasang papan nama yang menyatakan bahwa amal usaha itu milik Muhammadiyah, dan secara moril menunjukkan kepribadian Muhammadiyah, dengan maksud agar amal usaha tersebut benar-benar dirasakan sebagai amal usaha Muhammadiyah.
- h. Semua yang terlibat dalam pengelolaan amal usaha Muhammadiyah baik berstatus pengurus maupun pimpinan dan karyawan harus berlaku sebagai bagian (unsur) pelaksana dakwah.
- i. Semua pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas kewajibannya dan atas keuangan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengurus yang membina secara langsung.

9. KADERISASI

- a. Agar pimpinan persyarikatan dengan sungguh-sungguh melaksanakan keputusan Muktamar ke-40 tentang Kaderisasi, baik dari anggota organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah maupun anak-anak keluarga Muhammadiyah yang diarahkan menjadi calon pimpinan persyarikatan dan sebagai kader yang akan terjun ke masyarakat.

- b. Agar persyarikatan dengan sungguh-sungguh memikirkan dan mengambil langkah-langkah dalam pengkaderan ulama, baik meningkatkan pondok-pondok pesantren dan fakultas-fakultas agama Islam Muhammadiyah yang sudah ada maupun dengan memperbanyak pendidikan Al-Islam dan ke-Muhammadiyah kepada mahasiswa PTM, seperti membuat asrama/ pondok dan lain-lain.
- c. Di dalam mewujudkan kampus Perguruan/PTM, Rumah Sakit, dan amal usaha-amal usaha lainnya sebagai amal usaha yang bersuasana Islam dan ke-Muhammadiyah, agar di dalamnya dibangun masjid/mushalla yang memadai dan dapat menampung seluruh personil.

10. ORGANISASI OTONOM

Karena dikonstatir dewasa ini hubungan antara unit-unit persyarikatan dan organisasi otonom kurang lancar (kurang akrab) sehingga belum dapat diwujudkan kegiatan beramal yang terpadu, maka Pimpinan Persyarikatan harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh dan kongkrit.

11. LAIN-LAIN

- a. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil prakarsa untuk memugar gedung PP Muhammadiyah di Jalan KHA Dahlan no. 99 Yogyakarta dan Jalan Menteng Raya no. 62 Jakarta, dengan harapan semua Wilayah, Daerah akan ikut membantu dalam pelaksanaannya.
- b. Dalam memupuk rasa keterikatan, rasa kekeluargaan/solidaritas dalam persyarikatan, agar penarikan iuran dan sumbangan/ shadaqah, infaq bagi anggota supaya diintensifkan.
- c. Agar difikirkan adanya satu pola penyaluran tenaga-tenaga tamatan sekolah, PTM, serta alumni organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah ke amal usaha Muhammadiyah.
- d. Agar supaya pimpinan persyarikatan mengambil prakarsa dan langkah-langkah yang lebih nyata dalam menghimpun dana dari berbagai sumber untuk kepentingan jalannya organisasi dengan segenap bagian-bagian dan organisasi otonomnya. Dalam pada itu juga diambil langkah-langkah pengelolaan keuangan Persyarikatan secara terpadu, antara lain dengan menggiatkan sistem RAPBM yang telah diputuskan oleh Muktamar ke-40.
- e. Agar anak-anak yang berijazah sekolah swasta yang sederajat dengan sekolah negeri dapat diterima sebagai calon pegawai negeri atau sebagai karyawan lainnya tanpa hambatan.
- f. Agar karyawan di kantor Pemerintah dan perusahaan tidak dilarang memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan Agama Islam.
- g. Pelaksanaan peringatan Natal di sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan perusahaan-perusahaan, serta tempat-tempat lainnya, agar mengingat pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah cq. Departemen Agama, yaitu tidak dibenarkan mengikutsertakan orang-orang pemeluk agama lain di luar agama Kristen.
- h. Masyarakat Muhammadiyah mendambakan Mu'allimin dan Mu'allimat sebagai pusat pendidikan kader Muhammadiyah dan 'Aisyiyah. Maka agar ditingkatkan mutu pendidikannya, khususnya pendidikan bahasa Arab dan Ilmu Agama serta peningkatan sarana dan prasarana.

* * *

Lampiran II-b

**REKOMENDASI DAN RESOLUSI
MUKTAMARMUHAMMADIYAH KE-41
7 - 11 DESEMBER 1985 DI SURAKARTA**

A. DALAM NEGERI**1. Sejarah**

Penulisan Sejarah Nasional dan PSPB yang berfungsi sebagai alat pendidikan untuk menambahkan kesadaran kebangsaan dan kecintaan kepada bangsa dan tanah air untuk mencapai pendidikan nasional, diharapkan pemerintah dapat memperhatikan kebenaran ilmiah dan tidak melupakan peranan agama dan umat Islam baik di zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan.

2. Pendidikan Agama dan Akhlaq serta Pelajaran bahasa Al-Quran

- a. Pelaksanaan pendidikan agama, khususnya di sekolah-sekolah dari SD sampai Perguruan tinggi baik sekolah negeri maupun swasta, agar pelaksanaannya diintensifkan sesuai dengan agama yang dipeluk masing-masing, karena melalui intensifikasi pendidikan agama dapat tercapai tujuan pendidikan nasional yaitu terwujudnya manusia yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan TAP MPR dan GBHN. Karena itu jam pelajaran agama di SD kelas 4- 6 yang sekarang ini tiga jam jangan sampai dikurangi justru syukur kalau bisa ditambah.
- b. Agar TVRI dan RRI dapat menyediakan siaran untuk pelajaran bahasa Al-Quran, dengan tujuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap kitab sucinya.
- c. Menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat umumnya agar dalam pendidikan di sekolah dan di masyarakat lebih menekankan aspek akhlaq untuk membina moralitas generasi muda dan masyarakat.
- d. Mendukung sepenuhnya kebijaksanaan pemerintah mengenai pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri yang tertuang dalam SKB Mendikbud dan Menteri Agama nomor 70/1977, dan untuk mendirikan mushalla di sekolah-sekolah dan universitas.
- e. Mengimbau para pimpinan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi swasta, agar memberikan kelonggaran kepada siswa/mahasiswa yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah termasuk shalat Jum'at dengan memberikan waktu istirahat dan untuk mengenakan busana muslimah bagi pelajar dan mahasiswa putri.

3. Kompilasi Hukum Islam

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengadakan proyek kompilasi hukum Islam yang merupakan kerjasama Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dan menghargai pula prakarsa pemerintah dalam mempersiapkan RUU tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Peradilan Agama dan RUU tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.

4. Tenaga Kerja Wanita

- a. Agar Pemerintah mengambil kebijaksanaan secara bertahap dalam menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah-tangga atau tenaga kasar lainnya ke luar negeri.

- b. Mendesak pemerintah untuk menindak tegas perusahaan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri yang telah melakukan manipulasi dokumen, penculikan wanita dan tindakan yang tidak manusiawi terhadap wanita.
5. **Aliran-aliran Baru di kalangan Umat Islam**
Sehubungan dengan terdapatnya aliran-aliran baru yang muncul di kalangan umat Islam yang mempunyai kecenderungan negatif atas ajaran-ajaran Islam, menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga kemurnian ajaran-ajaran Islam.
6. **Penanganan Terhadap Peristiwa Politik**
Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa politik yang ada hubungannya dengan agama, menyerukan kepada pemerintah agar dalam penanganannya dilakukan dengan pendekatan persuasif dan bijaksana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Kerukunan Hidup Umat Beragama**
Dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup beragama supaya lebih diintensifkan pelaksanaan:
 - a. Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDG-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparaturnya pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya.
 - b. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
 - c. Penjelasan Keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
 - d. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
 - e. Penjelasan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
 - f. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1979 tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
8. **Peringatan Natal**
Pelaksanaan peringatan Natal di sekolah-sekolah, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, dan lainnya agar mengingat pedoman yang telah disiapkan Pemerintah, yaitu Surat Edaran Menteri Agama yang isinya tidak dibenarkan mengikutsertakan orang-orang pemeluk agama di luar agama Kristen.
9. **Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila**
Menyambut baik inisiatif Presiden Soeharto yang telah memrakarsai berdirinya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang mengumpulkan infaq/shadaqah dari kalangan pegawai negeri yang beragama Islam dan mengharapkan hal serupa juga dilakukan terhadap para pegawai swasta, serta mengharapkan penggunaannya di samping untuk pembangunan masjid-masjid juga untuk membantu kegiatan-kegiatan dakwah Islam lainnya.
10. **Dakwah di Daerah-daerah Transmigrasi dan Suku Terasing**
Pemerintah diharapkan membantu usaha untuk meningkatkan dakwah, pendidikan, dan sosial Islam di daerah transmigrasi dan suku terasing.

11. Kenakalan Remaja

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja dilakukan usaha-usaha yang semaksimal terutama agar para orang tua dan masyarakat lingkungan dapat memberikan contoh teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

12. Film-film Pornografi atau Hiburan Negatif

- a. Menyerukan kepada Pemerintah agar menertibkan pemutaran film-film yang menyebarkan pornografi dan merusak akhlaq, termasuk film-film yang disiarkan oleh TVRI, serta menertibkan pemasangan reklame atau iklan yang menimbulkan kecenderungan hidup konsumtif.
- b. Untuk menghindarkan generasi muda dan masyarakat dari tontonan atau hiburan negatif, agar secara maksimal ditingkatkan upaya pengembangan karya-karya seni dan kebudayaan nasional yang positif dan kreatif.
- c. Menyerukan kepada para pengusaha perfilman, agar produksi film nasional tidak semata-mata bermotifkan komersial, tetapi terutama memperhatikan segi edukatif kultural dalam rangka ikut mendukung pembinaan moral bangsa terutama generasi muda.

13. Menyuburkan Kebudayaan Nasional

Menyerukan kepada pemerintah agar secara selektif mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, untuk itu perlu memberikan perhatian atas upaya menyuburkan kebudayaan nasional yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama.

14. Pengembangan Kepariwisata

Mendukung sepenuhnya seruan Presiden Soeharto baru-baru ini, agar dalam pengembangan kepariwisataan jangan membawa kerusakan agama dan moral bangsa, serta mengharapkan supaya hal tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

15. Tahayul dan Klenik

Menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat agar waspada terhadap usaha-usaha yang menyebarkan tahayul dan klenik yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan Agama.

16. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Mengimbau pemerintah agar pembinaan terhadap penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk di TVRI, benar-benar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru, seperti yang digariskan oleh GBHN.

Sesuai dengan anjuran Presiden Soeharto hendaknya para penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibina dan diarahkan untuk kembali ke induk agamanya masing-masing.

17. Wawasan Yang Berdimensi Nasional

Untuk memperkuat kesatuan nasional, mengimbau pemerintah dan pemuka masyarakat, agar terus dikembangkan wawasan yang berdimensi nasional, bukan untuk pemenuhan kepentingan golongan atau kelompok sosial tertentu.

18. Upaya di Bidang Ekonomi

- a. Sesuai dengan GBHN, mengharapkan pemerintah lebih bersungguh-sungguh dalam meningkatkan bantuan dan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah (pribumi), supaya mereka dapat mengembangkan potensi dan meningkatkan peran dalam pembangunan, dengan jalan antara lain: tetap menyalurkan fasilitas kredit bunga rendah dan penyederhanaan perizinan.

- b. Mengharapkan pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap sektor informal di perkotaan seperti pedagang kecil, pedagang kaki lima, dalam upaya memperluas lapangan kerja.
- c. Mengharapkan pemerintah agar sedapat mungkin mencegah terwujudnya perekonomian yang berorientasi pada sekelompok kecil ekonomi kuat, serta bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Menyerukan kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh memberikan perlindungan dan dorongan terhadap industri dalam negeri yang efisien, khususnya industri kecil dan padat karya, untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- e. Mengimbau pemerintah supaya dalam pembinaan dan pengembangan koperasi dilakukan dengan profesional dengan merangsang peran-serta dan swadaya masyarakat dan menghindari campur tangan aparat birokrasi.
- f. Mensyukuri keberhasilan bangsa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tahun 1985 dan mengimbau pemerintah agar tetap memelihara kegairahan petani dalam meningkatkan jumlah dan mutu produksi pangan, dengan jalan antara lain: tetap menampung hasil produksi pangan dan memberikan toleransi dalam kualitas gabah, serta memberikan bimbingan dan bantuan nyata diversifikasi usaha tani yang menguntungkan para petani.
- g. Mengimbau pemerintah agar memberikan anggaran yang cukup untuk kegiatan penelitian di bidang pertanian, antara lain dengan memberikan insentif yang menggairahkan kepada para peneliti bidang pertanian dan membantu usaha pendidikan swasta dalam mendidik tenaga ahli pertanian.

19. Foster Parent Plan

Menyerukan kepada pemerintah agar melaksanakan pengawasan terhadap International Foster Parent Plan yang mengadakan kegiatan di berbagai daerah di Indonesia yang bermotifkan sosial dan kemanusiaan tetapi disalah-gunakan untuk propaganda sesuatu agama.

20. Pelaksanaan Keluarga Berencana

- a. Menegaskan kembali pandangan Muhammadiyah bahwa pelaksanaan Keluarga Berencana dengan menggunakan vasectomi dan tubektomi adalah haram hukumnya.
- b. Mengimbau pemerintah agar Safari Senyum Badan Koordinasi Keluarga Berencana atau propaganda Keluarga Berencana lainnya agar dilakukan tidak terlalu berlebihan dan agar mengindahkan norma-norma agama dan moral.

B. PEMILIHAN UMUM

- 1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah sesuai dengan keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang, bahwa Muhammadiyah tidak ada hubungan dengan salah satu kekuatan sosial politik.
- 2. Muhammadiyah akan menyukseskan Pemilihan Umum tahun 1987 yang akan datang dan mengharapkan Pemilihan Umum tersebut berjalan dengan lancar, tenang dan baik.
- 3. Menyerukan kepada sesama anggota Muhammadiyah dan keluarga besar Muhammadiyah supaya menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Hak Asasi sebagai warga negara.

C. LUAR NEGERI

1. a. Menyerukan negara-negara Islam untuk meningkatkan usaha-usaha yang lebih kongkrit guna mewujudkan hak-hak rakyat Palestina untuk memiliki tanah air yang merdeka dan berdaulat.
b. Mengecam keras usaha-usaha Israel untuk me-Yahudi-kan Yerusalem.
c. Supaya Masjidil Aqsha dan Yerusalem dikembalikan ke dalam kekuasaan Arab.
2. Menyerukan Organisasi Islam Intrernasional seperti: OKI, Rabithah Alam Islamy, Mu'tamar Alam Islamy, dan lain-lain untuk lebih menggiatkan usaha bagi penyelesaian perang Irak-Iran sesuai dengan semangat ukhuwah Islamiyah.
3. a. Menyerukan masyarakat internasional untuk menegakkan hak asasi manusia terhadap orang-orang Muslim yang tertindas seperti di Philipina Selatan, Fatani (Thailand Selatan), Burma, Erithrea (Ethopia), Afrika Selatan, Sovyet Rusia, Bulgaria, dan lain-lain sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak yang sama dengan warganegara lainnya, mendapat kebebasan melaksanakan ajaran-ajaran agama serta mempertahankan identitas mereka.
b. Penyelesaian masalah umat Islam di Philipina Selatan supaya diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Tripoli tahun 1976.
4. Menyerukan kepada umat Islam sedunia untuk mendukung perjuangan umat Islam Cyprus Turki (Cyprus Utara) untuk mendapatkan hak-hak yang sah, adil dan berdaulat serta mempertahankan eksistensinya.
5. Sangat prihatin terhadap perkembangan di Libanon dan mengharapkan agar konflik di negara tersebut segera berakhir untuk terjaminnya perdamaian dan integritas Libanon.
6. Menuntut kepada Uni Sovyet untuk segera mengakhiri campur tangannya di Afghanistan dengan cara segera menarik pasukannya dan memberikan kepada rakyat Afghanistan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dan masa depan mereka sendiri.

* * *

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-42 15-19 DESEMBER 1990 DI YOGYAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Muktamar Muhammadiyah ke-42 yang telah berlangsung pada tanggal 27 Jumadilawal s.d. 2 Jumadilakhir 1411 bertepatan dengan tanggal 15 s.d. 19 Desember 1990 di Yogyakarta, setelah mengikuti dengan seksama:

1. Amanat dan pengarahannya dari Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Soeharto;
2. Ceramah dari Menteri Agama R.I. H. Munawir Sadzali, M.A.;
3. Ceramah dari Menteri Dalam Negeri R.I. Rudini;
4. Ceramah dari Panglima Abri Jenderal Try Sutrisno;
5. Ceramah dari Menteri Penerangan R.I. H. Harmoko;
6. Sambutan Gubernur Kepala Daerah DIY Sri Paduka Paku Alam VIII;
7. Ceramah dari Sri Sultan Hamengku Buwono X;
8. Khutbah Iftitah PP Muhammadiyah yang disampaikan oleh H. A. R. Fakhruddin;
9. Laporan PP Muhammadiyah periode 1985–1990 yang disampaikan oleh H. Ramli Thaha, S.H.;
10. Prasaran tentang “Program Persyarikatan Tahun 1990–1995” yang disampaikan oleh Drs. H. A. Rosyad Sholeh;
11. Prasaran tentang “Pengembangan Organisasi” yang disampaikan oleh H. Fahmy Chatib, S.E.;
12. Prasaran tentang “Peningkatan dan Penyantunan Kaum Dhu`afa” yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL., dan H. A. Azhar Basyir, M.A.
13. Prasaran tentang “Peningkatan Kualitas Pimpinan” yang disampaikan oleh M. Djindar Tamimy dan H. Djarnawi Hadikusuma;
14. Prasaran tentang “Strategi Da’wah pada Era Informasi dan Industrialisasi” yang disampaikan oleh H. Rusydi Hamka dan Dr. H. Ahmad Watik Pratiknya;
15. Hasil Pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990–1995;

MENINGAT:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Tanggapan, pendapat, dan pembahasan dari para peserta Muktamar dalam Sidang Seksi dan Sidang Pleno;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

I. PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1990–1995

1. Mengesahkan hasil Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990–1995, terdiri dari:
 1. H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. (997)
 2. Dr. H. M. Amien Rais (993)
 3. Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL. (890)
 4. Drs. H. Sutrisno Muhdam (830)
 5. H. Rusydi Hamka (774)

6. Drs. H. A. Rosyad Sholeh	(748)
7. H. Fahmy Chatib, S.E.	(701)
8. H. Djarnawi Hadikusuma	(676)
9. H. Ramli Thaha, S.H.	(671)
10. Dr. H. Ahmad Watik Pratiknya	(655)
11. H. S. Prodjokusumo	(638)
12. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif	(557)
13. H. Abdurrozak Fachruddin	(516)

2. Mengesahkan H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995.

II. LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1985-1990

Menerima Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1985-1990 dengan beberapa catatan, yaitu:

1. Agar dilampirkan/dilengkapi dengan Laporan Keuangan serta Daftar Inventaris/asset Muhammadiyah dari berbagai jenis amal usaha.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar memberikan ketegasan tentang wewenang pembinaan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di bawah pembinaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
3. Mukhtamar Muhammadiyah ke-42 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995 untuk mengukuhkan kepengurusan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 1989-1993 di bawah kepemimpinan M. Din Syamsuddin M.A. sebagai hasil Mukhtamar Pemuda Muhammadiyah IX di Palembang tahun 1989.

III. PROGRAM PERSYARIKATAN TAHUN 1990-1995

Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Program Persyarikatan Periode 1990-1995, dengan penyempurnaan sebagai terlihat pada lampiran 1.

IV. PENGEMBANGAN ORGANISASI

Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Pengembangan Organisasi (lihat lampiran) dengan catatan sebagai berikut:

- A. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat untuk melaksanakan terwujudnya pengembangan organisasi yang dapat mencapai maksud dan isi pokok-pokok prasaran tersebut, khususnya menyangkut ruang lingkup sebagai berikut:
 1. Reformasi dalam manajemen organisasi, yang meliputi:
 - a. Pembentukan Sekretariat Eksekutif sebagai staf pelaksana pimpinan pada semua tingkat pimpinan, dengan disertai qa'idahnya, yang menyangkut hubungan kerja dan kedudukan profesional secretariat eksekutif/staf pelaksana tersebut.
 - b. Menyusun manajemen pengadaan dana yang digunakan untuk membeayai organisasi dari sumber luar dan dalam Persyarikatan, termasuk petunjuk pelaksanaannya yang menyangkut cara penghimpunan, pengelolaan, dan pengendalian/ pengawasan dana tersebut. Manajemen pengadaan dana ini dimaksud untuk menjamin tersedianya dana untuk terlaksananya (1.a.) di atas, di samping berfungsinya jiwa dan semangat pengawasan.
 2. Refungsionalisasi organisasi yang meliputi:
 - a. Agar badan-badan pembantu Pimpinan Persyarikatan (Majelis,

- Badan, dan Lembaga), yang senantiasa mengalami perkembangan, hendaknya dalam pembentukan dan pembinaannya senantiasa memelihara keutuhan terpadu (integrative) Persyarikatan.
- b. Agar organisasi otonom menfungsikan kembali hubungannya dengan Persyarikatan sesuai dengan qa'idah yang berlaku, dan selalu memelihara fungsi tersebut dalam memberikan pengarahan dan petunjuk teknis.
 - c. Agar setiap tingkat pimpinan menghidupkan fungsi pengendalian/pengawasan melekat yang terkait dengan tanggungjawab pada diri tiap pimpinan. Di samping perlu diintensifikannya pengawasan fungsional dari Badan Pengawas Persyarikatan.
- B. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk:
1. Menyusun penjelasan AD/ART, jika sasaran pengembangan organisasi berkaitan dengan butir-butir AD/ART seperti: ketentuan mengenai Muktamar, Tanwir, Majelis, Badan, dan Organisasi Otonom.
 2. Menyusun Pedoman Organisasi dan Administrasi Persyarikatan dalam arti yang luas, yang antara lain meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembuatan laporan.
 3. Menyosialisasikan Pedoman Organisasi dan Administrasi secara luas ke semua jajaran di lingkungan Muhammadiyah.
 4. Menyusun peraturan tentang rangkap jabatan dalam Persyarikatan termasuk Majelis, Badan, Organisasi Otonom, dan amal usaha Muhammadiyah.

V. PENINGKATAN PENYANTUNAN KAUM DHU'AFa'

Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Peningkatan Penyantunan kaum Dhu'afa' (lihat lampiran), dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- A. Mengubah judul yang semula berbunyi: "Peningkatan dan Penyantunan Kaum Dhu'afa'" menjadi "Peningkatan Penyantunan Kaum Dhu'afa'".
- B. Dasar-dasar Naqliyah. Penyantunan kaum dhu'afa mempunyai dasar-dasar naqliyah, antara lain:
 1. Tersebut dalam al-Quran antara lain dalam surat: al-Anbiya: 107; al-Baqarah: 177 dan 261; Ali-Imron: 92; an-Nisa: 75 dan 144; at-Taubah: 103; Saba': 39; Shaf: 10, 11, dan 12; dan al-Ma'un: 1 s.d. 7.
 2. Tersebut dalam Hadits antara lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Turmudzi dan Abi Yahya, Bukhari dan Muslim, Abusy-Syaikh dari Ibnu Abbas, Atth-Thabarani, dan Abu Dawud.
- C. Dalam menyusun petunjuk operasional agar memperhatikan antara lain:
 1. Program Kerja Muhammadiyah Nomor 8 ayat 5 s.d. 8 Tahun 1978.
 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/1979.
 3. Juklak Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Nomor J.4/039/1979.
 4. Juklak Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Nomor J.3/118/1980.
- D. Sumber dana penyantunan dhu'afa antara lain meliputi:
 1. Zakat Amwal
 2. Infaq, Shadaqah, Wakaf, Hibah, dan lain-lain.
 3. Sumbangan siswa, mahasiswa, karyawan, yang dikelola melalui amal usaha Persyarikatan.
 4. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

- E. Untuk Badan Pengelola penyantunan dhu'afa perlu dibentuk badan pelaksana urusan zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah.
- F. Bentuk santunan dan pembinaan antara lain meliputi:
 - 1. Latihan Kerja, bekerjasama dengan Pemerintah.
 - 2. Membentuk Jama'ah dalam rangka pembinaan kaum dhu'afa.
 - 3. Mendirikan usaha-usaha produktif.
 - 4. Pengadaan dan pendayagunaan lahan-lahan baru.
- G. Sasaran dan obyek santunan meliputi:
 - 1. Peningkatan kemampuan dan kualitas kaum dhu'afa dalam segala segi, misalnya segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan lain-lain.
 - 2. Masyarakat yang ditimpa bencana alam.
- H. Mukhtar menyarankan agar:
 - 1. Mjelis Tarjih bekerjasama dengan Majelis Tabligh untuk senantiasa memberi penerangan tentang zakat.
 - 2. Majelis Tarjih segera membahas dan memutuskan tentang Hukum Bunga Deposito.
 - 3. Pendataan secara terpadu terhadap golongan aghniya dan dhu'afa.
 - 4. Pembakuan sistem administrasi pengelolaan zakat.
 - 5. Pengumpulan uang melibatkan bank dan atau baitul mal.
 - 6. Membuat Kartu Sehat melalui Balai Kesejahteraan Sosial (Bakesos).

VI. PENINGKATAN KUALITAS PIMPINAN

Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Peningkatan kualitas Pimpinan dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- 1. Mengamanatkan kepada semua tingkat Pimpinan Persyarikatan, Majelis, Badan, Organisasi Otonom, dan Pimpinan Amal Usaha, agar dalam proses rekrutmen pimpinan, supaya lebih mengutamakan kader-kader Muhammadiyah yang qualified, dengan berdasarkan ketaqwaan yang memancarkan sifat-sifat Islam, berakhlaqul-karimah, memiliki wawasan pemikiran yang luas serta komitmen ke-Muhammadiyah.
- 2. Tuntunan Rasulullah saw. tentang kriteria seorang pimpinan wajib menjadi pedoman dalam menetapkan kepemimpinan dalam Persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah. Oleh karena itu:
 - a. Personalia Pimpinan Persyarikatan sejak tingkat Pusat sampai Ranting, Majelis, Badan, Organisasi Otonom, dan Pimpinan amal usaha, harus betul-betul menjiwai hakekat agama Islam dan wajib menjaga serta menunjukkan/membina UKHUWAH Islamiyah dalam tubuh organisasi.
 - b. Supaya disusun pedoman pembinaan Pimpinan Persyarikatan secara tertib sejak dari tingkat Pusat sampai tingkat Ranting.
 - c. Lembaga Penasehat supaya difungsikan dengan peran yang tegas dan produktif.
- 3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat untuk segera menetapkan Buku Pedoman Perkaderan Muhammadiyah, yang antara lain meliputi jenjang perkaderan dalam Muhammadiyah serta materi-materi perkaderan masing-masing jenjang.
- 4. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat untuk merintis dan memrakarsai berdirinya Pusat Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Muhammadiyah di tingkat Pusat.

VII. STRATEGI DAKWAH PADA ERA INFORMASI DAN INDUSTRIALISASI

Menerima prasarana Pimpinan Pusat tentang Strategi Dakwah pada Era Informasi dan Industrialisasi, serta menetapkan kembali strategi dakwah Muhammadiyah keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1987 di Yogyakarta dengan penyempurnaan seperti tertera pada lampiran 2. Di samping itu, berkaitan dengan pelaksanaan dakwah Persyarikatan, Muktamar merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Agar dilakukan upaya-upaya kongkrit untuk penggalan dana dakwah serta pengelolaannya secara terpadu.
2. Dalam era informasi dan industrialisasi, dakwah tertumbuk pada masalah dilematis. Satu sisi harus berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi dan satu sisi lain harus bisa memberi warna perubahan ini dengan warna islami. Dalam hal ini Muktamar memandang bahwa garapan dakwah adalah memperhatikan kuantitas umat Islam dan meningkatkan kualitas umat Islam. Peningkatan kualitas ini meliputi: kualitas keagamaan, pendidikan, ekonomi, etos kerja, dan kesejahteraan.
3. Berdasarkan hal tersebut pada butir (2), maka Muktamar mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat dan seluruh jajaran Pimpinan Muhammadiyah untuk meningkatkan pendayagunaan seluruh amal usaha Muhammadiyah sebagai media/sarana dakwah.
4. Muktamar menetapkan Strategi Dakwah tersebut pada lampiran 2 untuk dipedomani dalam melaksanakan kegiatan dakwah bagi seluruh jajaran dan amal usaha Muhammadiyah, dan selanjutnya menugaskan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun petunjuk pelaksanaannya.

VIII. USUL-USUL

Muktamar Muhammadiyah ke-42 menerima dan menyetujui usul-usul sebagai berikut.

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar membuat peta kekuatan dan kelemahan dakwah Muhammadiyah guna keberhasilan gerakan dakwah Persyarikatan.
2. Agar prosedur penerbitan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah disederhanakan dan dipercepat, serta bentuk KTA ditingkatkan mutunya.
3. PP Muhammadiyah dan tingkat Pimpinan Persyarikatan di bawahnya supaya mengintensifkan pengembangan organisasi di wilayah Indonesia Bagian Timur.
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar membuat petunjuk teknis kaidah-kaidah yang dikeluarkan.
5. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyelesaikan persoalan tanah-tanah yang telah dikuasai menjadi milik Persyarikatan, sekaligus memroses penerbitan sertifikat.
6. Meningkatkan peran lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk menjadi sarana pendidikan kader.
7. Dalam rangka mengatasi kelangkaan ulama/da'i, maka dipandang perlu agar setiap wilayah dapat mendirikan sebuah lembaga pendidikan pesantren.
8. Berdasarkan AD/ART maka penarikan uang iuran anggota lebih diintensifkan.
9. Pimpinan Cabang/Daerah Muhammadiyah yang berdekatan dengan lokasi transmigrasi agar aktif berpartisipasi dalam pengembangan dakwah Islam di daerah tersebut.

10. Dalam rangka mengembangkan dakwah pada era informasi yang menjangkau masyarakat luas, maka di tiap wilayah agar diupayakan pendirian pemancar radio dakwah.
11. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mengefektifkan/meningkatkan peranan majalah Suara Muhammadiyah sebagai sarana komunikasi informasi dan dakwah di kalangan warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya.
12. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar meningkatkan fungsi dan peranan P:usat Informasi dan Dokumentasi Muhammadiyah.
13. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mengaktifkan kembali Majelis Hikmah sebagai pusat pengkajian masalah-masalah strategis dan kebijaksanaan negara.
14. Untuk menghindarkan umat Islam dari makanan/minuman maupun prodek lain yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan Islam, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Konsumen Islam.
15. Agar Persyarikatan Muhammadiyah mengaktifkan kegiatan-kegiatan seni budaya yang bernafaskan Islam.
16. Untuk mendukung terselenggaranya proses manajemen organisasi yang efektif, dipandang perlu membentuk Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Manajemen di tiap Wilayah.
17. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah memrakarsai pembentukan organisasi profesional dan fungsional di kalangan umat Islam seperti Ikatan pengusaha Muslim Indonesia (IPMI), Ikatan Seniman Budayawan Muslim Indonesia (ISBMI).

IX. RESOLUSI DAN REKOMENDASI

A. KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA

1. Dalam rangka meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama, menyerukan kepada Pemerintah untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan:
 - a. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDG-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.
 - b. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Penjelasannya.
 - c. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia dan Penjelasannya.
 - d. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia.
2. Menyerukan kepada Pemerintah untuk meningkatkan ketentuan-ketentuan di atas dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dilengkapi dengan sanksi bagi yang melanggar.
3. Menyerukan kepada seluruh pimpinan dan penganut berbagai agama di Indonesia untuk menaati semua keputusan-keputusan tersebut di atas.

4. a. Menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang telah bertindak cepat dan tegas terhadap penanggungjawab MONITOR yang telah menghina Nabi Muhammd saw. sehingga menimbulkan masalah SARA.
b. Mengimbau kepada Pemerintah untuk segera mengajukan kasus MONITOR tersebut ke Pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
c. Menyerukan kepada semua fihak untuk menghindari diri dari segala perbuatan yang menimbulkan masalah SARA.
d. Menyerukan kepada umat Islam supaya selektif dalam memilih bahan bacaan yang dapat merusak aqidah dan keyakinan agama.
5. Yang disebut dengan “Natal Bersama” adalah perayaan Natal yang dilakukan oleh Umat Kristen Protestan dan Katholik. Peringatan Natal di sekolah-sekolah, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, dan lain-lainnya, agar berpedoman kepada ketentuan Pemerintah, yaitu Surat Edaran Menteri Agama yang tidak membenarkan mengikuiti-sertakan para pemeluk agama lain di luar agama Kristen dan Katholik dalam peringatan Natal.
6. Menyerukan kepada semua Pimpinan Sekolah, Kantor dan Pabrik-pabrik terutama yang swasta, untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar, mahasiswa, atau karyawannya untuk dapat melaksanakan shalat Jum’at dan ibadah-ibadah lainnya dengan teratur dan baik.

B. PENDIDIKAN

1. Muhammadiyah bersyukur dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan-serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional dengan asas kesatuan pembinaan dan keterbukaan.
2. Muhammadiyah sangat menghargai ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang pendidikan agama sebagai kurikulum wajib untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan, baik negeri maupun swasta, sesuai dengan agama peserta didik, serta tenaga pengajar pendidikan agama yang beragama sesuai dengan agama peserta didik tersebut.
3. Muhammadiyah berharap dalam penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai dengan pasal-pasal dan penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989.
4. Menyerukan kepada Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pendidikan agama di perguruan-perguruan swasta yang non Islam sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Nol 2 Tahun 1989, sehingga anak-anak didik mendapat pelajaran agama yang betul-betul sesuai dengan agama yang dianutnya.
5. Mengingat jumlah siswa dan mahasiswa perguruan swasta lebih besar dari jumlah siswa dan mahasiswa perguruan negeri, maka diharapkan agar anggaran pendidikan digunakan secara proporsional baik untuk perguruan negeri maupun swasta.
6. Sesuai dengan ajaran Islam yang mewajibkan wanita mengenakan busana yang menutup seluruh aurat (busana muslimah), maka Muhammadiyah

mengimbau agar Pemerintah mengizinkan pemakaian busana muslimah di sekolah-sekolah negeri.

C. SOSIAL BUDAYA

1. Menyerukan kepada Pemerintah agar secara selektif mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Untuk itu perlu diberikan perhatian terhadap upaya pelestarian kebudayaan nasional yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.
2. Berhubung dengan program Pemerintah dalam pengembangan wisata termasuk Visit Indonesia Year 1991, maka Muhammadiyah mengharapkan supaya pengembangan kepariwisataan tersebut tidak merusak nilai-nilai moral dan keagamaan bangsa Indonesia.
3. Menyerukan kepada TVRI dan TV Swasta agar tidak menayangkan acara-acara yang bercorak memasyarakatkan kebudayaan asing yang merusak nilai-nilai moral dan agama bangsa.
4. Menyerukan kepada Pemerintah agar menyensor dan mengontrol iklan-iklan, film-film, dan media massa yang bersifat pornografis, karena dapat merusak nilai-nilai moral bangsa, di samping merendahkan harkat wanita.

D. KEHIDUPAN BERAGAMA UMAT ISLAM

1. Mengajak segenap kaum muslimin khususnya warga Muhammadiyah untuk selalu meningkatkan kualitas hidup keagamaan dengan mengintensifkan pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam, dalam seluruh aspek kehidupan.
2. Mengajak semua organisasi Islam untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dengan mengembangkan kehidupan yang penuh tasamuh dan ta'awun dalam rangka 'Izzul Islam wal Muslimin.
3. Mendorong segenap cendekiawan muslim untuk merumuskan konsep-konsep Islam bagi pemecahan masalah-masalah kongkrit kemanusiaan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
4. Mengucapkan selamat atas dan telah terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Semoga tercapai apa yang dicita-citakan, guna kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia di masa mendatang.
5. Mengharapkan kepada Pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Muktamar Muhammadiyah ke-42 menyampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah membantu pelaksanaan dakwah di daerah transmigrasi dengan meningkatkan dan melatih da'i-da'i khusus baik kuantitatif maupun kualitatif.
7. Muktamar Muhammadiyah ke-42 menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang sudah menayangkan pelajaran Bahasa Arab di TVRI dan mengharapkan jadwalnya ditambah.

E. KELUARGA BERENCANA

1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah bahwa Vasektomi dan Tubektomi haram dipergunakan sebagai sarana Keluarga Berencana, dan supaya jangan dijadikan program dalam pelaksanaan Program Nasional Keluarga Berencana Indonesia.
2. Menyerukan kepada Pemerintah untuk mengontrol penjualan,

pendistribusian, dan pemakaian alat-alat kontrasepsi, agar tidak disalahgunakan untuk perbuatan yang tidak sesuai dengan moral dan ajaran Islam.

F. SOSIAL EKONOMI

1. Mendukung imbauan Presiden tentang pembagian saham dari para pengusaha nasional yang berhasil kepada koperasi (sebesar 25%) sebagai salah satu cara pemerataan asset ekonomi.
2. Menyerukan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan perundang-undangan kepada kelompok pengusaha menengah, kecil, dan koperasi, agar mereka mampu bersaing dalam pasar bebas.
3. Menyerukan kepada Pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan undang-undang anti monopoli dan oligopoli sehingga asset ekonomi tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang tertentu saja.
4. Menyerukan kepada umat Islam umumnya dan warga Muhammadiyah khususnya untuk meningkatkan pengeluaran, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai salah satu cara menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

G. PEMILIHAN UMUM

1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah sesuai dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang, bahwa Muhammadiyah tidak mempunyai kaitan dengan salah satu kekuatan sosial-politik.
2. Muhammadiyah akan ikut menyukseskan Pemilu 1992 yang akan datang, dan mengharapkan agar Pemilu tersebut berjalan dengan lancar, tenang, dan tertib.
3. Menyerukan kepada keluarga besar Muhammadiyah khususnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hak asasinya sebagai warga negara.

H. LUAR NEGERI

1. Untuk menghindari kehancuran tanah suci umat Islam dan negara-negara di sekitarnya, mendesak pemerintah Irak dan Amerika Serikat untuk mengadakan perundingan dalam rangka pemecahan Krisis Teluk secara damai, dan menyerukan kepada negara-negara Arab untuk bersatu dan terlibat secara aktif dalam penyelesaian krisis tersebut, guna menjamin hak-hak dan kedaulatan Kuwait, Irak, dan Saudi Arabia.
2. Mendukung kebijaksanaan Presiden mengenai Krisis Teluk, yang tidak akan mengirimkan pasukan ABRI ke kawasan Teluk; hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa sesama muslim tidak dibenarkan untuk saling menumpahkan darah.
3. Mengutuk pemerintah zionis Israel atas tindakan kekerasan yang mereka lakukan terhadap rakyat Palestina, dan menyerukan agar tindakan tersebut dihentikan, serta mengimbau kepada PBB untuk segera melakukan upaya baru penyelesaian terhadap masalah pendudukan Israel di daerah Palestina tersebut.
4. Mengimbau Pemerintah India untuk melindungi hak dan kepentingan umat Islam dari agresi kaum ekstremis Hindu yang akan menghancurkan masjid Ayodya yang selanjutnya akan didirikan kuil.

5. Menyerukan kepada Pemerintah Pakistan dan India untuk mencari jalan perundingan damai terhadap masalah Kashmir, dengan memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat Kashmir untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri.
6. Menyerukan kepada negara-negara anggota OKI dan negara-negara yang cinta damai untuk senantiasa mendukung perjuangan kaum muslimin Afghanistan guna menentukan nasib dan masa depannya sendiri; dan mengimbau untuk segera dihentikannya campur tangan negara-negara asing dalam masalah Afghanistan tersebut.
7. Menyerukan kepada umat Islam seluruh dunia untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan solidaritas dalam rangka 'Izzul Islam wal Muslimin.
8. Menyerukan kepada umat Islam seluruh dunia untuk mendukung Cyprus Utara guna mendapatkan hak-hak dan identitasnya.

* * *

GARIS BESAR PROGRAM MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

Bagian Satu PENDAHULUAN

Latar belakang permasalahan

1. Permasalahan Global

Seluruh peradaban manusia menjelang abad ke-21 ini menghadapi suatu tantangan berat. Perkembangan dan perubahan di tingkat global (dunia) demikian kompleks dan meluas ke segenap bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Proses globalisasi kehidupan menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan dan perubahan tersebut. Perkembangan dan perubahan di tingkat global tersebut tidak hanya membawa kepada kehidupan yang lebih baik, tetapi dalam berbagai segi justru menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan terhadap kelangsungan hidup umat manusia di masa depan. Di mana-mana terjadi konflik kepentingan, baik kepentingan ideologi, politik, ras, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan, serta ditandai dengan terjadinya kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan yang makin parah.

Di bidang politik ditandai dengan perubahan besar-besaran, seperti di Timur Tengah dan di kawasan dunia lain, yang sangat berpengaruh pada dunia Islam. Di bidang ekonomi terjadi globalisasi ekonomi yang mempengaruhi sistem ekonomi dunia yang masih didominasi oleh sistem ekonomi sosialis dan kapitalis yang ternyata menimbulkan berbagai problem kehidupan umat manusia terutama bagi negara-negara berkembang.

Di bidang sosial dan budaya kecenderungan yang berkembang adalah pengaruh sistem sosial dan budaya yang materialistik, sekularistik, dan hedonistik yang telah melahirkan berbagai bentuk kriminalitas, sadisme, dan budaya amoral yang demikian meluas. Budaya demikian telah mengabaikan nilai-nilai Agama dan melahirkan berbagai kecemasan hidup manusia.

Sementara itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian cepat dan begitu kuat menandai kehidupan umat manusia di akhir abad ke-20 dan menjelang abad ke-21 dewasa ini. Tidak dapat dibantah bahwa perkembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ternyata memiliki dimensi manfaat dan sekaligus mudlarat.

Aspek positif perkembangan IPTEK antara lain meliputi:

- a. Makin terbukanya berbagai rahasia alam karena bertambahnya kepekaan manusia dalam memahami segenap realitas.
- b. Makin bertambahnya kemampuan manusia untuk meningkatkan daya dukung sumber daya alamiah.
- c. Makin lancarnya komunikasi antar bangsa sehingga terjadi akulturasi budaya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
- d. Makin kuatnya arus informasi yang dapat mempengaruhi seluruh aspek dan sendi kehidupan.
- e. Makin bertambahnya tingkat kenyamanan hidup materiil, jauh melampaui apa yang pernah dicapai manusia sekitar setengah abad yang lalu.

Namun demikian kemajuan IPTEK tidak cukup jika hanya dilihat dari sudut manfaatnya, di dalam realitasnya, pada waktu yang sama peradaban manusia dihadapkan pada kenyataan:

- a. Dengan semakin terbukanya rahasia alam mendorong manusia bertambah rakus untuk mengejar dan memburu kemakmuran fisik-materiil. Eksploitasi alam dan sumber daya secara berlebihan mengakibatkan makin rusaknya ekosistem, yang pada giliran berikutnya dapat mengancam masa depan kelestarian alam.
- b. Munculnya persaingan tidak sehat untuk memperebutkan aset-aset ekonomi, yang kemudian menimbulkan globalisasi ekonomi dan ketergantungan absolut negara-negara kecil kepada negara-negara besar.
- c. Disparitas antara negara maju dan negara terbelakang/sedang berkembang ditandai oleh dominasi negara yang tersebut pertama terhadap negara yang tersebut belakangan pada hampir segala segi kehidupan.
- d. Kalkulasi rasionalitas ekonomi dan administrasi yang dijadikan pertimbangan satu-satunya dalam memberi bobot bagi segala aktivitas manusia makin menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral-spiritual, yang ditandai oleh sekularisasi dan desakralisasi segenap tatanan peradaban modern.
- e. Merosotnya martabat manusia sehingga manusia terperosok hanya menjadi pelengkap dan alat produksi semata.
- f. Timbulnya berbagai perilaku menyimpang sebagai bagian tak terpisahkan dari peradaban materialistik, serba mewah dan nafsi-nafsi (individualistik), yang dapat mengancam segala tatanan yang mapan serta akan menjungkir balikkan segala nilai Islam. Kehidupan makin ditandai oleh gejala keterasingan (alienasi), kehampaan nilai dan serba relatif.
- g. Perang nuklir merupakan resiko yang terberat manakala perkembangan IPTEK makin dijauhkan dari kendali moral dan agama, yang akibatnya dapat menghancurkan segala umat manusia dan segenap isi jagad raya.

2. Permasalahan Nasional

Bangsa Indonesia kini sedang berpacu mengejar ketinggalan di bidang IPTEK. Pembangunan selama 20 tahun terakhir telah mampu memberikan daya dukung dalam proses akselerasi modernisasi. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5 (lima) persen per tahun selama Orde Baru bangsa Indonesia telah berhasil mengatasi kemelut ekonomi yang diwarisi dari Orde Lama, dan oleh berbagai badan dunia telah pula diakui sebagai salah satu negara berkembang yang dapat mengatasi berbagai rintangan pembangunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Dengan kata lain sampai tahun pertama PELITA V bangsa Indonesia telah memiliki landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi.

Di bidang politik harus pula diakui, kehidupan politik yang stabil sudah menjadi ciri pokok format politik Order Baru, dan dalam batas-batas tertentu bangsa kita juga telah mampu melakukan langkah-langkah strategis dalam menciptakan infra dan suprastruktur politik dalam rangka pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu cirinya yang lain, ialah terciptanya pemerintahan yang stabil, kuat, dan mampu mengayomi kepentingan mayoritas bangsa Indonesia.

Begitu pula pada aspek sosial-budaya, aktivitas pembangunan telah memberikan dasar-dasar yang memadai untuk mengaktualisasikan potensi budaya bangsa. Angka-angka statistik menyangkut berbagai segi pada dimensi sosial-budaya menunjukkan grafik

yang meningkat dari PELITA I sampai PELITA V. Di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, keluarga berencana, pengembangan IPTEK dan budaya juga menunjukkan adanya hasil-hasil yang menggembirakan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tidak jauh berbeda situasinya dengan segi-segi yang telah disebutkan di muka, dalam lapangan keagamaan pun bangsa kita telah dapat membangun rumah peribadatan, kelembagaan agama dan saling pengertian antar umat beragama.

Namun demikian, setiap kemajuan yang dicapai tentu akan diikuti oleh kelemahan yang inheren di dalamnya. Beberapa butir berikut dapat menggambarkan sisi kelemahan yang perlu kita carikan jalan pemecahannya di dalam meneruskan program pembangun di masa depan:

- a. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masih dituntut pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, termasuk usaha mengendalikan penyimpangan yang terjadi, sehingga makin mendekati pada tercapainya cita-cita nasional.
- b. Dalam pembangunan masih dituntut konsistensi pelaksanaannya terutama yang secara langsung dapat melibatkan dan dinikmati rakyat banyak dalam konteks pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana menjadi tujuan pembangunan nasional.
- c. Di bidang ekonomi tuntutan akan pemerataan sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan, makin meningkat. Pembangunan yang lebih berorientasi untuk mengangkat martabat golongan lemah harus lebih diprioritaskan, agar proses dan hasil pembangunan benar-benar memihak pada semua warga negara, sehingga keadilan ekonomi seperti dimaksud pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi kenyataan. Pembangunan jangka panjang tahap kedua harus lebih menekankan orientasinya pada wawasan kemanusiaan dan menghindari terjadinya eksploitasi alam secara berlebihan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem.
- d. Aspek politik yang perlu memperoleh penekanan adalah:
 - Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta di dalam segenap proses politik sesuai dengan hak-haknya.
 - Memberikan peran yang proporsional bagi pemerintah sebagai aparat pelayan masyarakat dan penjaga kesinambungan pembangunan, untuk mengembangkan kreativitas dan dinamika masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri.
 - Mengembangkan budaya politik partisipatif, egaliter/ demokratik dan terbuka.
 - Mendorong infrastruktur politik dan ORMAS dapat berperan aktif sebagai kekuatan yang mampu mendidik kesadaran dan kepekaan politik rakyat dan sekaligus dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah.
- e. Di lapangan sosial-budaya perlu kebijakan yang dapat memacu masyarakat untuk dapat memenuhi panggilan hidup sebagai warga negara yang memiliki aspirasi dan kepentingan yang makin beragam, sebagai realisasi dari upaya meningkatkan martabat hidup.

3. Permasalahan Umat Islam

Umat Islam di dunia dewasa ini mencapai 1.225 million, berarti lebih dari seperlima penduduk dunia yang jumlahnya 5.328 million. Dari jumlah umat Islam yang demikian besar itu tersebar di 47 negara, sebagian besar tinggal di Asia (sekitar 70%) dan di Afrika (sekitar 28%) yang berarti tinggal di negara-negara berkembang.

Umat Islam Indonesia yang berjumlah 168,4 juta jiwa dari total penduduk Indonesia

(183 juta) menempati urutan pertama dari tujuh negara Dunia Islam (Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Turki, Iran, dan Mesir) yang menampung lebih dari separo jumlah umat Islam dari 47 negara lainnya. Sebagai golongan mayoritas maka persoalan yang dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia hampir dapat diidentikkan sebagai masalah umat Islam pula. Melalui pembangunan selama ini tentu saja realitas umat Islam sekaligus menunjukkan adanya tanda-tanda ke arah kemajuan atau optimistik di satu pihak, tetapi tidak pula dapat dibantah bahwa melalui pembangunan ada pula umat Islam yang mengalami proses marginalisasi. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa seandainya umat Islam dapat memanfaatkan momentum pembangunan di masa mendatang, terbuka peluang bagi mereka untuk bersaing dengan umat beragama lainnya.

Secara spesifik persoalan pokok umat Islam di Indonesia berkisar di sekitar:

- a. masih tertinggalnya umat Islam terutama dalam bidang ekonomi dan politik di hampir berbagai level di tengah dominan kekuatan ekonomi dan politik non-Islami.
- b. Adanya gerakan “pemurtadan” dengan memanfaatkan kondisi kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam.
- c. Bagaimana meningkatkan partisipasi aktif di dalam pembangunan pada umumnya.
- d. Bagaimana mengaktualisasikan pembangunan yang berwawasan keindonesiaan tetapi sekaligus juga Islami, yakni kehidupan yang dilandasi dengan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai transedental-islami, sebagai salah satu concern utama (keprihatinan yang mendalam) dan sekaligus sebagai kepentingan yang harus direalisasikan di dalam praksis pembangunan.
- e. Bagaimana mengupayakan tumbuh suburnya iklim berfikir keagamaan sebagai prasyarat untuk teraktualisasinya nilai-nilai dan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Bagaimana menghidupsuburkan suasana kehidupan religius yang mengutamakan kebersamaan/kesetiakawanan sosial dalam segenap lingkungan masyarakat.
- g. Bagaimana menciptakan iklim beragama yang damai, terhindar dari perpecahan dan konflik, serta terbebas dari tindakan-tindakan ekstrem seperti kelompok-kelompok sempalan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan umat Islam.
- h. Bagaimana meningkatkan posisi umat Islam dalam persaingan memasuki lapangan kerja, termasuk di dalamnya memajukan pendidikan umat Islam serta ketrampilan profesional.
- i. Bagaimana mengaktifkan lembaga Islam yang sudah ada dan melakukan diversifikasi kelembagaan untuk mewadahi berbagai aspirasi dan kepentingan umat Islam yang makin beraneka ragam.

4. Permasalahan Muhammadiyah

Dalam memasuki usia ke-80, Muhammadiyah telah menunjukkan prestasi dan peranan yang cukup besar dalam pembaharuan kehidupan umat Islam khususnya maupun dalam pembinaan kehidupan bermasyarakat dan berbagai bangsa di Indonesia, sehingga Muhammadiyah dipandang sebagai gerakan Islam modern dan pembaharuan terbesar di dunia.

Keberhasilan Muhammadiyah antara lain dalam pembaharuan pemikiran Islam dengan mengembalikan pada sumbernya yang asli yakni Al-Quran dan Sunnah dan dengan mengembangkan ijtihad, sikap dan pemikiran yang apresiasif terhadap kemajuan, modernisasi pendidikan, modernisasi gerakan Islam melalui pengembangan manajemen dan organisasi modern, dan dalam meningkatkan kualitas hidup umat dan masyarakat

melalui gerakan Amal Usahanya di bidang pendidikan, kesejahteraan umat, pelayanan sosial, membangun sarana dan prasarana fisik, dan upaya-upaya dakwah lainnya baik yang bersifat *bi-lisanil-qaul* maupun *bi-lisanil-hal*.

Prestasi dan peran yang demikian besar itu menunjukkan bahwa arah dan misi gerakan Muhammadiyah adalah relevan dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi umat Islam sebagai perwujudan dari pemahaman dan pengamalan Islam. Sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Da'wah Muhammadiyah memiliki misi dan arah yang benar dan peluang yang cukup besar dalam menjawab tantangan dan permasalahan umat, masyarakat, dan bangsa di tengah kehidupan dunia modern dewasa ini bahkan untuk masa-masa mendatang, dengan terus memperbaharui langkah gerakannya sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Islam yang diyakininya.

Dalam lima tahun terakhir ini, sejak Muktamar ke-41, perkembangan Muhammadiyah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang lebih berarti yang dapat dijadikan dasar untuk dikembangkan lebih lanjut pada periode-periode mendatang. Di antara kemajuan-kemajuan yang berarti itu adalah:

- a. Dalam perjuangan dan cita-cita ditandai dengan semakin meningkatnya semangat dan tekad dari warga dan pimpinan Muhammadiyah di hampir seluruh tingkatan untuk membawa Muhammadiyah ke arah yang lebih maju, lebih baik, dan lebih berkualitas disertai langkah-langkah kongkrit guna mewujudkannya.
- b. Dalam pemikiran ditandai dengan semakin berkembangnya ide-ide, konsep-konsep, dan forum-forum kajian, dalam kuantitas dan kualitas yang jauh lebih meningkat, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan Muhammadiyah selain sebagai gerakan amal, juga gerakan pemikiran dan kebudayaan, sebagai perwujudan dari peran dan keberadaannya sebagai Gerakan Islam.
- c. Dalam Gerakan Amal Usaha ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) Amal Usaha Persyarikatan dengan kecenderungan adanya upaya-upaya serius untuk mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya.
- d. Dalam bidang organisasi ditandai dengan semakin meningkatnya upaya-upaya konsolidasi, selain makin meningkatnya pelaksanaan program Persyarikatan yang diwujudkan oleh Majelis/Badan/Lembaga dan Organisasi Otonomnya.
- e. Dari segi kepemimpinan, terutama di tingkat Majelis, keikutsertaan kaum intelektual dalam jumlah yang besar telah pula menambah semaraknya aktivitas pemikiran dalam segala kegiatan Muhammadiyah.
- f. Dalam pengembangan masyarakat, selain yang menjadi bidang garap Amal Usaha Muhammadiyah, ditandai dengan perintisan dan pengembangan program peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat bawah di pedesaan dan daerah suku terasing, masyarakat transmigrasi, dan sebagainya.
- g. Semakin maraknya aktivitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai salah satu basis bagi pengadaan sumberdaya manusia maupun bagi pengembangan pemikiran Islam sesuai dengan hakekat perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.
- h. Kemajuan-kemajuan lainnya seperti di bidang sarana dan prasarana fisik.

Apa yang dicapai selama lima tahun tersebut sebenarnya masih dapat ditingkatkan jika Muhammadiyah benar-benar memahami kekuatan dirinya dan memenej serta mengembangkan kekuatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan langkah gerakannya di masa depan. Kekuatan yang dimiliki Muhammadiyah yang dapat

dikembangkan lebih optimal tersebut antara lain:

- a. Umat Islam sebagai golongan mayoritas yang memiliki komitmen untuk menegakkan kehidupan yang sesuai dengan agama Islam.
- b. Faham dan pengamalan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai jiwa ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan (aqidah, ibadah, akhlaq, muamalat duniawiyah) yang merupakan kekuatan utama Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam.
- c. Muqaddimah Anggaran Dasar, Kepribadian, Khittah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, dan Sejarah Pergerakan Muhammadiyah merupakan prinsip perjuangan yang mengontrol dan memberikan ciri khas/identitas pergerakan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam.
- d. Anggota Muhammadiyah yang tersebar di hampir seluruh pelosok tanah air dengan jumlah, latar belakang sosial, pendidikan, profesi, dan jiwa serta semangat dakwah yang relatif dapat diandalkan serta kerelaan beramal dan berkorban merupakan sumber daya utama bagi terlaksananya usaha-usaha dan perwujudan tujuan Muhammadiyah.
- e. Tenaga-tenaga muda Muhammadiyah yang memiliki integritas dan wawasan serta profesi di berbagai bidang merupakan potensi penggerak Muhammadiyah.
- f. Pengalaman berorganisasi selama tiga perempat abad lebih yang merupakan modal berharga dalam menggerakkan dan mengamalkan Islam melalui wadah yang terorganisasikan berdasar prinsip-prinsip manajemen modern guna melangsungkan usaha Muhammadiyah di tengah tuntutan perkembangan zaman yang makin modern.
- g. Jumlah Amal Usaha Muhammadiyah berupa lembaga pendidikan (Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah lebih 12.000 buah dan Perguruan Tinggi 67 buah), Rumah Sakit dan Balai Kesehatan, Panti Asuhan, dan lain-lain merupakan potensi kongkrit Muhammadiyah yang dapat dikembangkan lebih lanjut baik kuantitas maupun kualitas.
- h. Hubungan yang baik dengan dan simpati dari berbagai pihak terhadap Muhammadiyah merupakan kekuatan sosial yang sangat mendukung dan dibutuhkan bagi keberhasilan usaha-usaha Muhammadiyah.
- i. Fasilitas, sarana, dan prasarana fisik yang dimiliki Muhammadiyah yang relatif memadai sebagai faktor pendukung yang mempermudah gerakan Muhammadiyah, meskipun masih perlu peningkatan baik kuantitas maupun kualitas pengelolaannya.

Namun di tengah-tengah kemajuan yang dicapai itu, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan, antara lain:

- a. Belum dikembangkannya secara optimal dan terprogram potensi dan usaha-usaha untuk menyusun konsep-konsep dan aplikasi Ad-Dinul Islami dalam berbagai aspeknya, yang dapat memperlemah hakekat Muhammadiyah sebagai gerakan pemikiran.
- b. Belum memasyarakatnya pemikiran-pemikiran perjuangan Muhammadiyah secara konsisten dan dinamis, sehingga banyak dijumpai pergerakan pemahaman tentang Muhammadiyah yang mempengaruhi sikap dan perilaku kehidupan ber-Muhammadiyah.
- c. Berbagai pemikiran yang berkembang tampak masih belum terintegrasi sebagai pemikiran Muhammadiyah, sehingga jika proses integrasi ini belum tercipta akan menimbulkan polarisasi pemikiran di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah.

- d. Berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki Muhammadiyah, seperti sumberdaya para intelektual dan praktisi, potensi kader dan angkatan muda Muhammadiyah dan potensi-potensi keahlian dari pimpinan dan warga Muhammadiyah, belum dikembangkan secara optimal dan terpadu.
- e. Belum dikembangkannya secara terprogram dan optimal sumber daya kader Muhammadiyah yang sebenarnya potensial, sebagai asset penggerak Muhammadiyah di masa depan.
- f. Berbagai potensi dana yang dimiliki Muhammadiyah terutama pada unit-unit Amal Usaha agar dikelola secara profesional sehingga menghasilkan dana yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Persyarikatan.
- g. Pengembangan kualitas Amal Usaha Muhammadiyah masih kalah cepat dibandingkan perkembangan kuantitas, di samping dalam batas tertentu perkembangan Amal Usaha tersebut sering kurang terkendali.
- h. Belum dikembangkannya manajemen yang bersifat gerakan yang mampu memadukan nilai/norma, misi dan cita-cita Muhammadiyah ke dalam aplikasi manajemen modern dengan ciri-cirinya antara lain: efisiensi, efektivitas, profesionalisme dan sebagainya baik secara operasional maupun secara strategis.
- i. Berkembangnya konflik-konflik internal dan interes-teres pribadi dalam kehidupan ber-Muhammadiyah dapat menjadi faktor penghambat bagi kelangsungan gerak Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya.
- j. Perbedaan visi para pimpinan tingkat Pusat dalam menghadapi berbagai masalah besar, sering menghambat pengambilan keputusan yang memerlukan kecepatan.
- k. Mulai munculnya gejala kemerosotan akhlaq kepemimpinan di kalangan Pimpinan Persyarikatan.
- l. Belum dikembangkannya secara terprogram dan optimal hubungan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan-kepentingan gerak Muhammadiyah yang bersifat strategis.
- m. Belum meratanya penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana fisik organisasi di seluruh tingkatan pimpinan Persyarikatan, selain masih dijumpainya praktek-praktek yang kurang mengoptimalkan fungsi dari fasilitas, sarana, dan prasarana tersebut di sementara tingkatan Persyarikatan untuk mendukung kepentingan-kepentingan yang memiliki nilai strategis di masa datang.

SISTEMATIKA

Program Muhammadiyah menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bagian Satu, memuat tentang **pendahuluan** yang berisi latar belakang permasalahan (di tingkat global, nasional, umat Islam, dan Muhammadiyah) dan sistematika naskah program Muhammadiyah.

Bagian Dua, memuat tentang **Dasar Kebijakan Program** yang memaparkan tentang tujuan, landasan, prinsip, dan sasaran kebijakan program Muhammadiyah secara umum, selain mengidentifikasikan kondisi Muhammadiyah dalam bentuk kekuatannya, kelemahannya, peluang dan hambatanannya.

Bagian Tiga, memuat tentang **Pokok Kebijakan Program Jangka Panjang** yang memaparkan arah, tahapan, dan sasaran kebijakan program selama 25 (duapuluh lima) tahun mendatang.

Bagian Empat, memuat tentang **Program Muhammadiyah periode 1990 - 1995** yang memaparkan tentang tujuan, prioritas, dan jenis program yang harus dilaksanakan

pada periode lima tahun tersebut.

Bagian Lima, **Penutup**, yang memaparkan tentang perlunya segenap kekuatan diarahkan bagi terlaksananya program Muhammadiyah.

Bagian Dua

DASAR KEBIJAKAN PROGRAM MUHAMMADIYAH

Program Muhammadiyah sebagai perwujudan dari pelaksanaan usaha Persyarikatan untuk mencapai tujuannya, hendaklah disusun berdasarkan tujuan, landasan, prinsip, sasaran, dan faktor-faktor yang melekat dengan keberadaan Muhammadiyah. Dengan demikian program yang disusun selain mengandung idealitas misi Persyarikatan, juga merupakan langkah yang operasional dan realistis dari gerak Muhammadiyah. Sehingga program yang disusun dan ditetapkan memiliki dasar yang kuat untuk mengantarkan Muhammadiyah pada tujuannya.

Tujuan

Tujuan program Muhammadiyah diarahkan pada tercapainya tujuan Persyarikatan, yaitu terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu Wata'ala.

Landasan

Program Muhammadiyah ini disusun dengan berlandaskan pada:

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah
2. Pancasila dan UUD 1945 serta perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
4. Prinsip-prinsip Pergerakan Muhammadiyah:
 - a. Tafsir Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
 - b. Kepribadian Muhammadiyah
 - c. Khittah Perjuangan Muhammadiyah
 - d. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah
 - e. Sejarah Perjuangan Muhammadiyah.

Prinsip

Program Muhammadiyah bersumber dan merupakan pelaksanaan dari Ajaran Islam yang melekat dengan keberadaan gerak Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Kemanusiaan dan Kerahmatan.

Program Muhammadiyah diperuntukkan bagi terciptanya kebaikan hidup manusia sesuai dengan esensi, harkat dan kualitasnya sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, untuk membawa dan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alam*)

2. Prinsip Keilmuan

Program Muhammadiyah merupakan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan cara kerja yang rasional (ilmiah) guna mencapai tujuannya.

3. Prinsip Hukum

Program Muhammadiyah dilaksanakan dengan selalu mempertimbangkan hukum-hukum yang berlaku.

4. Prinsip Hikmah

Program Muhammadiyah dilaksanakan dengan selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi secara bijaksana.

5. Prinsip Dakwah

Segala program Muhammadiyah merupakan pelaksanaan/realisasi ajaran Islam dengan pendekatan dakwah yang dijiwai dengan semangat kemurnian, keterbukaan, kritis dan inovatif.

6. Prinsip Keindonesiaan

Program Muhammadiyah merupakan upaya Muhammadiyah untuk mengisi pembangunan bangsa yang berdasarkan Pancasila sebagai perwujudan nyata dari peran Persyarikatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Prinsip Relevansi dan Prinsip Kontinuitas

Program Muhammadiyah dilaksanakan dengan senantiasa memper- timbangkan relevansi dengan permasalahan masyarakat dan umat yang ada, serta diupayakan ada kesinambungan antar satu tahapan dengan tahapan berikutnya.

Pelaksanaan program berdasar prinsip-prinsip di atas sejalan dan selalu didasarkan atas kesadaran bahwa umat Islam yang kokoh akan memperkuat landasan pembinaan dan pembangunan bangsa di masa depan.

Sasaran

1. Tercapainya tujuan Muhammadiyah secara terencana, terarah, dan berkesinambungan di berbagai bidang kehidupan sesuai gerak langkah Muhammadiyah.
2. Terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung dan kondusif bagi terwujudnya gerak dan langkah Muhammadiyah dalam melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan Persyarikatan.
3. Terciptanya gerak organisasi Muhammadiyah yang makin mantap, dinamik, meluas, dan berkualitas di seluruh tingkatan dalam mewujudkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan Persyarikatan dimaksud.
4. Terlaksananya Program Muhammadiyah semaksimal mungkin terutama program lima tahunan dalam rangka meletakkan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan program jangka panjang.

Bagian Tiga**POKOK KEBIJAKAN PROGRAM JANGKA PANJANG**

Agar gerak langkah Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya lebih terarah dan berkesinambungan, perlu disusun program jangka panjang dalam bentuk pokok-pokok kebijakan program. Pokok-pokok kebijakan program tersebut merupakan pedoman umum dan arah bagi gerakan Muhammadiyah selama 25 tahun mendatang.

Kebijakan program jangka panjang yang terarah dan berkesinambungan tersebut dilaksanakan melalui program lima tahunan secara bertahap dan berencana. Karena itu, pokok kebijakan program jangka panjang tersebut menjadi pola dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan program lima tahunan, dimulai dari periode Muktamar 1990-1995 sampai periode berikutnya selama 25 tahun mendatang.

Arah Kebijakan Program

1. Kebijakan program jangka panjang diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah secara bertahap, berencana, dan berkesinambungan. Dengan demikian kebijakan program jangka panjang Muhammadiyah tersebut diarahkan sebagai usaha terprogram dalam menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu Wata'ala.

2. Kebijakan program jangka panjang pertama ditetapkan selama 25 tahun yang dilaksanakan secara bertahap, berencana, dan berkesinambungan melalui program lima tahunan dimulai dari periode 1990-1995 sampai periode berikutnya selama 25 tahun, masing-masing tahapan memiliki sasaran –sasaran khusus dalam kerangka sasaran program jangka panjang.
3. Pelaksanaan program jangka panjang melalui program lima tahunan dimaksud mengandung prinsip keseimbangan antara pencapaian target dan proses, artinya harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Muhammadiyah di berbagai tingkatan, kemampuan dan potensi setempat; dan proses yang melingkupi pelaksanaan program itu sendiri sehingga tidak berorientasi pada pencapaian hasil semata-mata.

Tahapan Kebijakan Program

Pokok kebijakan program jangka panjang sebagai pedoman dan arah gerak Persyarikatan yang dilaksanakan secara bertahap melalui program lima tahunan selama 25 tahun. Adapun tahapan-tahapan program jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut.

Tahapan pertama, kebijakan program ditekankan pada pemantapan konsolidasi gerakan. Yaitu memantapkan gerak dan cita-cita Muhammadiyah sebagaimana telah dirintis dan dikembangkan selama ini.

Tahapan kedua, kebijakan program ditekankan pada peningkatan Konsolidasi Gerakan dan pemantapan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dengan memperluas sasaran dan jaringan prasarana dakwah.

Tahapan ketiga, kebijakan program ditekankan pada peningkatan Konsolidasi Gerakan dan peningkatan kualitas Gerakan Dakwah serta peranserta Muhammadiyah dalam Pembangunan Bangsa.

Tahapan keempat, kebijakan program ditekankan pada peningkatan Konsolidasi Gerakan dan kekuatannya Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Dakwah dalam berbagai bidang kehidupan umat, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tahapan kelima, kebijakan program ditekankan pada pemantapan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Dakwah dalam upaya mewujudkan tujuan Muhammadiyah.

Sasaran Kebijakan Program

Kebijakan program jangka panjang 25 tahun mendatang menetapkan sasaran program pada tiga bidang program umum yang akan dilaksanakan pada setiap periode sesuai dengan arah dan tahapannya. Bidang-bidang program dimaksud adalah bidang Konsolidasi Gerakan, bidang Pengkajian dan Pengembangan, serta bidang Kemasyarakatan dengan perincian dan sasaran sebagai berikut.

1. Bidang Konsolidasi dan Pengembangan Gerakan

- a. Program bidang Konsolidasi Gerakan terdiri atas program Konsolidasi Organisasi, Kaderisasi dan Pembinaan AMM, Bimbingan Keagamaan, serta Pembinaan Hubungan Organisasi.
- b. Sasaran program Konsolidasi Gerakan diarahkan pada terciptanya kekuatan gerak Muhammadiyah baik ke dalam maupun ke luar sebagai modal penggerak bagi pengembangan peran-peran Muhammadiyah baik di bidang pemikiran maupun gerak kemasyarakatan menuju pencapaian tujuan Muhammadiyah.

- c. Masing-masing program dari program bidang Konsolidasi Gerakan memiliki sasaran dan prioritas khusus yang penjabarannya tertuang dalam program lima tahunan.

Arah masing-masing program adalah:

1. Program Konsolidasi Organisasi diarahkan pada terciptanya struktur dan fungsi organisasi serta kepemimpinan dengan segenap Majelis, Badan, Lembaga, Ortom, dan Amal Usaha Muhammadiyah yang mantap dan mendukung gerakan Persyarikatan mencapai tujuannya.
2. Program Kaderisasi dan Pembinaan AMM diarahkan pada terciptanya kader-kader Muhammadiyah sebagai kader Persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa dalam upaya melangsungkan kepemimpinan dan pengembangan misi dan tujuan Muhammadiyah.
3. Program Bimbingan Kegamaan diarahkan pada terciptanya kualitas warga Persyarikatan dalam penghayatan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di bidang aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalah dunyawiyah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami Muhammadiyah dalam menghadapi kehidupan yang semakin modern.
4. Program Pembinaan Hubungan Organisasi diarahkan pada terciptanya hubungan dan kerjasama Muhammadiyah dengan berbagai pihak yang bersifat konstruktif dan strategis dalam kerangka dakwah Islam dan penciptaan tatanan kehidupan dunia yang lebih adil, damai, manusiawi, dan saling membangun sebagaimana misi Muhammadiyah.

2. Bidang Pengkajian dan Pengembangan

- a. Bidang Program Pengkajian dan Pengembangan terdiri atas program Pengkajian dan Pengembangan Pemikiran Hukum Islam, Penelitian dan Pengembangan (Litbang), serta Pusat Informasi, Kepustakaan dan Penerbitan.
- b. Sasaran program bidang Pengkajian dan Pengembangan diarahkan pada terciptanya gerak Persyarikatan sebagai gerakan pemikiran yang mampu mengembangkan, memasyarakatkan, dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran Islam kepada masyarakat di tingkat nasional bahkan internasional.
- c. Masing-masing program dari bidang Pengkajian dan Pengembangan memiliki sasaran dan prioritas khusus yang penjabarannya tertuang dalam program lima tahunan.

Arah masing-masing program adalah:

1. Program Pengkajian dan Pengembangan Pemikiran dan Hukum Islam diarahkan pada pengkajian Ajaran Islam, baik aspek hukum maupun berbagai aspek kehidupan lainnya secara menyeluruh untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran Islam dalam pemahaman dan pengamalannya menuju proses Islamisasi kehidupan.
2. Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) diarahkan pada usaha-usaha penelitian dalam berbagai masalah yang bersifat strategis dan menyangkut kepentingan umat dan masyarakat banyak (umum), antara lain Pusat Pengkajian Muqaranatul Adyan, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan aplikasi hasil penelitian sebagai media dakwah dan pengembangan misi Persyarikatan.
3. Program Pusat Informasi, Kepustakaan dan Penerbitan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat informasi, perpustakaan, dan usaha-usaha

penerbitan untuk meningkatkan peran Muhammadiyah di tengah perkembangan dunia dan perubahan sosial menuju kehidupan masyarakat modern sesuai misi Persyrikan.

3. Bidang Dakwah, Pendidikan dan Pembinaan Kesejahteraan Umat.

- a. Bidang program Dakwah, Pendidikan dan Pembinaan Kesejahteraan Umat terdiri atas program Penyiaran Islam, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan Pengembangan Masyarakat, Kebudayaan, Partisipasi Politik, Ekonomi dan Kewiraswastaan, Kepemudaan, Pembinaan Keluarga, Peningkatan Peran Wanita, Pembinaan Lingkungan Hidup, serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan Muhammadiyah.
- b. Sasaran program bidang Dakwah, Pendidikan, dan Pembinaan Kesejahteraan Umat diarahkan pada peningkatan kualitatif peran-peran Muhammadiyah sebagai gerakan kemasyarakatan yang berpengaruh langsung dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagai perwujudan dari amal usaha dan partisipasi aktif Muhammadiyah dalam pembangunan dan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai tujuan Muhammadiyah.
- c. Masing-masing program bidang Dakwah, Pendidikan, dan Pembinaan Kesejahteraan Umat memiliki sasaran dan prioritas khusus yang penjabarannya tertuang dalam program lima tahunan.

Arah masing-masing program adalah:

1. Program Penyiaran Islam diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas dakwah dalam segala dimensi kehidupan sesuai dengan prinsip gerakan Muhammadiyah.
2. Program Pendidikan diarahkan pada terlaksananya pendidikan Muhammadiyah sebagai sistem pendidikan Islam di tengah sistem pendidikan Nasional yang memiliki identitas dan integritas yang dapat diandalkan.
3. Program Kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan umat menuju sehat rohani dan jasmani sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional.
4. Program Sosial dan Pengembangan Masyarakat diarahkan pada terciptanya kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang lebih baik guna memberantas kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah dan atau pedesaan maupun perkotaan melalui berbagai program pembangunan/ pengembangan masyarakat yang dikembangkan Muhammadiyah.
5. Program Kebudayaan diarahkan pada pembangunan budaya umat Islam yang dapat memberikan kontribusi dalam membangun kebudayaan masyarakat dan bangsa Indonesia.
6. Program Partisipasi Politik diarahkan pada peningkatan peranan Muhammadiyah sesuai Khittah dan Kepribadiannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis dan partisipatif guna mendorong terwujudnya iklim politik partisipatif, sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
7. Program Ekonomi dan Kewiraswastaan diarahkan pada perbaikan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan ekonomi umat dan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan diilhami oleh semangat dan kesetiakawanan sosial sehingga terwujud pemerataan dan keadilan ekonomi.

8. Program Kepemudaan diarahkan pada terciptanya kehidupan generasi muda yang sanggup menjadi penerus kehidupan umat dan bangsa yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan berguna bagi kehidupan umat manusia.
9. Program Pembinaan Keluarga diarahkan pada terciptanya Keluarga Sejahtera/ Keluarga Sakinah yang akan menjadi sendi bagi masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu Wata'ala.
10. Program Peningkatan Peran Kaum Wanita diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat kaum wanita sesuai tuntunan Islam.
11. Program Pembinaan Lingkungan Hidup diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar sehingga umat manusia dapat memakmurkan bumi dengan segala isinya sebagai khalifah fil-Ardhi.
12. Program Peningkatan Khusus Sumberdaya Manusia diarahkan pada pembinaan kesadaran di kalangan warga Persyarikatan tentang arti pentingnya kualitas individu dalam berbagai aspeknya, dalam rangka menunaikan tugas kemasyarakatan seorang muslim (hablun minan-nas). Kualitas individu yang perlu ditingkatkan di kalangan warga Muhammadiyah ialah yang menyangkut kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan ketrampilan di berbagai aspek kehidupan.

Bagian Empat
PROGRAM MUHAMMADIYAH
PERIODE 1990 - 1995

Program Muhammadiyah periode 1990-1995 merupakan kelanjutan dan rangkaian dari program periode sebelumnya serta menjadi dasar bagi penyusunan program tahap berikutnya dalam rangkaian Kebijakan Program Jangka Panjang. Sebagaimana program hasil Mukhtamar-mukhtamar sebelumnya, program periode 1990-1995 dari Mukhtamar ke-42 di Yogyakarta ini, pada hakekatnya merupakan garis-garis besar haluan gerak Muhammadiyah sesuai tahapan dan sasarannya untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.

Program Muhammadiyah periode 1990-1995 terdiri dari berbagai bidang. Dalam pelaksanaannya ditempuh berdasarkan prinsip keseimbangan dalam menggarap bidang-bidang program sehingga dapat dihindari pengabaian program yang satu dari yang lainnya. Demikian halnya, pelaksanaan program tersebut juga harus berdasarkan prinsip keseimbangan antara pencapaian target dan proses sehingga tercipta kesinambungan dan fleksibilitas.

Untuk melaksanakan program periode 1990-1995 sebagaimana dimaksudkan itu, ditetapkanlah tujuan, prioritas, dan jenis program berikut ini:

Tujuan

Terciptanya gerak dan perkembangan Muhammadiyah yang makin kuat dan dinamik baik ke dalam maupun ke luar sebagai kelanjutan dari penataan perkembangan periode sebelumnya dan merupakan landasan yang kuat bagi kemajuan Persyarikatan tahap berikutnya dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Prioritas

Memantapkan Konsolidasi Gerakan yang meliputi Konsolidasi Organisasi, menggairahkan pemikiran keagamaan, Kaderisasi dan Pembinaan AMM, Bimbingan Keagamaan dan Pembinaan Hubungan Organisasi, yang mantap dan dinamik sebagai

modal penggerak dan landasan bagi perkembangan peran-peran Muhammadiyah baik dalam bidang pemikiran maupun gerak kemasyarakatan.

PROGRAM MUHAMMADIYAH 1990 – 1995

I. Bidang Konsolidasi Gerakan

A. Konsolidasi Organisasi

1. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan Islam bagi anggota dan pimpinan di seluruh tingkatan melalui kegiatan takhasus yang intensif di bawah bimbingan Majelis Tarjih dan majelis/badan yang terkait dalam rangka meningkatkan misi dan peran Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam.
2. Meningkatkan kualitas dan disiplin anggota dan pimpinan Persyarikatan, unit-unit yang ada di dalamnya di seluruh tingkatan melalui pemantapan integritas, disiplin, wawasan pemikiran, dan ketrampilan/skill melalui penataran / *upgrading*, kursus-kursus, Darul arqam, Baitul Arqam, refreshing (penyegaran), *job training* (latihan jabatan), pengajian-pengajian khusus, peningkatan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, dan lain-lain.
3. Meningkatkan tertib berorganisasi bagi anggota dan pimpinan Persyarikatan, Majelis, Badan, Organisasi Otonom, Lembaga, Amal Usaha, dan unit-unit yang ada di dalamnya di seluruh tingkatan seperti pendaftaran/pemilikan kartu tanda anggota (NBM), pengelolaan administrasi organisasi, pelaksanaan musyawarah-musyawarah, pelaksanaan tugas dan amanat organisasi, pelaksanaan keputusan-keputusan, dan lain-lain berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan/qaidah-qaidah organisasi yang berlaku.
4. Memantapkan dan meningkatkan potensi Cabang sebagai wadah dan alat pendayagunaan organisasi dan Amal Usaha yang dibawahinya serta memantapkan dan meningkatkan potensi Ranting sebagai wadah dan alat pembinaan anggota termasuk dalam membimbing kehidupan jamaah dan dakwah jamaah.
5. Meningkatkan koordinasi antar Majelis, Badan, Organisasi Otonom, Lembaga, Bagian yang ada di Persyarikatan baik dalam wawasan pemikiran maupun pelaksanaan program melalui rapat-rapat kerja dan forum-forum gabungan, sehingga tercipta keterpaduan dan kesatuan.
6. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan disiplin pimpinan dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan di berbagai tingkatan sehingga gerak Persyarikatan berjalan sebagaimana mestinya menuju pada kemajuan.
7. Menata dan menyempurnakan struktur organisasi dengan segenap unit-unitnya sehingga berfungsi efektif, efisien, dan mampu menampung serta mendukung seluruh gerak/program/aktivitas organisasi. Penataan itu antara lain meliputi:
 - a. Struktur Sekretariat perlu dilengkapi dengan biro umum, administrasi, kepegawaian, humas, dan lain-lain.
 - b. Penyusunan sistem administrasi organisasi yang terpadu, efisien, dan efektif, guna meningkatkan pengelolaan organisasi dan manajemen Persyarikatan.

- c. Menyederhanakan struktur-struktur organisasi seperti badan dan lembaga yang dipandang *overlapping* seperti antara Majelis Pustaka dengan Pusat Informasi dan Dokumentasi, Lembaga Dakwah Khusus dengan Pusat Pengembangan masyarakat, dan sejenisnya dengan jalan mengintegrasikan serta perlu menghindari penambahan struktur yang tidak terlalu mendesak untuk dibentuk.
8. Meningkatkan fungsi Organisasi Otonom ('Aisyiyah, Nasyiatul 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah) sebagai aktor pengembangan, efektivitas dan efisiensi, dinamika, dan kaderisasi yang terintegrasi dan mendapat tempat pengembangan yang terarah dan terencana oleh Pimpinan Persyarikatan sebagaimana ditegaskan dalam Qaidah Organisasi Otonom Muhammadiyah.
9. Mengintensifkan penggalan dana dari berbagai sumber termasuk dari iuran anggota dan potensi yang dimiliki Persyarikatan dan Amal Usaha, serta mengembangkan sistem pengelolaan dan pendayagunaan keuangan berdasar prinsip manajemen keuangan sehingga dapat mendukung secara sehat pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pendayagunaan keuangan organisasi perlu diperhatikan majelis, badan, lembaga, termasuk ortom, yang tidak memiliki Amal Usaha dan sumber dana.
10. Mefungsikan Badan Pengawas Keuangan sebagaimana telah dibentuk di lingkungan Persyarikatan sehingga pendayagunaan keuangan organisasi dapat dikontrol secara efektif dan efisien.
11. Memperluas bidang gerak Muhammadiyah di dalam seluruh sektor kehidupan agar dapat berpartisipasi dalam segala lapangan kehidupan masyarakat modern.

B. Kaderisasi dan Pembinaan AMM

1. Meningkatkan semangat kerja profesional di kalangan generasi muda untuk mengantisipasi kecenderungan profesionalisme di masa depan.
2. Melaksanakan program kaderisasi secara menyeluruh berdasarkan konsep Sistem Perkaderan Muhammadiyah dan Pedoman Pelaksanaan Perkaderan Muhammadiyah yang telah disusun pada periode 1990-1995 di bawah tanggungjawab dan koordinasi BPK di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah sebagaimana diatur oleh Qaidah Badan Pendidikan Kader Muhammadiyah sebagai upaya terarah dan berkesinambungan dalam mengembangkan Kader Muhammadiyah sebagai Kader Persyarikatan, Kader Umat, dan Kader Bangsa.
3. Meningkatkan kesamaan wawasan anggota pimpinan Persyarikatan tentang masalah pemikiran internal Muhammadiyah melalui Pengajian Ramadhan dan forum sejenis lainnya.
4. Mengembangkan pengkajian masalah kaderisasi terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya dan pimpinan dan melakukan langkah-langkah terprogram yang bersifat terpadu sebagai tindak lanjutnya.
5. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sekolah-sekolah Kader seperti Madrasah Mu'allimin/Mu'allimat, Pondok Hajjah Nuriyah Sobron, Pondok-pondok Pesantren Darul Arqam (Garut, Gombara, Sipirok, Paciran, dan lain-lain) yang lebih berkualitas dan diproyeksikan bagi pengadaan kader-kader ulama Muhammadiyah.

6. Meningkatkan pengadaan dan pendayagunaan fasilitas, prasarana, sarana, dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kaderisasi dalam berbagai aspeknya sehingga tujuan perkaderan Muhammadiyah dapat tercapai.
 7. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kader Angkatan Muda Muhammadiyah (IPM, IMM, NA, Pemuda Muhammadiyah) sebagai pelopor, pelangsur, dan penyempurna Amal Usaha Muhammadiyah dan dalam melanjutkan kepemimpinan Muhammadiyah melalui pembinaan kaderisasi dan upaya-upaya terarah serta memberi peluang yang baik untuk mengembangkan komitmen, wawasan pemikiran, dan kemampuan mereka.
 8. Mempersiapkan dan memanfaatkan aktivis-aktivis AMM dalam recruitment pimpinan di lingkungan Persyarikatan dan dalam mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah guna melangsungkan misi Muhammadiyah dengan disertai pembinaan disiplin, integritas perjuangan, kemampuan profesi dan wawasan pemikiran sesuai dengan bidang yang diembannya.
 9. Meningkatkan hubungan yang integral antar organisasi otonom AMM dan meningkatkan hubungan yang dialogis dan demokratis antara Ortom AMM dengan Pimpinan Persyarikatan dalam rangka memperluas dan memperkuat gerak Muhammadiyah secara menyeluruh.
 10. Meningkatkan pengembangan sumberdaya kader AMM yang bersifat strategis seperti melalui pengembangan prestasi studi/akademis di dalam negeri maupun luar negeri melalui usaha sendiri maupun kerjasama yang memungkinkan dalam rangka mengembangkan kualitas kader Muhammadiyah sebagai Kader Persyarikatan, Kader Umat, dan Kader Bangsa.
 11. Mengembangkan pemahaman misi dan cita-cita Muhammadiyah di segenap lingkungan Persyarikatan melalui berbagai forum dan media sehingga tercipta kesamaan semangat, pola pemikiran, dan sikap dalam bermuhammadiyah sesuai dengan Kepribadian, Khittah, keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah mencapai tujuannya yang diproyeksikan bagi pengembangan langkah Persyarikatan sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Dakwah yang lebih maju dan antisipatif terhadap kemajuan dengan tetap berpijak pada kepribadian yang melekat dalam diri Muhammadiyah selama ini.
- C. Bimbingan Keagamaan**
1. Meningkatkan pembinaan aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalah di kalangan warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya berdasar tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dengan meningkatkan dan mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan prinsip-prinsip dan metode dakwah yang dikembangkan Muhammadiyah, sehingga ajaran Islam benar-benar dihayati, difahami, dan diamalkan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Dalam hal pembinaan tersebut di samping pembinaan kesadaran keimanan dan kesadaran bermu'amalah, perlu diintensifkan pembinaan yang berorientasi pada pengayaan spiritual dan kecerdasan intelektual mengingat permasalahan intern Muhammadiyah maupun umat Islam di tengah perubahan sosial dan kehidupan masyarakat yang makin modern menuntut hal yang demikian.
 2. Secara khusus perlu ditingkatkan pembinaan umat dari penyimpangan aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalah yang tidak sejalan dengan Al-Quran

dan As-Sunnah seperti paham-paham yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, praktek-praktek takhayul, bid'ah, khurafat, dan pendangkalan pelaksanaan Ajaran Islam dalam berbagai bentuk dan kecenderungannya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dakwah.

3. Pembinaan warga Muhammadiyah maupun umat Islam seperti dimaksudkan tadi dapat dikembangkan melalui pengajian-pengajian khusus (takhasus), ceramah-ceramah di berbagai media dan forum, pembinaan secara langsung dan melalui keteladanan, maupun melalui Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah secara lebih intensif, terprogram dan berkualitas.
4. Memasyarakatkan dan membimbingkan pelaksanaan hasil Putusan Tarjih disertai tuntunan-tuntunan Islam lainnya guna meningkatkan pemahaman dan pengamalan yang benar seperti dalam ibadah shalat, shalat jum'at, puasa, zakat, haji, mengurus janazah, adab al-mar'ah fi al-Islam, pembagian waris, infaq dan shadaqah, pernikahan, hidup berumahtangga, hidup bertetangga dan bermasyarakat, dan praktek-praktek pelaksanaan Ajaran Islam.
5. Menggiatkan aktivitas membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran.

D. Peningkatan Hubungan dan Kerjasama

1. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan misi Muhammadiyah dan dalam meningkatkan peranan Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui berbagai saluran baik formal maupun informal sesuai Khittah dan Kepribadian Muhammadiyah. Perlu dikembangkan pula secara khusus hubungan dan kerjasama dengan Pemerintah dalam memecahkan permasalahan umat, masyarakat dan bangsa, seperti memecahkan masalah kemiskinan, pendidikan, ketenaga-kerjaan, dan masalah-masalah sosial lainnya.
2. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga Islam lain dalam menciptakan ukhuwah dan melaksanakan Dakwah Islam Amar makruf nahi munkar melalui berbagai forum dan jaringan guna meningkatkan kualitas dan memecahkan permasalahan umat Islam dan meningkatkan peranannya dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara baik di tingkat internasional maupun nasional. Dalam hubungan kerjasama dimaksud perlu lebih dikembangkan pola yang mengarah pada pengembangan sumberdaya umat, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan perekonomian dan pendidikan, dan peningkatan kualitas dan peran-peran ummat Islam lainnya di berbagai bidang kehidupan.
3. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam mensukseskan atau melakukan rintisan program Muhammadiyah terutama dalam pengembangan pendidikan, perekonomian, kebudayaan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan program-program strategis lainnya untuk meningkatkan kualitas umat, masyarakat, dan bangsa yang menjadi bidang garap Muhammadiyah.

II. Bidang Pengkajian Dan Pengembangan

A. Pengkajian Dan Pengembangan Pemikiran Islam

1. Menyelesaikan penyusunan konsep ad-Dinul-Islam dengan materi dan pendekatan yang menyeluruh (komprehensif) sebagai bahan acuan pokok dalam pengkajian dan pengembangan pemikiran tentang Ajaran Islam.
2. Mensistematisasi dan menyempurnakan (bila dipandang perlu) konsepsi tentang Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Gerakan Dakwah, Gerakan Tajdid, dalam satu kesatuan sistem dan konsep yang menyatu dengan pemikiran-pemikiran dasar Muhammadiyah seperti: Masalah Lima, Langkah Duabelas Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar, Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Matan keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, sehingga dapat menggambarkan tentang Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam baik dalam pemikiran maupun pengamalannya.
3. Mengkaji tema-tema dan isu-isu yang berkembang tentang pemikiran Islam dalam berbagai aspeknya dan masalah-masalah mendasar dan strategis dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional sehingga Muhammadiyah memiliki sikap dan pandangannya yang jelas dan benar.
4. Dalam program pengkajian dan pengembangan pemikiran Islam dimaksud Majelis Tarjih seyogyanya lebih meningkatkan fungsinya untuk mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraannya dengan melibatkan majelis/badan/lembaga yang terkait di lingkungan Persyarikatan dan menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga Islam maupun para cendekiawan Muslim serta lembaga luar yang terkait dengan kepentingan program tersebut. Bentuk forum pengkajian dan pengembangannya harus lebih terprogram, baik melalui musyawarah, seminar, sarsehan, maupun pusat kajian dan pengembangan.

B. Penelitian Dan Pengembangan (Litbang)

1. Sesuai dengan jiwa dan semangat Islam, meningkatkan spesialisasi dalam penggalan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara aktif, kreatif dan inovatif.
2. Melaksanakan berbagai penelitian yang menyangkut masalah-masalah mendasar dan strategis maupun masalah-masalah aktual dan terapan yang berkenaan dengan kehidupan umat Islam, perkembangan Muhammadiyah, dan perkembangan masyarakat dan pembangunan dalam berbagai aspeknya disertai upaya-upaya pengembangan dari hasil-hasil penelitian tersebut untuk berbagai kepentingan dalam kaitan gerak Muhammadiyah di berbagai aspek dan lingkungan.
3. Melaksanakan program penelitian dan pengembangan dimaksud, selain upaya-upaya langsung oleh lembaga yang bertanggungjawab (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan), perlu mefungsikan lembaga-lembaga Litbang di PTM-PTM secara terkoordinasi dan terencana.

C. Pusat Informasi, Kepustakaan, dan Penerbitan

1. Mengusahakan terwujudnya perpustakaan yang representatif di Pusat dan Wilayah-Wilayah dan mengembangkan perpustakaan yang memadai di Daerah-Daerah, guna meningkatkan dan menciptakan iklim yang mendukung bagi gerakan ilmu dan pemikiran dalam Muhammadiyah.

2. Mengusahakan pengumpulan bahan-bahan, dokumen-dokumen, majalah-majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan berbagai bahan yang diterbitkan lainnya terutama tentang Muhammadiyah, di samping tentang umat Islam, dan lain-lainnya yang tersebar di berbagai terbitan maupun hasil-hasil seminar, saresahan, lokakarya, disertasi, tesis, dan hasil-hasil kajian serta penerbitan lainnya.
3. Mengadakan/meningkatkan pusat informasi dan dokumentasi yang terkait dan terpadu dengan pengelolaan perpustakaan dan penerbitan.
4. Meningkatkan aktivitas penerbitan secara profesional seperti surat kabar, majalah, jurnal, buku-buku, siaran radio, termasuk mengelola secara profesional perusahaan penerbitan milik Muhammadiyah.

III. Bidang Dakwah, Pendidikan, dan Pembinaan Kesejahteraan Umat.

A. Penyiaran Islam

1. Meningkatkan penyiaran Islam (Tabligh) baik kuantitas maupun kualitas melalui berbagai saluran media (media massa cetak, maupun media elektronik) kepada berbagai lingkungan sosial masyarakat seperti melalui penyiaran langsung (tatap muka), melalui surat kabar, majalah, jurnal, buku-buku, melalui radio dan kaset-kaset dakwah, pemanfaatan program televisi (ceramah, fragmen/drama, dan sebagainya), memproduksi slide dan film dakwah, dan saluran-saluran lainnya yang sasaran maupun pengaruhnya diharapkan meluas ke masyarakat.
2. Dalam melaksanakan penyiaran Islam (Tabligh) tersebut secara khusus perlu dikembangkan/ditingkatkan pelaksanaan tabligh/ dakwah di pusat-pusat keramaian (seperti bioskop dan tempat-tempat hiburan, pusat perbelanjaan, pasar-pasar, terminal, stasiun, airport, dan sebagainya), tempat-tempat rekreasi/pariwisata, hotel-hotel/penginapan-penginapan, sekolah-sekolah/kampus-kampus, dan berbagai tempat atau pusat kegiatan massal lainnya dengan materi dan media yang tepat sesuai sasarannya.
3. Meningkatkan program penyiaran Islam di daerah pedesaan secara terencana dan terkait dengan program dakwah secara menyeluruh sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan masyarakat desa setempat yang kini sedang mengalami perubahan sosial akibat modernisasi dan pembangunan.
4. Meningkatkan dakwah amar makruf nahi munkar terhadap kecenderungan berbagai penyimpangan moral di masyarakat seperti tindak kriminalitas, seperti: pencurian, pembunuhan, bunuh diri, pelacuran, hubungan tanpa nikah, perjudian, kenakalan remaja, dan sejenisnya, dalam hal ini perlu ditingkatkan kontrol sosial terhadap film-film, surat kabar-surat kabar, majalah-majalah, buku-buku, dan media massa cetak maupun elektronik yang menampilkan hal-hal porno dan sadis, di samping kontrol sosial terhadap berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang merugikan masa depan umat, masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, dan sejenisnya, di samping melalui saluran dan media lain, yang khusus berisi kupasan-kupasan bagaimana menghadapi dan memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari seperti hidup berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, maupun masalah-masalah pribadi dengan pesan-pesan Islam dengan pendekatan yang lebih

humanistik dan kaya akan nuansa sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Pendekatan yang demikian sangat tepat dalam masyarakat Indonesia yang kini tengah mengalami proses perubahan yang cepat dan menyeluruh dengan pengaruh kehidupan modern yang semakin kuat.

6. Meningkatkan fungsi masjid, mushalla, dan sarana-sarana dakwah lainnya sebagai pusat kegiatan penyiaran Islam secara terprogram dan terkoordinasi.
7. Meningkatkan pembinaan muballigh/da'i Muhammadiyah yang memiliki semangat, integritas, wawasan pemikiran, dan berkemampuan/keahlian tinggi untuk melaksanakan dakwah Islam, baik dakwah bi-lisanil-qaul maupun dakwah bi-lisanil-hal bagi segenap lapisan masyarakat di perkotaan dan pedesaan bahkan di daerah pedalaman/suku terasing melalui program pelatihan-pelatihan.
8. Melaksanakan dan meningkatkan Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah dengan melakukan program-program rintisan sesuai tuntunan yang berlaku.
9. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut.

B. Pendidikan

1. Meningkatkan mutu (kualitas) pendidikan Muhammadiyah dari tingkat taman kanak-kanak (*Bustanul Athfal*) sampai perguruan tinggi dalam keseluruhan aspeknya yang mengarah pada terciptanya tujuan pendidikan Muhammadiyah, sehingga dapat mengimbangi dan mengisi perkembangan jumlah (kuantitas) yang selama ini terus berkembang pesat.
2. Dalam peningkatan mutu pendidikan Muhammadiyah dimaksud perlu dikembangkan inovasi-inovasi baru dan peningkatan fungsi sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi sehingga pendidikan Muhammadiyah dapat menjadi salah satu pusat perubahan sosial dan modernisasi di tengah-tengah masyarakat yang makin maju sesuai misi Muhammadiyah.
3. Menggalakkan aktivitas pemasyarakatan tulisan dan bahasa Arab di lingkungan keluarga dan masyarakat, di samping yang terkait dengan kurikulum pendidikan Muhammadiyah.
4. Sebagai bagian (sub sistem) dari sistem pendidikan Nasional, pendidikan Muhammadiyah sebagaimana pendidikan yang dikelola oleh swasta lainnya mempunyai peluang untuk mengembangkan ciri khasnya. Oleh karena itu setiap pimpinan/penyelenggara pendidikan Muhammadiyah harus mempunyai kesungguhan dan kemampuan untuk mengembangkan ciri khas itu sehingga pendidikan Muhammadiyah makin mendekati pada pencapaian tujuannya, antara lain dengan meningkatkan mutu pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, pembinaan siswa/mahasiswa melalui IPM dan IMM, pengembangan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di PTM yang terpadu dengan misi dakwah Muhammadiyah, busana muslim bagi pendidik/pengajar/karyawan, dan lain-lain.
5. Sesuai dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah terutama dalam pelaksanaan/penyelenggaraannya harus lebih menyeimbangkan antara pembinaan/pengembangan aspek intelektual dan kecakapan dengan pembinaan/pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam misi pendidikan Muhammadiyah. Hal demikian sejalan

- dengan tujuan pendidikan Nasional maupun tujuan pembangunan nasional.
6. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengembangan IPM dan IMM di lingkungan pendidikan Muhammadiyah sebagai wahana pendidikan kader Muhammadiyah.
 7. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut.

C. Kesehatan

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan cara mendirikan Balai Pengobatan (BP), BKIA, RB, RSB dan RS. Dengan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut Muhammadiyah ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tenaga Kesehatan, dengan jalan mendirikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), Program Pendidikan Bidan, Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Perawat (AKPER), Akademi Gizi (AKZI), sebagai bukti bahwa Muhammadiyah ikut berperan dalam memproduksi tenaga professional paramedik, yang bukan hanya terampil tetapi juga bersikap dan berakhlak Islami.
3. Menyelenggarakan Program Pembinaan Kesehatan Umat (Binkesmas), dengan wujud kegiatan berupa penyuluhan kesehatan, kesehatan lingkungan, sanitasi, home nursing, dan sebagainya. Dengan kegiatan tersebut Muhammadiyah memberikan peranannya dalam program Kesehatan Masyarakat, sekaligus dakwah dan syiar Islam, khususnya dalam kebersihan rumah dan lingkungan yang berdampak meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Ketiga aspek program kesehatan tersebut sebenarnya telah lama berkembang di beberapa Wilayah dan Daerah, namun keberadaannya perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan/ hajat hidup manusia terus menerus sepanjang zaman.
5. Kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah agar pihak swasta berpartisipasi semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, merupakan peluang bagi Muhammadiyah untuk dapat meningkatkan peranannya yang selama ini telah dibuktikan secara nyata dan diakui.
6. Untuk dapat menampung dan mengembangkan program Bidang Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana keberadaan fasilitas dan sarana pendidikan yang juga telah merata hampir di setiap Daerah dan Cabang, maka perlu segera dibentuk dan diwujudkan Majelis Kesehatan dalam Muhammadiyah.
7. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut.

D. Sosial dan Pengembangan Masyarakat

1. Meningkatkan usaha-usaha sosial dan pengembangan masyarakat dalam berbagai aspeknya seperti bagi mereka yang cacat fisik maupun mental dan sosial, para petani, buruh, nelayan, kelompok-kelompok informal di perkotaan, masyarakat suku terasing (masyarakat yang sedang dibina), masyarakat transmigrasi, dan lapisan masyarakat lainnya yang tergolong kaum dhuafa, fuqara, dan masakin, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pengembangan program dapat melalui kerjasama dengan Pemerintah dan instansi-instansinya yang terkait, dengan lembaga-lembaga pengembangan

swadaya masyarakat (LSM-LSM), dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang terkait dengan usaha-usaha pengembangan masyarakat, di samping mengembangkan program tersendiri seperti melalui program Kesejahteraan Umat (PKU), Dakwah Khusus, dan usaha-usaha pengembangan masyarakat sejenis.

2. Bidang yang dikembangkan dalam program pengembangan masyarakat antara lain: kesehatan, ekonomi, pendidikan, kerumahtanggaan, kependudukan, lingkungan sosial dan fisik, kesadaran hukum, kewanitaian, dan bidang-bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan potensi setempat.
3. Meningkatkan kepedulian dan usaha-usaha pelayanan dan penyantunan bagi kelompok masyarakat yang cacat baik fisik maupun sosial dan yang mengalami bencana alam.
4. Mengadakan usaha-usaha pelatihan untuk kader motivator dan fasilitator pengembangan masyarakat untuk berbagai kepentingan di atas, dengan mengembangkan model-model baru yang bersifat partisipatif dan tepat-guna yang mampu mengembangkan sasaran (dalam hal ini masyarakat yang dibina), sesuai misi Muhammadiyah.
5. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut.
6. Merintis dan menyelenggarakan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan Dana Santunan Sosial Warga Muhammadiyah dalam berbagai bentuk.

E. Kebudayaan

1. Meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah sosial budaya seperti kesenian, perkembangan dan perubahan budaya masyarakat, termasuk budaya tradisional, gaya hidup masyarakat, kepariwisataan, olahraga, dan aspek-aspek sosial budaya lainnya yang mempengaruhi perkembangan masyarakat, disertai upaya-upaya pengembangan khazanah budaya Islam, sehingga kehadiran Muhammadiyah mampu memberikan supremasi kebudayaan di tengah perbenturan budaya-budaya dunia dewasa ini.
2. Mengembangkan seni budaya profetik dan religius yang mampu mendorong dan membangkitkan fitrah kemanusiaan dan mendekatkan manusia kepada Allah dengan simbol-simbol yang mudah diterima masyarakat dalam kerangka dakwah Islam.
3. Memberi panduan terhadap gaya hidup masyarakat yang makin modern dengan kecenderungannya yang pragmatis, konsumtif, materialistis, dan hedonistik, dengan pendekatan dan menggunakan simbol-simbol budaya alternatif dalam kerangka gerakan kebudayaan sesuai ajaran Islam.
4. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut.

F. Partisipasi Politik

1. Meningkatkan kesadaran, wawasan, dan partisipasi warga Muhammadiyah khususnya, umat dan warga masyarakat umumnya, dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju kehidupan yang demokratis.
2. Meningkatkan peran dan partisipasi politik Muhammadiyah dalam kerangka

dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui berbagai saluran yang dipandang efektif dan strategis, sesuai dengan Kepribadian dan Khittah Muhammadiyah.

3. Sebagai bagian dari pelaksanaan peran dan partisipasi politik di atas, dalam rangka Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar sesuai Kepribadian dan Khittah, Muhammadiyah perlu meningkatkan fungsi kontrol sosial, pembelaan kepada warga negara yang mempunyai masalah dan mengalami hambatan/kesulitan dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya terutama rakyat kecil/kaum lemah, menciptakan pendapat umum (*public opinion*) yang menyangkut isu-isu besar dan strategis, dan peran-peran lainnya yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut.

G. Ekonomi dan Kewiraswastaan

1. Mengembangkan perekonomian rakyat kecil/masyarakat lapisan bawah di pedesaan dan perkotaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka ke tingkat yang lebih baik seperti melalui usaha bersama/koperasi, usaha rumah tangga, peternakan, usaha tani produktif, pengembangan sektor informal, dan usaha lainnya. Dalam pelaksanaan program ini ditempuh melalui kerjasama dengan lembaga yang terkait, di samping mengembangkan usaha swadaya.
2. Meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam menciptakan sistem perekonomian nasional yang adil dan merata sebagaimana yang menjadi prinsip Demokrasi Ekonomi berdasarkan Pancasila, guna menghilangkan atau mengurangi seoptimal mungkin kesenjangan sosial ekonomi, terangkatnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat kecil, hilangnya eksploitasi dan monopoli dan praktek-praktek ekonomi lainnya yang merugikan hajat hidup orang banyak.
3. Meningkatkan etos kerja dan kesadaran berwiraswasta di kalangan masyarakat khususnya warga Muhammadiyah dan umat Islam, serta ikut mengembangkan iklim yang sehat bagi terciptanya kemandirian umat dalam perekonomian.
4. Mendorong dan ikut menciptakan iklim serta memanfaatkan para pengusaha Muhammadiyah maupun pengusaha muslim lainnya dalam menggarap sektor-sektor perekonomian modern dalam rangka membangun perekonomian umat Islam yang tangguh di masa datang.
5. Ikut berpartisipasi dalam menanggulangi pengangguran antara lain dengan mendirikan lembaga-lembaga balai latihan kerja yang dikelola sendiri maupun bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja melalui BLK-BLK setempat, di samping mengembangkan kursus-kursus ketrampilan lainnya.
6. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut.

H. Pengembangan Generasi Muda

1. Berpartisipasi aktif dalam pembinaan generasi muda Indonesia terutama dalam pengembangan kepeloporan dan kemandirian pemuda dalam berbagai aspek kehidupannya sebagai asset sumberdaya manusia yang potensial di masa depan.

2. Berpartisipasi aktif dan ikut mengembangkan alternatif kegiatan bagi generasi muda di lingkungan kampus terutama dalam upaya pengembangan kader intelektual muslim di masa datang.
3. Berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah pendidikan dan pengangguran di kalangan generasi muda, terutama di pedesaan, melalui program pengembangan masyarakat, program ekonomi dan kewiraswastaan, dan pendidikan informal.
4. Mengembangkan Angkatan Muda Muhammadiyah khususnya dan generasi muda Islam umumnya sebagai kader umat dan kader bangsa yang memiliki akhlaq yang tinggi, integritas dalam perjuangan Islam, wawasan yang luas, dan kemampuan yang dapat diandalkan dalam menghadapi perkembangan zaman modern.
5. Berpartisipasi aktif dalam menanggulangi penyimpangan sosial di kalangan generasi muda, seperti tindak kriminalitas, penyalahgunaan narkotik, dan merusakkan akhlaq lainnya, melalui jalur pendidikan, tabligh, dan usaha lainnya.
6. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut.

I. Pembinaan Keluarga

1. Mengembangkan pembinaan Keluarga Sejahtera/Keluarga Sakinah melalui berbagai program dan kegiatan di segenap lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan usaha-usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk demoralisasi di kalangan keluarga/rumah tangga melalui pembinaan akhlaq, pendidikan keluarga, dan lain-lain.
3. Mengintensifkan pembinaan anak-anak di keluarga melalui berbagai program dan media, untuk menyelamatkan mereka dari demoralisasi, keretakan keluarga dan bentuk-bentuk keterlantaran lainnya, dan dalam upaya menjadikan anak-anak shaleh di masa datang.
4. Memberikan tuntunan-tuntunan praktis dan pedoman kerumahtanggaan baik yang berisi pesan aqidah, akhlaq, ibadah, maupun dalam pengurusan kerumahtanggaan.
5. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut.

J. Pengembangan Peranan Wanita

1. Meningkatkan pemasyarakatan dan pembinaan/bimbingan Adabul Mar'ah fil Islam dan konsepsi Islam dalam rangka mendudukkan status dan peran kaum wanita sesuai ajaran Islam.
2. Berpartisipasi dalam meningkatkan peranan wanita Islam dalam pembangunan dan meningkatkan program pembinaan kaum wanita melalui program 'Aisyiyah dan Nasuiatul 'Aisyiyah baik yang bersifat khusus/mandiri maupun yang terkait dengan pembinaan rumah tangga dan anak.
3. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut.

K. Lingkungan Hidup

1. Berpartisipasi dalam pengembangan usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan alam dari berbagai pencemaran dan pengrusakan.

2. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan usaha-usaha pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kesadaran dan usaha-usaha penciptaan lingkungan yang sehat dan bersih khususnya di kalangan warga Muhammadiyah dan umat Islam sesuai ajaran Islam yang sangat menaruh perhatian terhadap kesehatan, sehingga tercipta tradisi hidup sehat di lingkungan yang juga sehat.
4. Menumbuhkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut.

L. Peningkatan Kualitas Sumber Daya

1. Meningkatkan kesadaran di kalangan warga Persyarikatan tentang arti pentingnya kualitas individu muslim dalam rangka berkompetisi dengan sesama warga masyarakat yang lain dalam rangka menunaikan tugas-tugas kemasyarakatan seorang muslim. Penguasaan manajemen, teknologi, dan ketrampilan, merupakan tiga hal yang harus dikuasai umat Islam dalam rangka peningkatan kualitas tersebut.
2. Merintis penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kepelatihan, pendidikan vokasional dan pendidikan non-formal yang lain dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen, teknologi, dan ketrampilan warga Muhammadiyah.
3. Mendorong dan mengikutsertakan warga Muhammadiyah dalam kegiatan-kegiatan sejenis yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain.

Bagian Lima

PENUTUP

Program Muhammadiyah sebagai realisasi dari pelaksanaan usaha-usaha Muhammadiyah untuk mewujudkan tujuannya, sangat menentukan gerak langkah dan keberadaan Muhammadiyah baik kini maupun di masa depan. Apalagi ketika Muhammadiyah tengah menghadapi gelombang perubahan sosial di seluruh bidang kehidupan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat modern, baik di tingkat global, regional, maupun nasional dan lokal pada akhir abad ke-20 dan memasuki awal abad ke-21 nanti.

Karena itu segenap kekuatan, baik kekuatan sumberdaya manusia, kekuatan semangat, tekad, pemikiran, maupun fisik material, secara individual maupun kolektif seyogyanya dihipunkan dan disatupadukan untuk mewujudkan pelaksanaan program dimaksud.

Insha Allah dengan kekuatan seperti itu Muhammadiyah akan mencapai tujuannya.

Nashrun minallah wa fat-hun qarib.

Lampiran 2**STRATEGI DAKWAH PERSYARIKATAN**

Bismillahirrahmanirrahim

PENDAHULUAN

Salah satu sisi strategis Muktamar Muhammadiyah ke-42 adalah ketepatan waktunya dengan persiapan bangsa Indonesia menyongsong era tinggal landas dan persiapan umat manusia memasuki abad 21. Berbagai upaya persiapan untuk memasuki era tersebut perlu dilakukan, termasuk tindakan antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan negatif yang terjadi sebagai akibat ikutan kemajuan tersebut.

Berbagai kecenderungan kehidupan yang tengah dan akan terjadi pada masyarakat yang makin maju ialah kehidupan makin individualistik, gaya kehidupan yang sangat konsumtif, hedonis, dan materialistik. Memudarnya nilai-nilai agama dan moral masyarakat menjadi makin nyata terjadi bersamaan dengan kehidupan yang makin rasionalistik, yang meletakkan pertimbangan akal di atas segalanya. Masalah surga dan neraka sekarang cenderung dianggap sebagai dongeng belaka. Rumahtangga sebagai embrio masyarakat untuk melahirkan generasi yang shalih menjadi berantakan karena kesibukan orang tua yang larut dalam gaya hidup moderen. Upaya membangun keluarga sakinah terkena polusi prinsip-prinsip baru yang sangat bertolak belakang. Demikian pula ekologi menjadi semakin rusak karena eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan nilai-nilai wahyu.

Namun di samping perubahan yang mencemaskan tersebut di atas, beberapa tahun belakangan ini terlihat adanya kecenderungan meningkatnya minat dan semaraknya kehidupan beragama di mana-mana. Fitrah manusia sendiri memang mendorong terjadinya rindu pada Tuhan, tatkala manusia tidak terpuaskan dengan kehidupan yang serba benda. Faktor lain adalah adanya upaya aktif para pimpinan agama untuk membawa umat beradaptasi secara kritis dengan perubahan masyarakat dan menjawab tantangan yang ada dengan tetap meletakkan dakwah sebagai salah satu gerakan yang sentral.

Selanjutnya dalam mengatur strategi dakwah pada era informasi dan industrialisasi pada situasi dan kondisi tersebut di atas, maka Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta memperkokoh kembali hasil-hasil keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1987 di Yogyakarta bidang Dakwah, yaitu rumusan Strategi Dakwah Muhammadiyah dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan dengan sistematika sebagai berikut.

I. PERMASALAHAN DAKWAH

Berdasarkan analisis terhadap perkembangan masyarakat Indonesia selama ini, sebagai sasaran dakwah Islamiyah, maka dirumuskan ada tiga kelompok permasalahan yang harus dihadapi dakwah Muhammadiyah, yaitu: masalah utama, masalah yang bersifat umum, dan masalah yang bersifat khusus.

1. Masalah Utama

Adanya proses pendangkalan akidah (de-islamisasi) dan pemurtadan (proselitisasi), yang didahului atau dibarengi proses pendangkalan akhlaq (demoralisasi) sebagai akibat dari:

- (a) proses pasif, dampak perkembangan masyarakat;
- (b) proses aktif, dari kegiatan sekularisasi, nasranisasi dan nativisasi.

2. Masalah Umum

Pertama, kenyataan yang menyangkut pergeseran nilai yang makin menjauh atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yaitu:

- a. Makin berkembangnya nilai-nilai materialisme dan rasionalisme.
- b. Makin terperangkapnya manusia sebagai komponen dalam sistem masyarakat, suatu proses dehumanisasi (objektivasi manusia) dan kecenderungan perekayasaannya atas manusia.
- c. Makin meningkatnya kehidupan egoistis dalam tata kehidupan masyarakat yang makin terfragmentasi.

Kedua, masalah kemiskinan, ketergantungan sosial serta kebodohan (kejumudan) sebagai manifestasi kecenderungan perkembangan sosial ekonomi dengan berbagai akibatnya yang dapat terjadi, seperti:

- a. Kesenjangan antara kaya-miskin dan pengangguran.
- b. Kriminalitas dan perilaku penyimpangan sosial lain.
- c. Ketunawismaan, dan sebagainya.

Kelompok terbesar objek dakwah adalah mereka yang dhaif secara ekonomis dan kedhaifan sosial yang lain, seperti keterbekalangan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

3. Masalah Khusus

Pertama : permasalahan yang menyangkut umat Islam pada umumnya ialah:

- a. Gejala hilangnya kepekaan beragama dan keterperangkapan mereka pada beragama secara permukaan atau formal saja.
- b. Keterbatasan pemahaman tentang Islam dan hakekat Muhammadiyah sebagai alat perjuangan di kalangan umat warga Persyarikatan dan bahkan sebagian da'i.
- c. Berkembangnya persepsi dan pola pemikiran yang majemuk tentang Islam dan cenderung melelahkan kegiatan dakwah Islamiyah.

Kedua : permasalahan yang menyangkut objek dakwah non muslim (umat dakwah), ialah berkembangnya opini yang menyudutkan Islam dan umat Islam di Indonesia, baik akibat pengaruh media massa maupun upaya-upaya Islamophobia)

II. KEBIJAKAN DAKWAH

1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan aqidah Islamiyah di kalangan warga persyarikatan dan umat, sehingga mampu menumbuhkan pemikiran dan perilaku yang Islami. Dalam kaitan ini perlu mendahulukan (memprioritaskan) pembinaan aqidah di samping aspek yang lain.
- b. Mengembangkan kesadaran di kalangan warga persyarikatan dan umat, terutama para pemimpin, tentang 3 (tiga) tantangan utama yang dihadapi dakwah Islamiyah, yaitu: sekularisasi, nasranisasi, dan nativisasi.
- c. Meningkatkan sensitivitas umat terhadap perjuangan/dakwah termasuk meningkatkan komitmennya pada perjuangan.
- d. Meningkatkan dan membiasakan mekanisme perencanaan dan pengorganisasian kegiatan dakwah yang benar bagi setiap eselon kepemimpinan persyarikatan.
- e. Mendudukan kegiatan "Salibisasi/Nasranisasi" di Indonesia dalam segala

bentuknya sebagai masalah “serius bersama” yang perlu dihadapi oleh seluruh kekuatan “dakwah” dalam “dakwah terpadu” dengan cara penyamaan persepsi dan penyusunan perencanaan kegiatan pengatatan dan penangkal bersama. Dasar-dasar hukum yang berkaitan dengannya perlu digali, ditingkatkan pelaksanaannya dan dimasyarakatkan.

- f. Mengembangkan sistem informasi yang mampu menjangkau warga persyarikatan dan umat secara luas dan menumbuhkan komunikasi yang efektif. Upaya pengembangan informasi ini terutama dalam rangka meluruskan distorsi informasi tentang Islam dan umat Islam.

2. **Kebijakan Pokok**

- a. Perlunya disegarkan kembali pemahaman warga Persyarikatan, umat dan da'i tentang pengertian/hakekat dakwah, suatu pemahaman yang secara aktual terkait dengan keadaan masyarakat. Untuk itu diperlukan pergeseran orientasi dari medan dakwah konvensional, yaitu tabligh dalam makna sempit menjadi dakwah dalam segala aspek kehidupan, meliputi dialog amal/keteladanan, dialog seni-budaya, dialog intelektual.
- b. Untuk mewujudkan manfaat dakwah diperlukan pengembangan nilai-nilai agama menjadi konsep-konsep yang operasional dalam masyarakat, suatu upaya penyeimbangan pendekatan objektif dan subjektif terhadap Islam. Pemahaman subjektif Islam akan menimbulkan kesadaran tentang makna Islam sebagai pandangan hidup (Islam sebagai sumber nilai). Sementara pemahaman objektif berarti menjabarkan nilai tersebut dalam realitas sosial yang ada (Islam sebagai sumber konsep). Dengan ungkapan lain, perlu dilakukan interpretasi ajaran Islam secara kreatif proporsional dikaitkan dengan kehidupan manusia, alam dan sejarah.
- c. Mengembangkan nilai-nilai rohaniyah Islam yang memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menghadapi eksis modernisasi, terutama yang menyangkut pergeseran sistem nilai sebagai akibat perkembangan sosial budaya.
- d. Mendorong ulama, cendekiawan dan budayawan muslim untuk mengembangkan gagasan-gagasan filsafati, ilmiah dan kultural untuk menjawab tantangan intelektual dunia modern dalam rangka “perang intelektual” (*Ghazwanul fikri*).

3. **Kebijakan Perencanaan dan Pendekatan**

Secara umum perlu dilakukan peninjauan kembali orientasi/ perencanaan dakwah yang dilakukan kalau semula perencanaan bersifat “top-down” atau “sentrifugal”, yaitu metode dan pengolahan pesan ditentukan menurut selera da'i, maka perlu diubah agar berorientasi “sentripetal”, yaitu mendudukan permasalahan dakwah, kondisi objek dan lingkungan dakwah sebagai hal yang menentukan dalam proses perencanaan dakwah.

Pola kebijakan di bidang perencanaan perlu dikembangkan dengan pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan informasi yang memadai tentang empat bahan pertimbangan pokok penyusunan perencanaan dakwah, yaitu:

- a. Permasalahan dakwah yang dihadapi.
- b. Kondisi objek dakwah beserta situasi masyarakat dan lingkungannya.
- c. Kondisi subjek dakwah (da'i dan lembaga).
- d. Sarana dan faktor lain.

Kebijakan di bidang pendekatan dan perencanaan dakwah secara terinci sebagai berikut:

- a. Peninjauan kembali pendekatan dakwah secara sentral, yaitu perencanaan yang berorientasi pada pemecahan masalah yang didasarkan atas ciri objek dan lingkungan dakwah dan pengkoordinasian kegiatan dakwah secara lebih profesional.
- b. Mengembangkan sistem pemantauan, pengkajian, analisis dan pusat dakwah dalam suatu lembaga khusus (laboratorium dakwah).

Sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan, lembaga ini menyiapkan Bank Data dan Peta Dakwah sebagai sarana perencanaan dan memberikan konsultasi pada pelaksanaan dakwah di lapangan.

4. Kebijakan Khusus

A. Dakwah di kalangan dhu'afa dan muallaf

Khusus untuk objek dakwah kalangan dhu'afa dan muallaf, diperlukan kegiatan dakwah yang dapat menstimulasi jiwa untuk menumbuhkan harga diri dan sikap serta perilaku yang mandiri. Bentuk-bentuk penyantunan setidaknya menyangkut dua hal, yaitu:

1. Memberikan kemampuan dasar atau ketrampilan agar mampu berkarya secara mandiri.
2. Memberikan jalan agar ketrampilan tersebut dapat membuahkan hasil untuk menopang kehidupannya, misalnya: mengembangkan sistem pemasaran bagi jasa atau barang hasil produksi mereka.

Dengan demikian hentuk dakwah untuk golongan ini akan lebih banyak bersifat dakwah *bil-hal* (dialog amal).

B. Dakwah untuk generasi muda

Khusus untuk generasi muda, di samping menanamkan akidah yang benar, perlu diberikan perhatian khusus pada beberapa hal, yaitu:

1. Masalah pergeseran nilai, terutama yang menyangkut masalah akhlaq (erosi akhlaq).
2. Menyadarkan tentang makna dan peran mereka di masa depan termasuk tanggungjawab agama Islam.
3. Mengembangkan model-model pendekatan dakwah sesuai dengan tingkat kematangan jiwa mereka (bila mungkin penelitian/ uji coba secara khusus).

C. Dakwah untuk kaum intelektual

Khusus untuk kaum intelektual dan dunia kampus, dakwah dikembangkan dengan memberikan perhatian khusus pada:

1. "Counter dialog" terhadap nilai-nilai sekularisme dan rasionalisme.
2. Meluruskan kecenderungan perbedaan pandangan (dikotomi) agama dengan ilmu pengetahuan.
3. Bahan kajian serta kajian islami.
4. Menyadarkan tentang peran dan tanggungjawab mereka terhadap masa depan agama dan dakwah.

D. Dakwah untuk kelompok eksekutif dan pejabat

Khusus untuk kelompok eksekutif dan pejabat/umara', perlu dikembangkan kegiatan dakwah dengan perhatian khusus pada:

1. Mengembangkan "rasa aman" termasuk tuntunan penyantunan spiritual yang islami.

2. Meningkatkan kepekaan dan tanggungjawab mereka sebagai muslim.
3. Meningkatkan komitmen mereka terhadap agama Islam dan tanggungjawab berlangsungnya dakwah.

E. Dakwah untuk kelompok marginal

Khusus untuk kelompok marginal dan abangan, perlu dikembangkan positif konstruktif dengan cara:

1. Meniadakan jarak psiko-sosial mereka dengan umat Islam.
2. Meletakkan kelompok masyarakat tersebut sebagai kesatuan umat. Dengan demikian perbedaan dengan santri bukan yang bersifat antagonistic. Terutama hidup spiritual yang Islami perlu dilakukan supaya mereka merasa tidak berbeda dengan umat Islam lainnya.

F. Dakwah untuk kelompok non-muslim

Khusus untuk kelompok yang “belum Islam”, perlu dikembangkan masalah-masalah dakwah yang menunjukkan keluhuran ajaran Islam sekaligus sebagai “counter” terhadap distorsi tentang Islam dan umatnya yang mereka dapatkan. Tergantung dari lapisan sosial mana, dakwah dapat berupa dialog amal, dialog budaya, dialog intelektual, bahkan dialog diskusi.

G. Dakwah untuk kelompok masyarakat khusus

Mengembangkan perencanaan dakwah yang khusus untuk transmigrasi, masyarakat suku terasing, buruh, tani, dan nelayan serta kelompok masyarakat sejenisnya dengan menggunakan da'i yang professional.

H. Dakwah keluarga

Mengembangkan dakwah keluarga dengan tujuan utama: Pembinaan Keluarga Sakinah dalam berbagai aspek dan menjadikan tiap keluarga muslim sebagai sarana dakwah, dengan menitikberatkan pada pendidikan anak-anak sebagai kader penerus perjuangan umat.

CATATAN UMUM

1. Strategi dakwah ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan gerak dakwah Muhammadiyah dalam arti yang luas. Dengan demikian unit-unit organisasi Persyarikatan (Majelis, Badan, Lembaga, Ortom, Amal Usaha) berkewajiban untuk melaksanakan strategi dakwah tersebut di bidang garap masing-masing, dan disesuaikan dengan keadaan yang ada.
2. Dalam pelaksanaan dakwah tersebut, hendaknya setiap aparat pelaksana dakwah menggunakan berbagai media yang dapat digunakan.
3. Penjabaran Strategi Dakwah, dalam bentuk Tuntunan Praktis Dakwah Muhammadiyah, diamanatkan kepada Pimpinan Pusat untuk menyusunnya.

Lampiran 3.1.

PENGEMBANGAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH

Pengantar

Ketika Sayid Qutub sampai pada kalimat firman “*Saffan ka annahum bun-yanun marsus*”, dalam kitab tafsirnya *Fi Zilaali al Quran* (jilid terakhir VIII halaman 77), mufasssir ini mengawalinya dengan tegas, bahwa ayat ini (ayat 3 surat as-Shaf tersebut) adalah ayat jihad, ayat perjuangan. Sesungguhnya Al-Quranul Karim membuat bangunan umat yang di atas pembangunan itu agar dapat ditegakkan pengurusan agama Allah di dunia ini, beserta program kehidupan dan organisasi manusia, demikian diucapkan selanjutnya oleh Sayid Qutub, sehingga tak ada seorang muslim pun secara pribadi dibina di luar ikatan masyarakat Islam.

Organisasi Muhammadiyah yang sejak semula didirikan oleh K. H. A. Dahlan, 80 tahun yang lalu, adalah organisasi untuk menegakkan agama Islam. Tujuan sejati Muhammadiyah tertulis dalam Statuten (Anggaran Dasar) Muhammadiyah, yang dalam artikel II hajat persyarikatan menyebutkan: “*Memadjoekan dan menggembirakan pengadjaran dan peladjaran agama Islam Memadjoekan dan menggembirakan tjara kehidupan sependjang kemaoean agama Islam kepada segala sekoetoe-sekoetoeja*”. (disalin dalam ejaan aselinya; sekoetoe = anggota). Sewaktu rumusan AD tentang tujuan Persyarikatan Muhammadiyah seperti ini mulai diterjemahkan ke dalam praktek, artinya telah dicoba diimplementasikan dalam program amal usaha, dalam bentukan secara organisasi, pada waktu itu kitab tafsir tulisan Sayid Qutub tersebut di atas belum terbit.

Para pakar sejarawan dan para sosiolog semuanya sepakat dalam analisisnya, bahwa berdiri dan terbentuknya organisasi Muhammadiyah, yaitu sebagai ikatan yang menghimpun pengelompokan orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, dengan mempunyai tujuan yang tertentu dan kegiatan bersama yang terarah itu, dipandang sebagai fenomena modernisasi dalam perkembangan Islam, di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya. Fenomena modernisasi Islam itu mencakup perkembangan pengelompokan maupun perkembangan pemahaman, sehingga terbentuknya organisasi dapat dianggap sebagai manifestasi pembaharuan dalam pemahaman.

Korelasi antara tulisan Sayid Qutub dan lahirnya organisasi Muhammadiyah, mempunyai alasan tertentu untuk ditampilkan pada bagian pengantar prasaran “Pengembangan Organisasi” yang menjadi salah satu acara dalam Muktamar Muhammadiyah ke-42 ini. Korelasi itu selain untuk menampakkan adanya keterkaitan dalam sejarah pemikiran, tetapi pula guna memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menonjolkan kembali tujuan sejati sewaktu dibentuknya organisasi Muhammadiyah itu.

Tuntutan Pengembangan Organisasi

Pengantar pikiran diperlukan tidak hanya sekedar sebagai kata pendahuluan, tetapi pula ingin untuk menyalurkannya menjadi kesamaan persepsi. Dengan persepsi yang sama kita dapat sama merasakan akan perlu tidaknya pengembangan organisasi Muhammadiyah itu.

Yang sudah sama kita pahami ialah bahwa organisasi Muhammadiyah adalah organisasi pembaharuan Islam. Namun harus pula kita memperoleh pemahaman yang sama, bahwa perkembangan organisasi itu dalam meniti sejarah, sejalan dengan gerakan naik pembaharuan Islam itu sendiri, sehingga bentuk, corak dan gaya organisasi

Muhammadiyah, bertalian rapat dengan perkembangan lingkungan masyarakat (muslimin) Indonesia. Organisasi Muhammadiyah tak terlepas dari perkembangan sosial politik kawasan ini.

Kondisi lingkungan yang mempengaruhi gerakan masyarakat sewaktu Muhammadiyah didirikan adalah keadaan yang masih di bawah bayang-bayang lanjutan dari kebijaksanaan “*etische politiek*” pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian ketika aktivitas organisasi itu melangkah ke luar Yogya dan bergerak ke luar Jawa, suasana perilaku politik pemerintahan jajahan itu sudah berubah lebih reaksioner, berhadapan dengan gerakan kebangsaan yang naik pasang dan perubahan globalisasi imperialisme sesudah Perang Dunia I. Sedang di pihak lain munculnya gerakan dan semangat Pan Islamisme sesudah jatuhnya kekhalifahan Usmaniyah di Turki, merangsang pula pembaruan pemikiran dalam dunia Islam. Situasi dan kondisi lingkungan demikian itu ikut mempengaruhi bentuk, gaya, dan gerak organisasi Muhammadiyah.

Organisasi adalah sarana. Ia adalah alat dan bukan tujuan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam pada hakekatnya tak berubah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah semenjak semula didirikan adalah menegakkan agama Allah, agama Islam itu, meneruskan risalah Muhammad. Maka organisasi itu dengan sadar menisbahkan dirinya kepada Muhammad s.a.w., yang karena itu lalu diberi nama Muhammadiyah.

Formulasi maksud dan tujuan Muhammadiyah pada masa-masa awal terasa diungkapkan secara sederhana, pragmatis dan mudah dicerna, yaitu pertama: “*Memadjoekan dan menggembirakan pengadjaran dan peladjaran agama Islam ...*” dan kedua “*Memadjoekan dan menggembirakan tjara kehidoepan sepandjang kemaoean agama Islam*”.

Setelah perang kemerdekaan dan kekuasaan penjajah diganti dengan pemerintahan Republik, dalam lingkungan sosial politik yang baru yang membukakan horizon untuk cita-cita yang lebih jauh, maksud dan tujuan Muhammadiyah yang dicantumkan dalam AD dirumuskan lebih abstrak, sehingga berbunyi: “*menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya*”. Bahwa sasarannya adalah menegakkan agama Islam dan menggembirakan hidup menurut ajaran agama itu, terang tidak berubah. Hanya bahwa sasarannya adalah orang perorangan dan masyarakat tidak dirincikan. Tetapi usaha-usaha yang diterakan dalam AD, jelas membagi dua sasaran itu, yaitu yang dikerjakan perorangan dan yang dikerjakan secara berjamaah dalam masyarakat.

Begitu pula selanjutnya, apabila soal tujuan Muhammadiyah itu kita perhatikan dalam koneksitas AD yang paling baru. Kita harus pulangkan kembali pikiran kita kepada tujuan sejati Muhammadiyah. Apabila kita letakkan Muhammadiyah itu pada pengertian yang benar, yakni sebagai organisasi yang menjadi sarana yang meneruskan risalah Muhammad, maka renungan yang ruwet tentang apa bedanya antara “*masyarakat Islam yang sebenar-benarnya*” dengan “*masyarakat utama*”, akan selesai sendirinya dengan jernih dalam pemikiran kita. Apapun dan bagaimanapun tujuan Muhammadiyah itu dirumuskan, namun hakekatnya tidak akan bergeser dari menegakkan agama Islam. Maka oleh karena itu pula, perubahan asas dalam penyesuaian Anggaran Dasar yang diputuskan dalam Muktamar yang lalu, yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1985, tak boleh dipahami sebagai langkah taktis. Penyesuaian itu bersifat strategis.

Adalah jelas bahwa Persyarikatan bergerak dalam wilayah Negara Republik Indonesia (AD Bab III Pasal 6), maka lingkungan masyarakat dan sosial politik menegakkan agama Islam itu, adalah lingkungan Negara Republik Indonesia yang

berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anggota Muhammadiyah ialah warganegara Republik Indonesia (itu yang) beragama Islam (AD Bab III Pasal 5).

Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan perekonomian dengan setting sosial politik yang terarah, telah mengubah penghidupan perorangan dan melahirkan hubungan kehidupan bermasyarakat dalam Republik Indonesia yang berkembang pula. Kehidupan masyarakat kita telah disentuh “consumerisme” dunia dan sudah disapa oleh dunia informasi yang global. Namun maksud dan tujuan Muhammadiyah menegakkan agama Islam, baik yang diarahkan untuk perorangan pribadi-pribadi Muslim, maupun yang ditujukan untuk komuniti atau jamaah muslimin dalam masyarakat umum, pada hakekatnya tidak berubah.

Oleh karena itu adalah benar bahwa pengembangan organisasi dalam Muhammadiyah, adalah suatu kebutuhan. Pengembangan organisasi adalah kebutuhan menjawab tantangan lingkungan yang sudah dan sedang berubah. Pengembangan organisasi adalah kebutuhan mengantisipasi perkembangan masyarakat yang sedang berlangsung. Kebutuhan akan pengembangan itu adalah dalam konteks sebagai organisasi yang jati dirinya justru organisasi pembaharuan Islam, yang berpangkal tolak dari kepercayaan akan kebenaran bahwa dinul Islam adalah kebenaran sampai akhir zaman. Maka organisasi Muhammadiyah yang berkehendak untuk menegakkan kebenaran Islam dengan jati diri demikian itulah, yang akan diubah-dikembangkan sesuai dengan watak tajdid yang menjadi cirinya yang menonjol.

Dengan keyakinan tauhid yang tak berubah, dengan sikap pendirian tetap berpegang teguh kepada al-Quran dan as-Sunnah, Muslimin bangsa Indonesia melangkah maju melalui pintu tajdid yang tetap terbuka, menjaga kemurnian agama Islam, untuk menjawab tantangan zaman (baik dalam menghadapi abad 21 maupun dalam menyongsong Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kjedua).

Pengembangan organisasi adalah tuntutan zaman, menjawab tantangan yang meminta penyesuaian kondisi sarana yang digunakan, dengan kebutuhan lingkungan yang berkembang. Pengembangan organisasi Muhammadiyah adalah tuntutan watak tajdid dari organisasi itu sendiri, tetapi tentulah tetap istiqamah menjaga kelestarian missinya, menegakkan agama Allah.

Menjadi Muslim yang Muhammadiyah

Yang menjadi sasaran dari maksud dan tujuan Muhammadiyah satu pihak adalah perorangan pribadi muslim, sedang pada pihak lain ialah kelompok orang yang tergabung menjadi masyarakat muslimin. Terhadap kedua sasaran inilah perbuatan menegakkan agama Islam itu hendak dilakukan.

Dari dua sasaran itu, sasaran perorangan dalam masa-masa terakhir ini sangat tercecceh terbelakang. Maka perlu kita sadari kembali pentingnya kedudukan Ranting dalam struktur organisasi kita. Hanya organisasi Ranting yang punya anggota perorangan pribadi itu. Sedang Pusat, Wilayah, Daerah dan Cabang tidak berurusan dengan perorangan, dan hanya mengurus badan atau organ dari gabungan orang (dalam satuan apa pun namanya). Salah satu tujuan penting pengembangan organisasi ialah menghidupkan kembali dan meningkatkan pembinaan anggota agar lebih ikut berperan dalam mencapai tujuan menegakkan agama Islam pada dirinya, pada keluarganya dan fungsinya sebagai pimpinan/teladan terhadap masyarakat muslimin sekitarnya.

Akan tetapi bersamaan dengan itu perkembangan amal usaha yang menjadi sarana utama dakwah selama ini tumbuh dengan pesat. Penambahan jumlah sekolah

dan universitas, perkembangan klinik-klinik ke poliklinik dan meluasnya rumah-rumah sakit dan lain-lain amal usaha yang sangat besar dalam kurun waktu duapuluh tahun terakhir ini, telah menyerap banyak tenaga kepengurusan Pimpinan Persyarikatan di segala tingkat. Sisa tenaga yang diperlukan bagi pelayanan kebutuhan rohani anggota, seperti pengajian wirid untuk anggota secara rutin, tersisa terlalu sedikit kalau bukan kehabisan sama sekali. Peningkatan pengetahuan anggota yang limapuluh tahun lalu dikenal berupa kursus-kursus anggota dan yang kemudian disebut pendidikan masyarakat, kini tak terdengar lagi. Kegiatan tabligh di luar hari-hari besar atau yang diadakan dalam peristiwa tertentu dengan acara khusus, berkurang. Kegiatan seperti pengajian dan rapat reguler anggota yang berisi peningkatan ilmu agama yang dilaksanakan secara tetap dan teratur, di beberapa tempat sudah hampir tak dikenal. Bahkan bagi banyak Ranting menjadi saingan dengan kegiatan seperti itu. Pendek kata, ada kenyataan bahwa pembinaan anggota yang berada di Ranting-Ranting menjadi sangat terabaikan.

Menjadi anggota Muhammadiyah tentulah sepanjang waktu. Tetapi berfungsi sebagai anggota Muhammadiyah dalam arti anggota kelompok hanyalah sewaktu-waktu. **Fungsi itu semakin pasif kalau Pimpinan Ranting semakin tidak aktif.** Tetapi kemudian timbul pertanyaan, apakah yang menjadi ukuran yang menentukan keaktifan seorang Pimpinan Muhammadiyah?

Apakah tugas sebagai Pimpinan Muhammadiyah itu memerlukan kerja yang purnawaktu (*full-timer*)? Dengan tidak mengurangi penghargaan kita kepada dedikasi sementara orang Muhammadiyah yang melakukan pekerjaan Pimpinan Muhammadiyah purna waktu, baik karena sudah pensiun atau karena cukup atau mencukupi andalan hidup yang ada, kenyataan sesungguhnya menunjukkan bahwa berfungsi sebagai Pimpinan itu, dilakukan hanya sebagai *part-timer*. Malah banyak yang keaktifannya hanya untuk rapat sekali seminggu saja. Menjadi Pimpinan Muhammadiyah itu pada umumnya adalah *part-timer*.

Sedang pada pihak lain mereka yang mendapat penugasan pada amal usaha Muhammadiyah diharuskan bekerja penuh. Sedang amal usaha itu menuntut peningkatan mutu dan penyempurnaan hasil pelayanan, menghendaki bahwa seluruh petugas itu profesional. Hanya beberapa amal usaha tingkat permulaan saja atau yang berlokasi di daerah yang relatif agar jauh, yang terpaksa dikelola secara amatiran, dengan petugas pinjaman atau *part-timer*. Tetapi hasil pengamatan jelas pula menunjukkan bahwa trend perkembangan amal usaha Muhammadiyah itu, mempunyai prospektif dan menuju kesempurnaan. Ini berarti bahwa pengelolaan di hari esok akan mengarah kepada pengelolaan yang profesional.

Pimpinan Muhammadiyah yang membawahi amal usaha lambat laun menjadi tercecceh di belakang untuk dapat ikut dalam orbit pengendalian amal usahanya. Sewaktu penyelenggaraan amal usaha sudah berjalan dengan manajemen teratur, ternyata Pimpinan yang “punya” amal usaha itu, tidak atau belum sempat lagi memonitornya. Terjadilah kesenjangan yang semakin meluas. Akhirnya menimbulkan gejala yang tipikal yang muncul di banyak tempat, seperti Kepala Sekolah Muhammadiyah yang bertindak sebagai “*directeur eigenaar*”. Gejala seperti ini disebut dalam istilah manajemen “*out of control*”. Maknanya sama dengan layang-layang yang putus talinya. Pandangan luar dari jauh masih melihat bahwa Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan tampak punya hak yang dapat mengklaim bahwa layang-layang itu adalah kepunyaannya. Ia perlihatkan tanda kepemilikan nominal itu berupa kumparan yang masih di tangannya dan bukti

benang yang masih sisa. Padahal layang-layang yang berkibar semarak itu tidak hanya jauh dari mata tapi juga jauh dari tangan. Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan.

Gejala lepas kendali itu tampak pada waktu jika Pimpinan menyebut besaran jumlah usaha, berapa banyaknya sekolah, jumlah klinik dan sebagainya, yang dinyatakan dalam ribuan atau ratusan sebagaimana jumlah anggota disebut dengan jutaan. Untuk sampai kepada angka yang lebih pasti dan meyakinkan dibutuhkan pengendalian manajemen yang memakai data kuantitatif tepat, artinya dalam digit sampai angka satuan tanpa angka nol pembulatan di belakangnya. Hari ini dan terutama besok membutuhkan analisa dan evaluasi dengan memakai data pada angka-angka yang nyata dan dapat dihitung. Organisasi harus berkembang dan menyesuaikan.

Apakah Pengembangan Organisasi?

Pemakaian istilah pengembangan di sini, dimaksudkan dalam arti segala macam perubahan atau penyesuaian yang terjadi atau diperbuat ke arah perbaikan atau kesempurnaan, seperti pengertian yang terkandung dalam kata *development*. Dalam wilayah pengembangan organisasi termasuk restrukturisasi, jika perbaikan yang diinginkan adalah bermaksud mengubah tata susunan organisasi itu, bahkan merombak strukturnya.

Pengembangan organisasi meliputi pula perbaikan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi bagian atau anggota dari organisasi, sehingga hendaknya setiap organ berfungsi semestinya menurut bidang tugas yang dituntut dari organ itu. Jika fungsi itu secara minimal ada, tetapi tidak aktif atau menyimpang tugasnya atau mengambil peranan yang lain dari yang dirancang semula, maka pengembangan organisasi di sini adalah dalam arti perbaikan dengan tekanan pada refungsionalisasi.

Apabila suatu jabatan diperluas cakupan tanggungjawabnya, atau suatu organ dipertegas fungsinya, itupun sudah termasuk *organization development*. Akan tetapi tidak semua keputusan pengembangan organisasi harus diputuskan pada pengambil keputusan tertinggi. Apabila substansi atau sifat perubahan yang dikehendaki itu tidak terlalu mendasar, maka keputusan untuk perubahan dapat diambil pada pengambil keputusan yang lebih bawah.

Pengembangan organisasi yang mendasar dan mempunyai cakupan luas ke seluruh organisasi atau begitu penting dan menyentuh sendi-sendi pokok organisasi atau sampai mengubah anggaran dasar, tentulah perlu diputuskan oleh (musyawarah) pengambil keputusan tertinggi, seperti Mukhtamar kita ini.

Adapun yang dimaksudkan dengan pengembangan organisasi (*organization development*), yang hendak kita bicarakan sehubungan dengan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, adalah upaya pemikiran dan hasil kajian atau konsep yang ditujukan untuk menjawab tuntutan penyempurnaan dan atau perbaikan dalam tubuh organisasi Muhammadiyah.

Tuntutan penyempurnaan itu adalah tuntutan zaman, Pada usia organisasi Muhammadiyah mendekati delapanpuluh tahun, disadari bahwa organisasi yang telah baik dahulu itu, dewasa ini dirasakan perlu untuk disempurnakan. Beberapa fungsi tertentu perlu ditinjau dan beberapa fungsionaris perlu diberikan peranan baru. Yang dicita-citakan adalah organisasi Muhammadiyah yang benar hidup dengan kemampuan pengendalian yang berfungsi, yang bisa mengantarkan kemuhammadiyahan yang berisalah Islam itu kepada para anggotanya yang selanjutnya akan memberikan dapat kemasyarakatan yang nyata sebagai rahmatan lil 'alamin.

Sidang Tanwir Muhammadiyah 1989 (dilangsungkan pada 8–11 Desember 1989 di Lhokseumawe, Aceh Utara), membenarkan adanya tuntutan nyata kepada penyempurnaan organisasi Muhammadiyah itu. Sidang Tanwir menerima baik makalah tentang “Suatu Tinjauan Ulang Organisasi Muhammadiyah” dan mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk diacarakan dalam Muktamar ke-42 yang mulia ini. Oleh karena itu, makalah tersebut dilampirkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari prasarana ini, sehingga dapat membantu untuk melihat luasan persoalan dan kebenaran analisis yang perlu dievaluasi oleh para Mukhtamir. Setidak-tidaknya ada panduan untuk memperoleh kesamaan arah dan persepsi sebelum terjun dalam diskusi untuk mendapatkan kebulatan mufakat.

Refungsionalisasi dan Reformasi

Dengan menurunkan beberapa pokok tentang pengembangan organisasi Muhammadiyah yang diharapkan dapat diputuskan oleh Muktamar ke-42, seperti di bawah nanti, maka dengan sederhana dapat dikatakan bahwa **pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud tidak perlu mengubah anggaran dasar**.

Tekanan pengembangan organisasi lebih dititik-beratkan satu pihak pada refungsionalisasi organ organisasi tertentu, dan pada pihak lain adalah reformasi.

Refungsionalisasi adalah memperjelas batasan fungsi atau menambah isi dan dukungan kepada satu atau beberapa organ dalam organisasi. Maksud refungsionalisasi ialah agar organisasi secara menyeluruh dapat berfungsi lebih baik dan lebih sempurna jalannya mencapai sasaran, sedang bagi yang bertugas agar dapat melaksanakan tugasnya lebih efektif.

Reformasi adalah berkenaan dengan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan atas satu atau beberapa organ tertentu dalam suatu struktur organisasi. Perubahan diperlukan karena berubahnya fungsi atau isi organ lain yang terkait, atau karena kebutuhan peningkatan koordinasi antar organ-organ.

Ada dirasakan timbul hasrat di lingkungan dalam Muhammadiyah sendiri, terutama di kalangan pimpinan, keinginan hendak meluruskan dan menyempurnakan tata-cara kerja Majelis-Majelis umpamanya, untuk tidak menimbulkan kesan seolah-olah Majelis itu bergerak seperti organisasi otonom. Hal ini tertampak karena tidak jarang terjadi bahwa terdorong oleh kehendak untuk terlihat lebih berhasil secara operasional dan dipacu oleh semangat yang tinggi, ingin gerak cepat dan tidak mau terlambat, lalu telah melahirkan cara kerja yang menekankan pada hirarkis Majelis dan tidak melalui saluran induk Persyarikatan. Akibatnya, Pimpinan Persyarikatan dalam organisasi induk menjadi seperti kehilangan kendali. Tidak jarang Pimpinan Persyarikatan melihat kegiatan seperti menonton dari luar. Kadang-kadang ada terjadi pada suatu kali dan pada suatu tempat, kegiatan yang tumpang tindih di atas sasaran pada objek yang sama. Maka kalau hal itu terjadi yang hilang dalam fungsi organisasi tidak hanya fungsi koordinasi, tetapi juga fungsi pendistribusian informasi. Kalau ini terjadi maka selanjutnya markas organisasi Persyarikatan sebagai pusat informasi menjadi tidak berfungsi dan hilang artinya.

Mengembalikan fungsi-fungsi tubuh dan anggota organisasi kepada tempat yang sewajarnya, atau disebut refungsionalisasi, termasuk dalam cakupan pengembangan organisasi juga, sungguhpun dalam praktek pelaksanaannya nanti akan keluar dalam usud penajaman pembagian kerja dan penegasan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing instansi organ. Issue ini tidak hanya berkenaan dengan pembagian kerja antar Majelis yang satu dengan yang lain, tetapi pula berkaitan dengan penegasan

pelimpahan wewenang antara Pimpinan Persyarikatan kepada Majelis-Majelis yang menjadi pembantunya.

Majelis-Majelis menduduki fungsi pembantu Pimpinan Persyarikatan. Karena Majelis menjalankan fungsi pelaksanaan pada bidang yang telah ditentukan, maka fungsi sebagai pembantu itu sebenarnya pembantu khusus, yaitu pelaksana dalam bidang yang ditentukan itu. Namun Pimpinan Persyarikatan membutuhkan pula pembantu umum, yaitu pembantu yang menjadi pelaksana memutar roda kepemimpinan sehari-hari dalam markas pimpinan atau disebut yang menjadi pelaksana manajemen kantor.

Di sinilah diperlukan penegasan zona kewenangan sehingga Pimpinan Persyarikatan dengan Pimpinan Majelis yang membantunya tidak berjalan sendiri-sendiri, seperti terlepas dari satu pengarahan yang tunggal. Dalam mengatur langkah dan berjalan ke satu arah, tidak hanya koordiasi, tetapi pula ketegasan pembagian tugas. Maka oleh karena itu diperlukan refungsionalisasi dan sekaligus reformasi pada organik-organik pelaksana. Persoalannya ialah bagaimana Majelis sebagai pelaksana khusus, dan Sekretariat selaku pelaksana umum tidak tumpang tindih dalam operasionalnya. Sekurang-kurangnya hendaklah tetap terpelihara koordinasi di bawah sebuah tali pengendalian tunggal dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan informasi untuk tingkat Pimpinan di bawahnya. Demikianlah hendaknya agar penegasan zona kewenangan itu tercermin pula pada setiap tingkat pimpinan yang berfungsi koordinatif, yaitu Wilayah, Daerah, dan Cabang.

Sebagaimana diuraikan di atas, perkembangan dan perluasan aktivitas Muhammadiyah dan amal usahanya telah menimbulkan suatu gejala yang memprihatinkan, gejala yang berbahaya dalam kelangsungan organisasi, yaitu apa yang disebut lepas kendali (*out of control*). Salah satu langkah yang harus ditempuh, adalah melalui jalan agar berfungsinya (kembali) unsure pengawasan dalam manajemen (= pimpinan) menurut semestinya. Adapun fungsi pengawasan yang semestinya itu ialah bahwa Pimpinan Persyarikatan memantau kegiatan organisasi di bawahnya, memperhatikan hasil pantauan, memeriksa dan mengkaji-ujinya, untuk dapat mengetahui apakah hasil kegiatan unit-unit organisasi sesuai dengan apa yang direncanakan (atau apa yang diprogramkan) oleh Muktamar/Musyawah Pengawasan inilah yang dikenal dengan pengawasan melekat, pengawasan yang terkait lekat dengan fungsi Pimpinan.

Tetapi di samping pengawasan yang "*build in*", yang lekat tak terpisah dari fungsi manajemen, masih diperlukan pula pengawasan atas penyelenggaraan keuangan dan kekayaan materiil lainnya yang diamanahkan kepada Muhammadiyah. Pimpinan Persyarikatan adalah pemikul yang harus bertanggungjawab atas amanah itu, karena kepimpinannya. Dewasa ini, terutama dalam dua dasa warsa belakangan ini, di mana pengurusan kekayaan materiil meningkat besar sekali, manajemen pemeliharaan amanah itu masih belum ada. Artinya belum adanya suatu sistem pengawasan atas kekayaan materiil dan administrasi keuangan yang utuh.

Pertanggungjawaban Pimpinan Persyarikatan dan petugas atau pejabat yang dikuasakan menjalankan amal usaha Muhammadiyah, adalah pertanggungjawaban amanah. Amanah yang dapat dipertanggungjawabkan adalah amanah dengan sistem yang dapat dikontrol. Kualifikasi amanah di dalam organisasi Muhammadiyah tidaklah dapat terlepas dari sistem kontrol masyarakat, karena Muhammadiyah itu sendiri adalah masyarakat. Maka adanya aparat pengawasan yang terpisah dari Pimpinan menjadi tuntutan zaman, karena perkembangan masyarakat menuntut pelaksanaan amanah yang dijabarkan ke dalam sistem yang menjamin kepercayaan itu, menurut cara-cara yang

lazim terpakai dalam masyarakat modern dewasa ini, yaitu berupa *accountability* yang baku dan dapat dihadirkan dan diperiksa kebenarannya secara kuantitatif. Di antaranya dengan menggunakan teknik pengawasan yang dilakukan dengan memakai sistem pemeriksaan yang dapat diudit.

Adanya pengawasan yang terpisah secara fungsional, tidak mengurangi perlunya ditegakkan pengawasan melekat pada kepemimpinan Persyarikatan. Efektivitas Pimpinan Persyarikatan di masa depan tergantung kepada kemampuan pengendalian organisasi dan aktivitas organisasi itu secara nyata pada setiap tingkat Pimpinan, dari Pimpinan Pusat sampai kepada Pimpinan Ranting.

Akhirnya dalam uraian refungsionalisasi pengawasan dalam rangkaian pembicaraan pengembangan organisasi Muhammadiyah, adalah penting untuk memetik salah satu butir keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah 1989 di Lhokseumawe 8 – 11 Desember 1989 yang lalu itu, berkenaan dengan “Peningkatan Pengawasan Dalam Muhammadiyah” butir V/5 yang berbunyi: *Untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional secara efektif, dituntut tidak adanya jabatan rangkap vertical seperti jabatan anggota pimpinan persyarikatan yang membawahi langsung amal usaha persyarikatan. Seyogyanyalah dalam rangka pengembangan organisasi Muhammadiyah yang sedang kita bicarakan ini, keputusan Sidang Tanwir tersebut di atas mendapat pengukuhan Muktamar, sehingga fungsi pengawasan yang sudah akan ditegakkan itu, merupakan salah satu langkah yang menunjang pembaharuan organisasi yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan di masa datang.*

POKOK POKOK PERUBAHAN

A. Unsur pelaksana professional yang membantu pimpinan

1. Membentuk suatu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris eksekutif, sebagai badan pelayanan pimpinan masing-masing tingkat, yang mengelola urusan manajemen kantor dan menjadi terminal informasi, menerima, mengolah dan meneruskan informasi ke seluruh pihak yang bersangkutan dari markas pimpinan masing-masing tingkat. Termasuk ke dalam pengumpulan informasi, terbentuknya sistem pemantauan kegiatan oleh pimpinan atas kepada pimpinan bawahan secara fisik maupun teknis, yang penyelenggaraan dan pembinaannya dilakukan di bawah sekretaris eksekutif itu.
2. Tugas utama sekretaris eksekutif adalah pemrakarsa kegiatan yang sudah ditetapkan menjadi beban program pimpinan persyarikatan tingkat yang bersangkutan, mempersiapkan rapat-rapat dan acara-acara pimpinan, termasuk pencatatan serta penuangannya ke dalam rumusan-rumusan keputusan dan penyiapan laporan-laporan pimpinan. Sekretaris eksekutif itu dapat memegang koordinasi fungsi pelayanan kantor (urusan kerumahtanggaan), kesekretariatan majelis atau badan pelaksana lainnya pada tingkat pimpinan persyarikatan yang bersangkutan.
3. Sekretaris eksekutif diangkat oleh pimpinan persyarikatan tingkat yang bersangkutan, dipilih dari orang atau kader Muhammadiyah yang memenuhi syarat kemampuan dan kesetiaan, dipekerjakan dengan perlakuan dan hak seorang professional. Hubungan kerja sekretaris eksekutif dengan pimpinan persyarikatan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang mencakup hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan mengacu pada ketentuan umum tentang kedudukan serta hak dan kewajiban staf dan pimpinan professional dan karyawan dalam persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah yang akan ditetapkan oleh pimpinan pusat.

4. Sekretaris eksekutif sebagai pimpinan kelompok sekretariat bertanggungjawab kepada pimpinan persyarikatan, qq. Sekretaris pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan menurut prinsip "unity of command" dan oleh karena itu dapat memperoleh limpahan kewenangan mengangkat dan memberhentikan karyawan, kecuali pengangkatan staf senior, dilakukan oleh sekretaris pimpinan persyarikatan, qq. Sekretaris pimpinan yang bersangkutan.

B. Tetap memelihara kedudukan jabatan dalam Pimpinan Muhammadiyah sebagai jabatan kehormatan.

1. Kedudukan pimpinan persyarikatan pada semua tingkatan mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, sampai Pimpinan Ranting, yaitu pimpinan yang dipilih oleh muktamar/musyawarah masing-masing tingkat, hendaklah tetap terpelihara sebagai kedudukan yang menjadi sarana amal saleh seorang muslim bagi pribadi yang bersangkutan, serta tetap dijaga sebagai jabatan kehormatan dari mata masyarakat. Oleh karena itu kepada pribadi yang memangku jabatan kehormatan yang berlandaskan keikhlasan beramal itu, tidak diberikan gaji, honorarium dan imbalan apapun namanya, disebabkan jabatan atau kedudukan pimpinan yang demikian itu.
2. Akan tetapi kepada pimpinan persyarikatan di semua tingkat, sebagai yang dimaksudkan pada butir satu di atas, dapat diterimakan atau diberi uang pengganti atas pengeluaran biaya (*expenses*) yang terkait dengan pelaksanaan fungsi atau jabatannya atau karena adanya keputusan yang menugaskannya, kemampuan dana yang tersedia pada pimpinan persyarikatan yang bersangkutan. Rapat pimpinan membuat peraturan umum yang tetap tentang pelaksanaan penggantian biaya itu, baik jumlah maupun cara dan pertanggungjawaban administrasinya.
3. Ketentuan tidak menerima honorarium dan sebagainya, dalam rangka menjaga kedudukan pimpinan sebagai sarana amal saleh dan jabatan kehormatan sebagai tersebut butir dua, tidaklah mencegah seorang pimpinan persyarikatan yang karena mempunyai profesi, memperoleh bayaran atau honorarium atau imbalan apapun atas profesinya itu dalam organisasi dan atau amal usaha Muhammadiyah yang lain, dengan syarat bahwa amal usaha itu tidak di bawah pengawasan langsung jabatan yang diduduki oknum pimpinan itu, satu dan lain selaras kepatutan dan asas pengawasan melekat tentang larangan perangkapan jabatan secara vertikal.

Pendanaan (Funding)

Syarat untuk keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi tersebut di atas, ialah adanya jaminan pendanaan yang mantap. Kaki yang satu dari profesionalisme haruslah tegak bersama kaki pembeayaan (*financing*) yang tangguh, agar manajemen modern benar-benar kokoh berdiri, yaitu yang bertopang di atas dua kaki. Mengingat betapa pentingnya keberhasilan program pendanaan terhadap keberhasilan pengembangan organisasi, maka seyogyanyalah Muktamar memutuskan pula untuk mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990 – 1995 yang akan datang, agar mengambil langkah pendanaan yang mantap secara tepat. Persoalan tidak hanya masalah pengerahkan segala sumber daya yang ada dalam lingkungan Muhammadiyah untuk pendanaan tersebut, tetapi juga soal mengatur

pengelolaan dana secara manajemen yang baku dan dengan sikap amanah yang diwujudkan dalam sistem yang *accountable*.

C. Pendanaan organisasi

(sebagai amanat Mukhtamar kepada Pimpinan Pusat)

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah hendaklah mengatur tentang penghimpunan dana untuk pembeayaan organisasi baik dari sumber luar zakat/shadaqah/infaq, maupun pengerahan sumberdaya asset internal organisasi dan menegakkan sistem anggaran belanja di semua tingkat manajemen pimpinan persyarikatan.
2. Mendaftar ulang semua tanah-tanah wakaf Muhammadiyah dan bangunan atau asset tetap lainnya disertai keterangan lengkap penggunaannya dewasa ini, kemudian meregistrasi kembali tertib penggunaan seluruh asset tetap tersebut untuk memperoleh ketentuan penghasilan atau beban beaya yang patut atas masing-masing asset itu.
3. Pimpinan Muhammadiyah agar membebaskan secara formal biaya penggunaan asset tetap Muhammadiyah terhadap badan, lembaga, atau amal usaha Muhammadiyah yang usahanya itu menerima pemasukan dalam bentuk apapun atas asset tersebut, pengaturan administrasi dan tata-cara pembebanan dan pemungutan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan asas murah, mudah, dan lugas.
4. Dalam rangka pembinaan anggota Muhammadiyah memenuhi program konsolidasi organisasi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan tata-cara untuk melaksanakan penerimaan infaq seribu rupiah setiap tahun atas setiap pemasukan nama dalam daftar anggota atau keluarga yang disusun dari data yang diterima.
5. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan memakai forum musyawarah yang sesuai akan menerbitkan tuntunan yang berisi tata-cara dan penggunaan sumbangan wajib amal usaha baik tetap maupun yang tidak tetap, dengan mempertimbangkan secara saksama jaminan kelangsungan hidup kegiatan amal usaha pada satu pihak dan pengembangan organisasi yang terkendali pada pihak lain, berlandaskan prinsip menjaga integrasi organisasi Muhammadiyah yang utuh dan asas manajemen terbuka yang baku.

Penutup

Andalah yang berhak memutuskan dan menentukan masa depan Muhammadiyah. Sungguhpun kita mengimani dengan yakin firman Allah: "*wala tadri nafsun maadzaa taksibu ghadan*" (Luqman ayat 34), namun kita harus membuktikan ikhtiar kita untuk kejernihan pengamalan tawakkal kepada Allah, yakni setelah selesai dengan sungguh-sungguh di belakang upaya kita. Sehingga dengan hati yang sempurna iman itu pula kita hadapi dan laksanakan perintah Allah "*waltandzur nafsun maa qaddamat lighadin*" (al-Hasyr ayat 18), di mana makna ghadin tak selalu akhir yang paling akhirat. Tahun dua ribuan juga termasuk wilayah kerangka lima tahun atau duapuluh lima thun yang akan datang masih dalam yurisdiksi mereka yang beriman dan bertekad menegakkan agama Allah dan melangsungkan risalah Rasulullah sebagai *rahmatan lil alamin*. Insya Allah.

Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya Karim

Lampiran 3.2.

PENINGKATAN KUALITAS PIMPINAN MUHAMMADIYAH

BAB I DASAR PEMIKIRAN

I

Secara empiris (menurut realitas) Muhammadiyah sejak awal didirikannya hingga dewasa ini telah mampu menunjukkan kepribadiannya yang kokoh sebagai gerakan Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Terbentang dengan jelas adanya proses gerak perjuangan yang kontinyu dari periode ke periode berikutnya yang mencerminkan penampilan dalam kedua dimensi sekaligus, yaitu dimensi pemikiran dan dimensi amaliah. Adanya kontinuitas ini, yang sekaligus menunjukkan kuatnya sikap istiqomah para pimpinan Muhammadiyah merupakan bukti dan makna historis, bahwa prestasi kongkret Muhammadiyah selama ini menunjukkan adanya kaitan (relevansi) gerakannya dengan realitas dan tingkat peradaban masyarakat yang majemuk dari berbagai seginya.

Tingkat kemajemukan (pluralitas) masyarakat yang merupakan kenyataan social, menjadikan Muhammadiyah memilih model gerakannya secara cultural keagamaan dengan menjadikan Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber inspirasi, motivasi, misi, dan arah tujuan gerakannya, untuk dijabarkan ke dalam konsep-konsep pemikiran tentang Islam dan realitas sosio-kultural melalui penekanan dan pengutamaan gerakan-gerakan amal yang memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.

Suatu gerakan kultural jelas lebih sesuai dengan makna kemanusiaan yang memandang dan menempatkan manusia sesuai dengan fitrahnya. Karena sasaran gerakan Islam, dakwah dan amar ma'ruf Muhammadiyah ditujukan kepada manusia, baik secara perorangan maupun secara sosial, maka Muhammadiyah selama ini selalu mengutamakan pada orientasi proses. Proses dapat dirumuskan sebagai dimensi manusiawi dari perilaku dasar organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pilihan Muhammadiyah tentang model gerakannya seperti di atas yang telah dijadikan sebagai decision formil Muhammadiyah sejak KH Ahmad Dahlan sampai dengan para pelanjutnya, bukanlah tanpa alasan. Hal ini dapat kita amati dari usia Muhammadiyah sepanjang 80 tahun dengan 41 kali muktamar yang berarti 41 kali ganti periode. Suatu proses panjang dari sebuah gerakan cultural keagamaan Muhammadiyah yang ternyata selama masa itu tidak pernah ada perubahan mendasar dari Muhammadiyah mengenai model gerakannya, menunjukkan fakta dan makna histories, bahwa model yang dipilihnya adalah sesuai dengan kesadarannya yang mendalam terhadap realitas masyarakat Indonesia dan sesuai fitrah manusia serta sejalan dengan tuntunan Allah SWT di dalam Al-Quran seperti tersebut di dalam surat Ali Imran ayat 159:

“Maka disebabkan dari rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah

ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.

Dasar kesadaran realitas cultural dan kesadaran Qur’ani itulah yang menjadi dasar dan alasan, mengapa penampilan model gerakan pemikiran dan amaliah Muhammadiyah selama ini lebih mengutamakan pola-pola yang persuasive, integrative dan kooperatif terhadap lingkungan sosio-kultural dan politik. Karena itu Muhammadiyah dalam panggung sejarah pergerakannya tidak pernah mengambil jalan-jalan pintas yang bersifat eksklusif (dalam arti social maupun politis), konfrontatif terhadap struktur maupun kultur yang hanya akan berakibat timbulnya resiko berat dan besar dengan biaya social-politis yang teramat mahal. Jadi pilihan yang selama ini diambil, dipegang teguh dan tetap dirawat serta dikembangkan oleh Muhammadiyah, sesungguhnya sesuai pula dengan corak masyarakat Indonesia yang berfalsafah pancasila dan ber-Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan budaya halus/lunak daripada budaya kasar/keras.

Karena itu perlulah kita selalu bersyukur ke hadirat Ilahi, bahwa persoalan-persoalan internal maupun eksternal yang pernah dihadapi oleh Muhammadiyah selama ini banyak berhasil diatasi dan diselesaikan dengan baik, aman dan konstruktif melalui pengamalan ajaran akhlaq dan komitmen kemuhammadiyahannya yang ada serta kesadaran musyawarah. Hal inilah yang untuk masa-masa mendatang harus tetap dikembangkan bersama, yang dengan demikian Muhammadiyah akan mudah terhindar dari pengaruh dan penyelewengan berupa pola-pola pemikiran dan perilaku yang akan mengarah kepada distorsi (penyimpangan) idealisme Muhammadiyah.

Secara objektif perlu disadari bersama, bahwa akhir-akhir ini mulai terasa munculnya pemikiran-pemikiran dan perilaku-perilaku sementara kalangan dalam persyarikatan yang secara umum dapat dinilai akan menimbulkan gejala-gejala baru berupa distorsi nilai-nilai akhlaq dan pudarnya komitmen (sikap memiliki dan membela/memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah). Gejala ini, kendatipun masih dalam taraf awal, tetapi sudah terasa pengaruhnya yang negatif. Dilihat dari aspek kepemimpinan, gejala tersebut bisa merupakan kendala (hambatan) bagi upaya untuk menjaga keutuhan dan pengembangan persyarikatan, dan sebaliknya akan tumbuh perilaku baru yang tidak sejalan dengan nilai-nilai akhlaq dan idealisme Muhammadiyah, seperti sikap tidak selektif terhadap informasi, sikap tidak mandiri/ketergantungan, takabur, meremehkan sesama pimpinan, mengabaikan/menelantarkan kepentingan persyarikatan untuk kepentingan lain yang tidak sejalan atau bertentangan dengan misi dan tujuan persyarikatan. Pudarnya rasa tanggungjawab terhadap amanat dan berbagai penyimpangan-penyimpangan lain yang ujungnya akan mengoyak-koyak dan memecah belah Muhammadiyah justru dari sisi dalam.

Sebagai gerakan yang beraqidah Islam, adanya gejala-gejala baru yang tidak konstruktif tersebut harus dihadapi oleh para pemimpin sebagai realitas yang memprihatinkan, namun antisipasinya haruslah selalu berorientasi kepada prinsip-prinsip keyakinan perjuangannya, ialah dengan tetap dan terus berusaha secara terpadu dan terprogram dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas pimpinan secara menyeluruh, baik pimpinan persyarikatan di tingkat pusat, wilayah, daerah sampai dengan cabang, ranting, majelis, ortom, badan, lembaga, dan amal usaha yang berada dalam baarisan Muhammadiyah. Dengan berorientasi pada proses, maka langkah antisipasi terhadap

berbagai perilaku menyimpang tersebut, harus tetap dilakukan dengan cara-cara yang makruf.

II

Dengan mengambil hikmah (pelajaran) dari sejarah perjuangan Muhammadiyah di atas, maka untuk tetap menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar yang bercirikan tajdid fil Islam, kiranya harus tetap dijaga dan ditingkatkan konsistensi dalam mengutamakan peningkatan mutu pimpinan yang memegang teguh prinsip hakekat Muhammadiyah, dan kemampuannya mencerminkan keteladanan akhlaq, pemikiran dan amal dalam menggerakkan Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya. Pimpinan yang memiliki kualitas semacam itulah yang akan menjamin perjuangan Muhammadiyah tetap konsisten di atas prinsip dan hakekat gerakannya, sekaligus mampu mengarahkan Muhammadiyah dalam menjawab tantangan masa depannya dalam realitas social, politik, dan budaya masyarakat modern yang kompleks serta sarat dengan berbagai kesenderungan barunya, Muhammadiyah memerlukan kualitas pimpinan yang pada satu segi benar-benar memahami dan menghayati ajaran Islam secara mendalam dan menyeluruh (kaafah), dan dalam waktu yang sama berkemampuan menampilkan kepemimpinannya secara konsisten dan konstruktif untuk mewujudkan ajaran Islam itu dalam realitas kehidupan masyarakat moderen sebagaimana yang menjadi misi dan tujuan Muhammadiyah. Pemimpin yang demikian akan mampu menjadi teladan (uswah hasanah) sekaligus mampu mengarahkan umat serta masyarakat modern yang religius (agamis) sesuai misi dan tujuan Muhammadiyah. Dengan sikap positif ini, seorang pimpinan, termasuk pemikiran-pemikirannya tidak akan terasing dari berbagai prcaturan pemikiran yang semakin deras dalam masyarakat modern, bahkan ia akan mampu menjadi teladan dan pengarah dalam menghadapi arus kehidupan modern itu.

III

Dari gambaran pemikiran, uraian dan permasalahan di atas, maka yang terpenting adalah bagaimana pola kebijakan Muhammadiyah di bidang yang paling strategis dan mendasar yaitu kepemimpinan. Dengan kebutuhan kita akan format (bentuk) kepemimpinan seperti di atas, maka pola kebijakan dimaksud perlu dikembalikan kepada landasan dasarnya terlebih dahulu agar dengan demikian tidak terjadi kekaburan apalagi kehilangan dasar dan arahnya. Landasan dasar dimaksud adalah kembali kepada hakekat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercirikan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid fil Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengenai format pemahaman Islam dalam Muhammadiyah dengan jelas terdapat dlam rumusan-rumusan Muqaddimah Anggaran Dasar, Masalah Lima, Kepribadian, Khittah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, di samping yang telah diteladankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para pemimpin Muhammadiyah sesudah beliau. Dengan demikian konsep peningkatan kualitas pimpinan hendaknya selalu mengacu (mendasarkan) kepada berbagai rumusan tersebut.

Di samping perlunya landasan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, untuk memperoleh gambaran tentang criteria ideal pimpinan Muhammadiyah dalam perspektif masa depan, perlu adanya pendekatan terhadap beberapa masalah dan pemikiran mengenai dinamika kehidupan bangsa dan pembangunan Nasional, kehidupan umat Islam dan Muhammadiyah pada khususnya.

BAB II

PENINGKATAN WAWASAN PEMIKIRAN

1. Permasalahan Global

Seluruh peradaban manusia menjelang abad ke-21 ini menghadapi suatu tantangan berat. Tidak dapat dibantah bahwa perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ternyata memiliki dimensi manfaat dan sekaligus mudlarat.

Aspek positif perkembangan IPTEK antara lain meliputi:

- a. Makin terkuaknya berbagai rahasia alam karena bertambahnya kepekaan manusia dalam memahami segenap realitas.
- b. Menambah kemampuan manusia untuk meningkatkan daya dukung sumber daya alamiah.
- c. Memperlancar komunikasi antar bangsa sehingga terjadi akulturasi budaya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
- d. Menambah tingkat kenyamanan hidup materiil, jauh melampaui apa yang pernah dicapai manusia sekitar setengah abad yang lalu.

Namun demikian kemajuan IPTEK tidak cukup jika hanya dilihat dari sudut manfaatnya, di dalam realitasnya, pada waktu yang sama peradaban manusia dihadapkan pada kenyataan:

- a. Bertambah rakusnya manusia untuk mengejar apa saja yang telah dijanjikan oleh filsafat positivisme, yakni memburu kemakmuran fisik materiil. Eksploitasi alam dan sumber daya secara berlebihan mengakibatkan makin rusaknya ekosistem, yang pada giliran berikutnya dapat mengancam masa depan kelestarian alam.
- b. Munculnya persaingan tidak sehat untuk memperebutkan aset-aset ekonomi, yang kemudian menimbulkan globalisasi ekonomi dan ketergantungan absolut negara-negara kecil kepada negara-negara besar.
- c. Disparitas (jarak) antara negara maju dan negara terbelakang dan sedang berkembang ditandai oleh dominasi negara yang tersebut pertama terhadap negara yang tersebut belakangan pada hampir segala segi kehidupan.
- d. Kalkulasi rasionalitas ekonomi dan administrasi yang dijadikan pertimbangan satu-satunya dalam memberi bobot bagi segala aktivitas manusia makin menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral-spiritual, yang ditandai oleh sekularisasi dan desakralisasi segeap tatanan peradaban modern.
- e. Timbulnya berbagai perilaku menyimpang sebagai bagian tak terpisahkan dari peradaban materialistic, serba mewah dan individualistic, yang dapat mengancam segala tatanan yang mapan serta akan menjungkirbalikkan segala nilai suci. Kehidupan makin ditandai oleh gejala alienasi, kehampaan nilai dan serba relatif.
- f. Perang nuklir merupakan rasio yang terberat manakala perkembangan IPTEK makin dijauhkan dari kendali moral dan agama, yang akibatnya dapat menghancurkan segala umat manusia dan segenap isi jagad raya.

2. Permasalahan Nasional

Bangsa Indonesia kini sedang berpacu mengejar ketinggalan di bidang IPTEK. Pembangunan selama 20 tahun terakhir telah mampu memberikan daya dukung dalam proses akselerasi modernisasi. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5 (lima) persen per tahun selama Orde Baru bangsa Indonesia telah berhasil mengatasi kemelut ekonomi, yang oleh berbagai badan dunia telah pula diakui sebagai salah satu negara berkembang yang dapat mengatasi berbagai

rintangan pembangunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Dengan kata lain sampai tahun pertama PELITA V bangsa Indonesia telah memiliki landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi.

Di bidang politik harus pula diakui, kehidupan politik yang stabil sudah menjadi cirri pokok format politik Orde Baru, dan dalam batas-batas tertentu bangsa kita juga telah mampu melakukan langkah-langkah strategis dalam menciptakan infra dan suprastruktur politik dalam rangka pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu cirinya yang lain, ialah terciptanya pemerintahan yang stabil dan kuat.

Begitu pula pada aspek social budaya, aktivitas pembangunan telah memberikan dasar-dasar yang memadai untuk mengaktualisasikan potensi budaya bangsa. Angka-angka statistik menyangkut berbagai segi pada dimensi social-budaya menunjukkan grafik yang meningkat dari PELITA I sampai ke PELITA V. Di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan social, keluarga berencana, pengembangan IPTEK dan budaya yang menunjukkan adanya hasil-hasil yang menggembirakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tidak jauh berbeda situasinya dengan segi-segi yang telah disebutkan di muka, dalam lapangan keagamaan pun bangsa kita telah dapat membangun rumah peribadatan, kelembagaan agama dan saling pengertian antar umat beragama.

Namun demikian, setiap kemajuan yang dicapai tentu akan diikuti oleh kelemahan yang inheren di dalamnya. Beberapa butir berikut dapat menggambarkan sisi kelemahan yang perlu kita carikan jalan pemecahannya di dalam meneruskan program pembangunan di masa depan:

- a. Di bidang ekonomi tuntutan dan pemerataan sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan makin meningkat. Pembangunan yang lebih berorientasi untuk mengangkat martabat golongan lemah harus lebih diprioritaskan, agar proses dan hasil pembangunan benar-benar memihak pada semua warganegara, sehingga keadilan ekonomi seperti dimaksud pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi kenyataan.
- b. Aspek politik yang perlu memperoleh penekanan adalah:
 - Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta di dalam segenap proses politik sesuai dengan hak-haknya.
 - Mengembangkan budaya politik partisipatif, egaliter/demokratik dan terbuka.
 - Mendorong infrastruktur politik dan ORMAS dapat berperan aktif sebagai kekuatan yang mampu mendidik kesadaran dan kepekaan politik rakyat dan sekaligus dapat melakukan kontrol social dan politik.
- c. Di lapangan social-budaya perlu kebijakan yang dapat memacu masyarakat untuk dapat memenuhi panggilan hidup sebagai warga negara yang memiliki aspirasi dan kepentingan yang makin beragam, sebagai realisasi dari upaya meningkatkan martabat hidup.

3. Permasalahan Umat Islam

Sebagai golongan mayoritas maka persoalan yang dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia hampir dapat diidentikkan sebagai masalah umat Islam pula. Melalui pembangunan selama ini tentu saja realitas umat Islam sekaligus menunjukkan adanya tanda-tanda ke arah kemajuan atau optimistik di satu pihak, tetapi tidak pula dapat dibantah bahwa melalui pembangunan ada pula umat Islam yang

mengalami proses marginalisasi. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa seandainya umat Islam dapat lebih memanfaatkan momentum pembangunan di masa mendatang, terbuka peluang bagi mereka untuk bersaing dengan umat beragama lainnya.

Secara spesifik persoalan pokok umat Islam di Indonesia berkisar di sekitar:

- a. Meningkatkan partisipasi aktif di dalam pembangunan pada umumnya.
- b. Mengaktualisasikan pembangunan yang berwawasan ke-Indonesiaan tetapi sekaligus juga Islami, yakni kehidupan yang dilandasi dengan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai transendental-Islami, sebagai salah satu concern utama (kepribadian yang mendalam) dan sekaligus sebagai kepentingan yang harus direalisasikan di dalam praksis pembangunan.
- c. Mengupayakan tumbuh-suburnya iklim berfikir keagamaan sebagai prasyarat untuk teraktualisasikannya nilai-nilai dan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Menghidupsuburkan suasana kehidupan religius yang mengutamakan kebersamaan/kesetiakawanan sosial dalam segenap lingkungan masyarakat.
- e. Meningkatkan posisi umat Islam dalam persaingan memasuki lapangan kerja, termasuk di dalamnya memajukan pendidikan umat Islam serta ketrampilan profesional.
- f. Mengaktifkan lembaga Islam yang sudah ada dan melakukan diversifikasi kelembagaan untuk mewadahi berbagai aspirasi dan kepentingan umat Islam yang makin beraneka ragam.

4. Permasalahan Muhammadiyah

Dalam memasuki usia ke-80, Muhammadiyah telah menunjukkan prestasi dan peranan yang cukup besar dalam pembaharuan kehidupan umat Islam maupun dalam sejarah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga Muhammadiyah dipandang sebagai gerakan Islam modern dan pembaharuan terbesar di dunia Islam. Keberhasilan Muhammadiyah antara lain dalam pembaharuan pemikiran Islam dengan mengembalikan pada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan As-Sunnah dan dengan mengembangkan tajdid, modernisasi pendidikan, mengembangkan sikap dan pemikiran yang apresiatif terhadap kemajuan, modernisasi gerakan Islam melalui pengembangan manajemen dan organisasi modern, dan dalam meningkatkan kualitas hidup umat dan masyarakat melalui gerakan Amal Usahnya di bidang pendidikan, kesejahteraan umat pelayanan social, membangun sarana dan prasarana fisik dan upaya-upaya dakwah lainnya baik yang bersifat *bilisanil-qaul* maupun *bi-lisanil-hal*.

Prestasi dan peran yang demikian besar itu menunjukkan bahwa arah dan misi gerakan Muhammadiyah adalah relevan dalam menjawab tantangan permasalahan yang dihadapi sebagai porwujudan dari pemahaman dan pengamalan Islamnya. Hal demikian juga sebagai modal bagi Muhammadiyah bahwa sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Dakwah Muhammadiyah memiliki misi dan arah yang benar dan peluang yang cukup besar dalam menjawab tantangan dan permasalahan umat, masyarakat, dan bangsa di tengah kehidupan dunia modern diwasa ini bahkan untuk masa-masa mendatang, dengan tetap menuntut pembaharuan-pembaharuan langkah gerakannya sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Islam yang diyakininya.

Dalam lima tahun terakhir ini, sejak Muktamar ke-41, perkembangan Muhammadiyah menunjukkan kemajuan-kemajuan lebih berarti dan dapat dikembangkan lebih lanjut pada periode-periode mendatang. Di antara kemajuan-kemajuan yang berarti itu adalah:

- a. Dalam perjuangan cita-cita ditandai dengan semakin meningkatnya semangat dan tekad dari warga dan pimpinan Muhammadiyah di hampir seluruh tingkatan untuk membawa Muhammadiyah ke arah yang lebih maju, lebih baik dan lebih berkualitas di masa mendatang, yang disertai langkah-langkah kongkrit guna mewujudkannya.
- b. Dalam pemikiran ditandai dengan semakin berkembangnya ide-ide, gagasan-gagasan, konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan forum-forum kajian yang lebih maju sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan Muhammadiyah selain sebagai gerakan amal, juga sebagai gerakan pemikiran dan kebudayaan, sebagai perwujudan dari peran dan keberadaan dirinya sebagai Gerakan Islam.
- c. Dalam Gerakan Amal Usaha ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) Amal Usaha Persyarikatan dengan kecenderungan adanya upaya-upaya serius untuk meningkatkan kualitas guna mengejar ketinggalannya dari kemajuan kuantitas.
- d. Dalam bidang organisasi ditandai dengan semakin meningkatnya upaya-upaya konsolidasi, selain maki meningkatnya pelaksanaan program Persyarikatan yang diwujudkan oleh Majelis, Badan, Lembaga, dan Organisasi otonomnya.
- e. Dalam pengembangan masyarakat selain yang menjadi bidang garap Amal Usaha Muhammadiyah, ditandai dengan perintisan dan pengembangan program-program peningkatan kehidupan social ekonomi masyarakat bawah di pedesaan dan daerah suku terasing, masyarakat transmigrasi, dan sebagainya.
- f. Dan kemajuan-kemajuan lainnya seperti di bidang sarana dan prasarana fisik, dan lain-lain.

Namun di tengah kemajuan yang dicapai itu, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan antara lain:

- a. Berbagai pemikiran yang berkembang tampak masih belum terintegrasi sebagai pemikiran Muhammadiyah, sehingga jika proses integrasi ini tidak tercipta akan dapat menimbulkan polarisasi pemikiran di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah.
- b. Berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki Muhammadiyah, seperti sumberdaya ulama, praktisi, intelektual, potensi kader dan angkatan muda Muhammadiyah dan potensi-potensi keahlian dari pimpinan dan warga Muhammadiyah, belum dikembangkan secara optimal dan terpadu sesuai dengan porsi masing-masing untuk kepentingan gerakan Muhammadiyah.
- c. Pengembangan kualitas Amal Usaha Muhammadiyah kalah cepat oleh perkembangan kuantitas, selain dalam kadar tertentu perkembangan Amal Usaha tersebut sering di luar kemampuan pengendalian Persyarikatan.

Dari uraian di atas, sudah saatnya disadari bersama perlunya *concern* utama warga Muhammadiyah untuk menjadikan agenda di atas sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan dalam konsep peningkatan kualitas pimpinan dan anggota. Bisa ditegaskan bahwa sikap yang antisipatif terhadap agenda di atas, akan merupakan langkah pemikiran baru dari pengembangan makna tajdid fil Islam dalam Muhammadiyah, di mana selama ini predikat tajdid dalam Muhammadiyah telah

bersifat apresiasi dan antisipatif terhadap berbagai realitas masyarakat.

Betapa begitu kompleksnya permasalahan pembangunan nasional, kehidupan umat Islam dan Muhammadiyah sendiri, kiranya perlu lebih difahami dan dihayati bersama, bahwa bagi Muhammadiyah pada masa mendatang, khususnya menghadapi tahun 2000 dengan gambaran corak dan kecenderungan barunya, perlu kapasitas pemikiran (*intelektual force*) kita untuk lebih mengembangkan dan menjabarkan hakekat Islam sebagai Rahmatan Lil 'Alamin ke dalam berbagai komitmen-komitmen baru terhadap agenda besar bangsa kita serta agenda peningkatan kualitas derajat umat sebagai mayoritas.

Jika dalam sejarahnya selama ini Muhammadiyah selalu menampilkan dirinya secara kooperatif (menghindarkan munculnya berbagai gejolak sosial politik keamanan) dan menyajikan program pencerdasan bangsa di bidang social keagamaan dan pendidikan cultural, hal mana telah berhasil dengan baik yaitu menciptakan kondisi nasional berupa terintegratifnya antara Muhammadiyah dengan berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah, maka untuk masa-masa mendatang perlu dijaga secara selektif, agar pemikiran-pemikiran dan perilaku pimpinan/ anggota Muhammadiyah tetap selalu dalam kerangka pengkokohan negara kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam rangka terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Hal ini memerlukan upaya-upaya yang mendasar dari Muhammadiyah, ialah untuk terus menerus menciptakan kondisi dan situasi umum yang secara politis dan cultural dapat mendukung tercapainya pembentukan watak dasar manusia Indonesia, ialah manusia yang berjatidiri sebagai makhluk (ciptaan) Allah SWT. Dengan upaya dan langkah-langkah seperti ini. Insya Allah persyarikatan kita akan terhindar jauh dari berbagai pengaruh-pengaruh luar yang secara sosiokultural dan politis akan membawa persyarikatan pada posisi yang tidak menguntungkan.

BAB III

PENINGKATAN KUALITAS IDEALISME

Yang dimaksud idealisme Muhammadiyah ialah mencakup pengertian tentang wawasan teologis yang menjadi pedoman dan pengarah Perjuangan Muhammadiyah seperti yang telah dirumuskan di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Kepribadian, dan Khittah Perjuangan Muhammadiyah (Putusan Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya).

Muhammadiyah adalah nama persyarikatan yang didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan, organisasi yang kita berada di dalamnya. Beliau menamakan organisasi yang didirikan itu dinisbatkan dengan nama Nabi kita, pastilah dengan maksud tertentu, yang dengan mudah dapat kita pahami. Dahulu beliau menjelaskan bahwa orgnisasi itu diberi nama Muhammadiyah, tidak lain untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammd saw. Dari penjelasan beliau itu sudah jelas bahwa ajaran Nabi Muhammad saw. itu perlu diamalkan dengan organisasi agar lebih tertib dan berkesinambungan, dikerjakan dan menjadi tanggungjawab bersama-sama serta tidak hanya dikuasai oleh satu kelompok orang.

Karena menggunakan nama Nabi yang Pesuruh Allah itu, maka Muhammadiyah mempunyai makna yang hakiki, yang dapat kita namakan hakekat Muhammadiyah. Semua kepribadian dan perilaku Nabi Muhammad saw. itulah Muhammadiyah. Semua akhlaq dan akwahnya yang mengantar manusia kepada jalan hidup yang benar dan diridhai Allah, itulah Muhammadiyah. Dengan demikian Muhammadiyah merupakan

satu totalitas, satu keseluruhan, yang mencerminkan sunnah Rasulullah saw. Persyarikatan Muhammadiyah membawa kewajiban dan tanggungjawab yang berat bagi siapa saja yang berada di dalamnya, terutama pemimpin. Inilah yang pertama harus dipahami dan disadari oleh semua warga Muhammadiyah. Orang masuk Muhammadiyah harus dengan niat untuk beramal dan beribadah sesuai tuntunan Muhammad Rasulullah saw. dengan mengharapkan ridha Allah.

Oleh sebab itu setiap orang Muhammadiyah terutama pemimpinnya, harus menyadari hal itu dan harus insyaf bahwa dirinya dituntut oleh Allah untuk berusaha semaksimal mungkin meneladati akhlaq Rasulullah saw. Oleh sebab itu wajib rajin beribadah, dermawan, sopan santun, benar-benar menyediakan diri dan kemampuannya untuk melakukan tugas dan tanggungjawab organisasi. Tulus ikhlas dan jujur serta teguh memegang amanah, termasuk dalam bidang keuangan. Harus senantiasa sadar bahwa bagaimanapun kecil perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wata'ala.

Di samping itu falsafah perjuangan Rasulullah saw. wajib dipelajari dengan cermat karena di sanalah tergambar Risalah Islamiyah dengan jelas, yang akan mengantarkan umat Islam kepada kejayaan. Agama Islam adalah motivasi dan pengarahan. Dari titik tolak ini jelas bahwa syariat Islam, baik yang berupa ibadah maupun mu'amalah, tidaklah selesai jika hanya dilaksanakan secara parsial (sebagian), karena Syariat Islam itu mempunyai tujuan tertentu yakni membina pelakunya kepada kemajuan kondisinya baik jasmaniah ataupun rohaniyah serta sekaligus mengarahkan dia kepada tujuan tertentu yang lebih maju. Dari sebab itulah maka agama Islam sekaligus juga merupakan Risalah Islamiyah kepada posisi dan kondisi yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya.

Maka agar tuntunan-tuntutan, kewajiban-kewajiban, dan kualitas warga Muhammadiyah, terutama pemimpinnya, sebagaimana dimaksud terpenuhi sebgatlah diperlukan adanya upaya peningkatan dalam memahami hakekat Muhammadiyah disertai pelaksanaannya secara konsisten. Upaya peningkatan kualitas pimpinan terhadap hakekat Muhammadiyah tersebut secara khusus menyangkut pembinaan "idealisme", yang tidak lain sebagai upaya peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah dan memperjuangkannya dalam kerangka gerakan Muhammadiyah.

Peningkatan kualitas idealisme pimpinan dimaksud prinsip-prinsipnya menyangkut hal sebagai berikut:

1. Pembinaan Muhammadiyah dengan focus Peningkatan Kualitas Pimpinan diarahkan kepada "bagaimana agar Muhammadiyah mampu mewujudkan identitasnya", seperti yang dirumuskan dalam A. D. Muhammadiyah Pasal 1 ayat (1): "Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah, adalah gerakan Islam dan Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah."
2. Kunci keberhasilan untuk mencapai maksud tersebut akan sangat ditentukan oleh keberhasilan pembinaan terhadap personalia Persyarikatan terutama pemimpin dan pemimpinnya, berdasar pola dasar pembinaan Muhammadiyah.
3. Apabila Muhammadiyah telah mampu mewujudkan identitasnya dengan sebaik-baiknya, barulah Muhammadiyah akan mampu melaksanakan misinya dalam rangka perjuangan mencapai maksud dan tujuannya.
4. Untuk menyukkseskan maksud tersebut, anggota Muhammadiyah terutama pemimpin dan pemimpinnya harus memahami identitas Muhammadiyah seperti yang tersebut dalam A. D. Muhammadiyah Pasal 1 ayat (1) tersebut dengan setepat-tepatnya lagi

secara seragam dan kemudian mewujudkan dengan sepenuh-penuhnya. Hakekat Muhammadiyah pokok esensinya adalah “identitas Muhammadiyah” itu sendiri.

5. Anggota Muhammadiyah apabila telah mampu memahami hakekat Muhammadiyah yang pada pokok esensinya adalah “identitas Muhammadiyah” dimaksud, dengan memahami A. D. Muhammadiyah lebih lanjut akan tahu “maksud dan tujuan Muhammadiyah”, yaitu: “Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.”
6. Untuk pengarahannya dan panduan perjuangan Muhammadiyah agar bisa lurus, tidak menyimpang dan selanjutnya untuk menyusun teori/khittah perjuangannya serta untuk merumuskan program dan rencana kerjanya bahkan juga untuk pendayagunaan seluruh potensi yang telah terhimpun dan terorganisir, sangat diperlukan adanya rumusan yang kongkrit, menyeluruh dan gamblang mengenai apa dan bagaimana sebenarnya “Masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.” yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah berdasarkan/bersumber ajaran Al-Qu`an dan Sunnah (Al-Islam).
7. Sebelum konsep “Masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.” dapat disiapkan, dewasa ini kiranya yang tidak kalah pentingnya untuk dirumuskan adalah: “Pola dasar pembinaan Muhammadiyah” yang selanjutnya untuk dijadikan pengarahannya dalam meningkatkan kualitas pemimpin dan pimpinan Muhammadiyah.
8. Berpegang kepada ayat 207 dan 208 surat Al-Baqarah terdapat penegasan bahwa dalam memasuki agama Islam, haruslah secara total/utuh. Antara lain yaitu apabila kita telah berpegang kepada ide-ide prinsip yang berdasarkan ajaran-ajaran Agama Islam, maka untuk mewujudkan/merealisasikannya haruslah berpedoman pula pada petunjuk-pengarahannya dari ajaran agama Islam itu.
9. Perjuangan untuk mencapai maksud dan tujuan “Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.” yaitu perjuangan mewujudkan “Baladun Thayyibatun wa rabbun Ghafur” adalah termasuk ide agama Islam sekaligus juga prinsip Agama Islam.

Berhubungan dengan itu, untuk keberhasilan dalam realisasinya harus berdasarkan petunjuk-petunjuk dan ajaran Islam juga. Dalam hal ini yaitu seperti tersebut dalam Surat Ali Imran ayat 101 pertama sampai ayat 104 dan lebih lanjut sampai ayat 112.

Terjemahannya:

101. ... dan barangsiapa beri'tisham kepada (tali agama) Allah, maka sungguh ia pasti ditunjuki jalan yang lurus.

102. Wahai orang-orang yang telah beriman, perhatikanlah: “bertaqwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan ber-Islam.”

103. Dan beri'tishamlah kalian kepada tali (agama) Allah secara bersama-sama dan janganlah kalian berpecah-belah. Ingatlah kalian akan nikmat Allah atas kalian yaitu ketika keadaan kalian dahulu orang-orang yang bermusuhan, maka Allah telah menghimpun di antara hati hati kalian lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Dan juga ketika keadaan kalian dahulu telah berada di tepi jurang api neraka, maka Allah telah menyelamatkan kalian

daripadanya. Seperti itulah Allah menerangkan kepada kalian akan ayat-ayat-Nya, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk.

104. Dan hendaklah ada kalian/sebagian dari kalian itu umat (kelompok orang yang terorganisir oleh ikatan kesamaan tujuan) yang sama-sama melakukan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang bahagia (jaya).

Tafsirnya:

- a. Ayat 101 tersebut adalah penegasan Allah SWT. pada saat Rasulullah saw. bersama-sama sahabatnya berjuang untuk memenangkan/menegakkan Agama Islam menghadapi orang-orang Ahli Kitab yang berjuang untuk menegakkan keyakinan dan cita-cita hidup mereka masing-masing.
- b. Ayat 102 s.d. 104 adalah petunjuk pengarahannya Allah untuk keberhasilan dalam beri'tisham kepada Agama Allah, yaitu:
 1. Pembinaan ketaqwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya Taqwa kepada-Nya dengan ber-Islam yang sebenar-benarnya sepanjang hidupnya.
 2. Perjuangan berpegang teguh kepada agama Allah untuk memenangkannya menuntut kemampuan mengkonsepsikan ajaran-ajarannya dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia/masyarakat.
 3. Selanjutnya perjuangan tersebut menuntut kesanggupan menghimpun potensi secara total dan kompak.
 4. Sesudah itu dituntut kemampuan untuk mengorganisir potensi tersebut dengan sebaik-baiknya.
 5. Kemudian harus mampu mendayagunakan potensi yang telah terorganisir itu untuk melaksanakan tugas dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar.

Rumah "pola dasar" Pembinaan Muhammadiyah.

Dari rangkaian ayat-ayat tersebut dapat dirumuskan pola dasar pembinaan Muhammadiyah dalam perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. sebagai berikut:

- a. Penanaman keyakinan yang mendalam dan kokoh kuat akan kebenaran janji Allah bahwa barangsiapa beri'tisham kepada (tali agama) Allah pasti diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
- b. Pembinaan ketaqwaan kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya dengan ber-Islam yang sebenar-benarnya sepanjang hidupnya.
- c. Peningkatan kemampuan untuk mengkonsepsikan ajaran agama Islam dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan pribadi dan masyarakat.
- d. Penghimpunan potensi umat secara total dan kompak.
- e. Pengorganisasian potensi yang telah terhimpun dengan sebaik-baiknya dan seefektif-efektifnya.
- f. Pendayagunaan potensi yang telah terorganisir untuk tugas perjuangan "Dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar" dengan manajemen yang baik dan tepat.

Pola dasar tersebut adalah untuk landasan dan pengarahannya peningkatan pembinaan kualitas Pemimpin dan Pimpinan Muhammadiyah.

Adapun ayat 105 s.d. 112 adalah petunjuk pengarahannya Allah SWT. dalam perjuangan Islam lebih lanjut, yaitu sesudah perjuangan dalam tahap pertama tersebut berhasil.

Maka dengan landasan dan arah pemahaman hakekat Muhammadiyah dalam memahami dan mengamalkan Islam sebagaimana menjadi misi dan tujuan Muhammadiyah seperti dimaksud di atas, seyogyanyalah dilakukan pembinaan kualitas pimpinan Muhammadiyah terutama yang mencakup aspek idealisme sesuai pengertian dimaksud.

BAB IV

PENINGKATAN KUALITAS AKHLAK

1. Akhlak Kepemimpinan

Adalah sudah sunnah Ilahi, bahwa setiap makhluk terutama manusia selalu ada apa yang disebut pemimpin dan yang dipimpin, agar kemauan dan pendapat tidak menjadi berserak-serak, yang pada gilirannya menimbulkan perpecahan, perselisihan, dan rusaknya hubungan dan ikatan. Setiap kelompok yang tidak memiliki pemimpin, kepada siapa orang kembali kepadanya dalam memecahkan kesulitan, niscaya akan mengalami kekacauan dan kerisauan, bahkan kebingungan.

Pemimpin bagi sekelompok orang, adalah merupakan jiwa dan nyawanya. Kalau pemimpin baik, maka akan baiklah kelompok itu, sebaliknya kalau pemimpin rusak maka akan rusak pulalah kelompok itu. Pemimpin adalah merupakan penegak yang jika kelompok itu jatuh tergelincir, dia akan membangunkan; jika kelompok tersesat maka dia akan menunjukkan jalannya; jika kelompok itu terjatuh maka dia akan menolongnya.

Kelompok tanpa pemimpin akan mengalami keruntuhan. Namun dalam kelompok yang terlalu banyak peminat yang ingin memimpin, akan lebih menderitanya. Minat untuk menjadi pemimpin adalah satu hal, sedang kemampuan untuk memimpin merupakan hal yang lain sama sekali.

Pemimpin harus memiliki akal yang sehat, memiliki kecerdasan yang memadai, berilmu dan berpengalaman, peka dan memiliki keperwiraan serta harga diri. Di samping itu dia juga harus memiliki dedikasi, kejujuran, keberanian dan sanggup berkorban untuk kelompok yang dipimpinnya. Mereka yang tidak memiliki karakter seperti tersebut di atas, akan lebih baik tidak memaksa diri menjadi pemimpin.

2. Pemimpin Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah persyarikatan di mana orang menyatu karena adanya kesamaan. Sama dalam akidah dan keimanan, sama pula dalam keinginan menuju cita-cita hidupnya. Karena itu Muhammadiyah sebagai persyarikatan juga perlu memiliki pemimpin dan pimpinan. Yaitu pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan, pimpinan yang mampu menjalankan kepemimpinannya.

Di kalangan Muhammadiyah pada akhir-akhir ini sering terasa adanya kegoncangan dalam masalah pemimpin dan kepemimpinan. Dalam satu bidang, kadang-kadang terasa adanya minat yang kelewat besar dari seseorang untuk memimpin, sehingga terjadi saling berebut, dan malahan saling jatuh-menjatuhkan, saling fitnah memfitnah dan saling siasat menyiasati satu dengan yang lain. Tragisnya, hal yang demikian terjadi justru dalam bidang yang telah menjadi kebanggaan karena suksesnya seseorang menangani bidang tersebut.

Diharapkan bahwa pada masa mendatang akan muncul pemimpin dan pimpinan dalam Muhammadiyah yang sungguh-sungguh merupakan Manusia Mukhlisun dan Muslikhun. Bukan manusia Fasaqoh yang rendah, pembawa fitnah dan kemaksiatan, bukan pula manusia bejat akhlak kekasih syetan.

Sudah menjadi sifat pembawaan, bahwa semua orang pada dasarnya suka memimpin. Namun sebenarnya yang berhak memimpin adalah hanya sedikit. Pemimpin bukanlah benda yang dapat diperjualbelikan, dan bukan pula merupakan pakaian yang setiap orang memakainya adalah sekaligus menjadi pemimpin. Demikian juga dalam Persyarikatan Muhammadiyah, yang mendambakan Matsalul A'la yang sangat tinggi, sebagaimana telah dengan mapan dilukiskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, Khittah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, dan Kepribadian Muhammadiyah.

Sifat pemimpin dan pimpinan dalam Muhammadiyah bukan sesuatu yang mudah dibuat, apalagi dibuat-buat semacam pemimpin karbitan. Bukan pula pemimpin yang dibutuhkan dalam Muhammadiyah, mereka yang sanggup mengeluarkan sejumlah uang, menebar orang-orangnya berkampanye, untuk mendapatkan simpati dari orang banyak, agar berbaris di bawah bendera kepemimpinannya. Bukanlah macam itu pemimpin yang dibutuhkan dalam Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah dipimpin oleh orang yang demikian, niscaya yang dicari oleh Muhammadiyah tidak akan pernah ketemu, sedang yang ketemu adalah yang sama sekali tidak dicari.

Pemimpin yang dibutuhkan Muhammadiyah adalah mereka yang sungguh-sungguh memiliki Akhlak Kepemimpinan yang tinggi. Dia memiliki akhlak Islami dan sekaligus Qur'ani. Berjiwa bersih, jujur dan bercita-cita tinggi, cerdas, arif, sabar, harga diri, berkharisma dan percaya diri. Pemimpin Muhammadiyah yang demikian, niscaya akan mampu menyatukan umat Muhammadiyah dalam berjuang, mampu pula menyentuh hati untuk berkorban, ditaati semua ajakan dan ucapannya.

Pemimpin Muhammadiyah sebaiknya bukan mereka yang berminat merebut kursi pimpinan. Tetapi yang lebih baik, adalah mereka yang apabila kepercayaan telah diberikan, tidak menghindar dan menyingkir. Bagi mereka itu, beramal dalam Muhammadiyah akan tetap dan mantap, baik ia dipercaya sebagai pemimpin ataupun sebagai yang dipimpin. Kalau ia sedang memimpin, akan selalu bersifat tawadlu', lembut, sederhana, cinta-kasih, tidak congkak, tidak takabur. Dan akan pandai memelihara kegembiraan dalam beramal, memelihara kedamaian dan kesejukan, dan memberi harapan keberhasilan.

Kemampuan memimpin adalah merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada seseorang, kadang tidak diberikan kepada orang lain. Kemampuan tersebut kadang diperoleh bukan karena sengaja dia belajar dan ditatar tentang ilmu kepemimpinan, namun dia telah memiliki seni kepemimpinan yang tinggi (*Art of Leadership*) yang membuahkan keberhasilan amal yang membanggakan dan patut disyukuri. Rasul Allah adalah tauladan yang sangat jelas. Dia berhasil memimpin umat, bukan karena dia memiliki pengetahuan luas tentang ilmu kepemimpinan (*leadership*), bukan pula orang yang pernah lulus dari lembaga pendidikan tentang kepemimpinan, namun ia adalah orang yang mendapatkan anugerah dari Allah.

Kalau ternyata di masa mendatang, Muhammadiyah mendapat pemimpin yang beranugerah tersebut, kita tidak perlu ragu untuk mentaati dan mengikuti langkah kepemimpinannya, menolong dan membantu melaksanakan programnya dan bukan sebaliknya kita pasang kuda-kuda untuk menghalangi dan menjatuhkannya, mendengki dan menjauhkan orang dari padanya. Dengan demikian kita berarti telah berbuat baik dan berjasa kepada umat, sehingga termasuk dalam golongan Mukhsinin.

Pemimpin atau pimpinan seharusnya selalu berusaha memiliki beberapa hal, yaitu: (a) Memahami dengan sungguh-sungguh, apa sebenarnya Muhammadiyah itu dan lebih dari itu apa sebenarnya Islam itu; (b) ikhlas; (c) beramal; (d) berjuang; (e)

pengurbanan; (f) ketaatan; (g) kemandirian; (h) persaudaraan; (i) percaya.

Dalam persyarikatan perlu juga digalakkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Beribadah dengan benar dan rajin seperti tuntunan Rasul.
- b. Membiasakan berdoa dan membaca Al-Qur'an sambil berusaha memahami artinya, suka mempelajari riwayat Rasul Allah dan juga sejarah masa lampau.
- c. Memelihara kesehatan jasmani, dengan olah raga atau lainnya, sambil menjauhi apa saja yang merusak dan mengganggu kesehatan.
- d. Memperhatikan kesehatan dan kebersihan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan tempat kerja.
- e. Berbicara benar dan menjauhi kebohongan.
- f. Memenuhi janji dan kesanggupan.
- g. Berani berterus terang dan jujur dalam kebenaran.
- h. Memiliki ketenangan dalam bersikap tawadhu' namun tidak menghinakan diri, peka terhadap yang baik dan yang buruk, bergembira terhadap yang baik, kecewa terhadap yang buruk.
- i. Bertindak adil terhadap segala hal. Kemarahan jangan menutup kebaikan, kerelaan hati jangan menutup kesalahan.
- j. Suka berjasa untuk kesejahteraan umum, merasa bersyukur setiap kali berhasil menolong orang lain, suka menengok kawan yang sedang skit dan suka meringankan derita orang meskipun hanya sekedar ucapan menghibur.
- k. Bersikap ramah dan murah hati, seka memaafkan kawan yang bersalah, lembut dan menyenangkan dalam pergaulan dengan siapapun, sambil memelihara sopan santun Islami.
- l. Suka membac buku-buku yang bermanfaat, suka menulis bagi mereka yang memang mampu menulis, mendalami ilmu bagi mereka yang memiliki keahlian bidang khusus, dan suka selalu mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, terutama yang menyangkut persoalan dunia Islam.
- m. Suka hidup dan berbuat ekonomis, dan hemat, dan tidak sungkan mengerjakan apa saja yang bermanfaat meskipun mungkin nampak sederhana.
- n. Tidak mendidik remaja-remaja kita untuk selalu bernaftsu untuk menjadi pegawai, namun kalau memang kesempatan terbuka, tidak harus ditinggalkan.
- o. Selalu berusaha mendapatkan rizki yang halal.
- p. Meningkatkan mutu etos kerja di kalangan kita sambil memajukan pembangunan, perusahaan, perindustrian, pertanian dan lain-lain.
- q. Kita semua warga persyarikatan jangan ada yang tertinggal tidak terlibat dalam usaha dakwah meski apapun dan seberapa apapun yang dapat diberikan untuk itu, entah berwujud harta atau apapun.
- r. Selalu menyempatkan diri bertaqarrub kepada Allah, mengingat akhirat, entah berwujud shalat nawafil, shalat lail, puasa sunat, dan lain-lain.
- s. Mempererat persahabatan di antara kita, dengan saling anjungsana, silaturahmi, menyapa dan menyapa, saling menolong dan membantu.
- t. Saling mengadakan mudzakaroh, sarsehan tukar fikiran tentang persoalan yang menyangkut Islam, terutama di kalangan keluarga besar Muhammadiyah.

Atas dasar prinsip-prinsip akhlak kepemimpinan dalam ber-Muhammadiyah sebagaimana disebutkan di atas, maka aspek akhlak hendaknya menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan bahkan perlu mendapat penekanan dalam peningkatan kualitas pimpinan Muhammadiyah.

BAB V

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PIMPINAN

Menyadari akan pentingnya proses pewarisan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar serta gerakan tajdid fil Islam yang menjadi amanat bagi para pemimpin dan warga Muhammadiyah yang menuntut kualitas idealisme, akhlak, dan wawasan pemikiran, maka diperlukan program peningkatan kualitas pimpinan Muhammadiyah dengan memperhatikan dua hal pokok, yaitu: (1) kebijakan rekrutmen tenaga pimpinan, dan (2) pembibitan, penyegaran, dan peningkatan kualitas pimpinan.

Sesuai dengan sifat Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, dan dengan memandang perlu akan pentingnya proses pewarisan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah sebagaimana dimaksud di atas, yang secara historis telah berhasil menempatkan dan menampilkan Muhammadiyah dalam posisi yang inheren dengan tuntunan Islam dan tuntutan perubahan serta perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara di segala bidang maka dalam langkah kebijakan rekrutmen pimpinan Muhammadiyah diperlukan hal-hal berikut:

- a. Tingkat pemahaman dan penghayatan ke-Islaman dan keteladanan pengamalannya dalam keluarga dan masyarakat.
- b. Tingkat kualitas idealisme (komitmen, loyalitas dan dedikasi dalam bermuhammadiyah)
- c. Tingkat kualitas akhlak dan wawasan pemikiran.
- d. Tingkat pengalaman organisasi di lingkungan Muhammadiyah.
- e. Memberikan kepercayaan dan kesempatan yang lebih proporsional pada unsure angkatan muda Muhammadiyah sebagai sumber daya kader utama bagi persyarikatan dengan tetap membuka peluang secara selektif bagi simpatisan yang ingin memberikan peran positifnya bagi perjuangan Muhammadiyah.

Di samping adanya pola rekrutmen tenaga pimpinan Muhammadiyah sebagaimana prinsip di atas, diperlukan juga alternatif program yang dapat dilaksanakan dalam pembibitan, penyegaran, dan peningkatan kualitas pimpinan Muhammadiyah. Mengenai alternatif program ini sesuai dengan keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-33, 37, 38, 39, 40, dan 41 yang secara tegas menyebutkan perlunya program kaderisasi secara terus menerus sebagai upaya menyiapkan kader-kader pimpinan Muhammadiyah, dan sesuai juga dengan surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 09/___/1989 tentang Pedoman Perkaderan Muhammadiyah yang menetapkan Sistem Perkaderan Muhammadiyah sebagai pedoman dan tuntunan penyelenggaraan kaderisasi dalam persyarikatan.

Maka upaya peningkatan mutu (kualitas) pimpinan Muhammadiyah dilakukan dengan penyelenggaraan kegiatan kaderisasi dan penyegaran kepemimpinan dalam Muhammadiyah melalui jenis-jenis program sebagai berikut:

1. **Darul Arqam:** yang bertujuan membentuk cara berpikir dan sikap yang sama tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Gerakan Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan Gerakan Tajdid.
2. **Baitul Arqam:** tujuannya sama dengan Darul Arqam, hanya berbeda dalam hal lama waktu penyelenggaraannya.
3. **Up-Grading:** dengan tujuan khusus peningkatan mutu kepemimpinan dalam penyamaan gerak dan langkah organisasi dan pelaksanaan program persyarikatan.

4. **Refreshing:** dengan tujuan untuk memperkaya wawasan pemikiran mengenai berbagai masalah actual yang berkembang guna mendapatkan responsi danantisipasi positif dari pimpinan.
5. **Job Training:** dengan tujuan untuk memberikan pelatihan keahlian jabatan bagi para pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan pekerja lapangan social, dakwah, dan sebagainya.
6. **Pengajian Khusus:** dengan tujuan penyatuan, pendalaman wawasan dan kajian masalah-masalah khusus ditinjau dari perspektif Islami.
7. **Pendidikan Politik:** dengan tujuan peningkatan pemahaman dan kesadaran pimpinan dalam aspek politik, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Dengan jenis-jenis program di atas (butir 1 – 7), dimaksudkan sebagai upaya persyarikatan secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar persyarikatan dalam:

1. Bidang pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas aqidah, akhlaq pimpinan agar setiap aktivitas persyarikatan (pimpinannya) dalam semua hal dapat selalu dijiwai, dilandasi dan diorientasikan kepada kesesuaiannya dengan nilai aqidah dan akhlaq Islami.
2. Bidang pembinaan, peningkatan dan pengembangan wawasan pemikiran keislaman, kemuhammadiyah, social, politik, cultural dan permasalahan-permasalahan serta pemikiran yang actual yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kehidupan bermuhammadiyah. Hal ini terasa semakin mendesak sebagai kebutuhan para pimpinan, agar setiap pemikiran maupun langkah-langkah organisasi yang diputuskan sebagai “kebijakan pimpinan Muhammadiyah” tidak hanya berdimensi internal memenuhi kepentingan Muhammadiyah saja, tetapi juga berdimensi social budaya secara luas. Kemudian untuk kepentingan kualitas kader, pembinaan di bidang tersebut di atas diharapkan akan menghasilkan kader-kader yang andal yang tidak hanya memenuhi hajat dan hasrat kaderisasi pimpinan Muhammadiyah, majelis, badan, lembaga, ortom dan amal usaha, tetapi sekaligus guna kepentingan peningkatan peran Muhammadiyah, untuk lebih dapat berperan sebagai “badan pembibitan dan pengembangan sumber daya kader” dan pemasok “*selective leaders*” bagi keperluan masyarakat, organisasi professional dan bangsa serta negara.
3. Bidang pembinaan dan pengembangan serta peningkatan profesionalisme dalam memenej Muhammadiyah. Dengan semakin besar dan berkembangnya Muhammadiyah dengan amal usahanya yang multivariasi, maka setiap pimpinan di semua eselon semakin dituntut untuk melengkapi kapasitas pengetahuan dan ketrampilan/keahliannya yang canggih dan berdisiplin untuk memenej Muhammadiyah agar tetap sesuai dengan “kepribadiannya” sekaligus mencerminkan penampilan perilaku organisasinya yang modern, tertib di bidang administrasi, komunikasi, evaluasi, dan pengembangannya selaras dengan tingkat perkembangan teknologi.

Di samping dengan pola rekrutmen dan penerapan jenis-jenis program peningkatan kualitas pimpinan/anggota tersebut, perlu juga disusun program lain yang bersifat nasional maupun regional yang mendukung secara optimal upaya menciptakan kualitas pimpinan Muhammadiyah pada masa mendatang, dengan program-program sebagai berikut:

1. Menciptakan pola hubungan antar Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang hingga Ranting berupa kunjungan Pimpinan ke bawah dengan agenda yang telah disusun

terlebih dahulu, sehingga kunjungan tersebut dapat dijadikan forum *problem solving* terhadap masalah yang berkembang.

2. Merintis pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Muhammadiyah sebagai pusat pengembangan sumberdaya insani dengan prioritas pelaksanaan yang pertama di tingkat Pimpinan Pusat dan prioritas kedua di tingkat regional dalam periode 1990 – 1995. Untuk merealisasikan program ini perlu digerakkan dan diorganisir adanya mobilisasi dana secara nasional sehingga terwujud gedung Pusdiklat yang representatif.
3. Meningkatkan kualitas sistem dan alat komunikasi antar Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.
4. Meningkatkan kader-kader AMM untuk menguasai berbagai disiplin ilmu yang diperlukan Muhammadiyah, terutama ilmu-ilmu agama dengan program-program spesialisasi dan studi lanjut.

Dengan gambaran di atas, diharapkan bahwa pada tahun 1990 – 1995 mendatang program peningkatan kualitas pimpinan Muhammadiyah yang meliputi pimpinan Persyarikatan, Majelis, Badan, Ortom, dan Amal Usaha di lingkungan Muhammadiyah dapat segera dimulai dan diwujudkan sehingga berhasil mencapai sasarannya.

Demikianlah, dengan jenis-jenis program yang sudah selesai dirumuskan dalam Buku Sistem Perkaderan Muhammadiyah dan Pedoman Pelaksanaan Perkaderan Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Badan pendidikan Kader, maka pelaksanaan program peningkatan kualitas pimpinan ini hendaknya bisa dilaksanakan secara nasional, terpadu, dan kontinyu dari tingkat Pimpinan Daerah sampai dengan tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode kepemimpinan tahun 1990 – 1995 mendatang.

Dan dengan terdapatnya keseragaman mengenai pola rekrutmen tenaga pimpinan dan penerapan penyelenggaraan berbagai jenis program kaderisasi dan peningkatan kualitas pimpinan tersebut di atas baik tingkat pusat, wilayah, dan daerah, akan terdapat proses dan mekanisme kepemimpinan persyarikatan yang tetap mencerminkan idealisme Muhammadiyah.

* * *

Lampiran 3-3 :

STRATEGI DAKWAH DALAM ERA MASYARAKAT INDUSTRI DAN INFORMASI

Makalah 1

Ada segolongan dari umatku yang senantiasa tetap teguh memegang perintah Allah; tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang tidak mau menolongnya dan tidak menyetujuinya, hingga datang perintah Allah, sedang mereka tetap menang bagi manusia (hadits)

Sisi strategi Muktamar Muhammadiyah ke-42 ini adalah ketepatan waktunya dengan persiapan bangsa Indonesia menyongsong era tinggal landas dan persiapan umat manusia memasuki abad ke-21. Tinggal landas dan abad ke-21 mungkin terdengar agak klise, tetapi sesungguhnya dua era tersebut memuat makna yang sangat serius. Antisipasi terhadap segala konsekuensi yang perlu dan yang bakal terjadi perlu dilakukan.

Dalam bidang ekonomi, era tinggal landas itu berarti terjadinya pergeseran struktur masyarakat, dari masyarakat agraris pada masyarakat industri. Meskipun oleh para ahli, pergeseran itu tepatnya diperkirakan akan terjadi pada Pelita VII, tapi gerak ke arah itu telah kian nyata bagi kita semua. Dari sudut pandang sosiologi masyarakat industri memiliki karakteristiknya sendiri, khususnya dalam hal tata nilai hubungan sosial, cara produksi, kualitas manusia yang diperlukan, di samping adanya beberapa dilemma kemanusiaan seperti abstraksi, individuasi, sekularisasi, liberalisasi dan juga futuritas.

Lebih jauh, dalam kualitas manusia, mesalnya menurut para ahli, masyarakat industri memerlukan orang-orang yang aktif dan memiliki akses informasi yang tinggi, terbuka terhadap perubahan, memandang tinggi pendidikan dan teknologi, mementingkan perencanaan, mengutamakan tanggungjawab pribadi, mengembangkan semangat *efficacy*, menghormati hak asasi dan semacamnya.

Gejala umum perubahan masyarakat dalam era industri sebagaimana berlangsung di Indonesia dalam dua dasa warsa terakhir ialah, urbanisasi besar-besaran sehingga kota-kota menjadi padat sementara desa menjadi sepi. Kemudian meningkatnya pendidikan dengan semakin banyaknya berdiri universitas dan akademi yang berarti meningkatnya taraf kecerdasan masyarakat.

Gejala itu menunjukkan bahwa berbeda dengan orang tua kita di masa lalu, manusia modern tidak lagi menyukai hidup di desa sebagai petani, satu rangsangan dari kehidupan kota yang menarik, selain mencari nafkah dan meniti karir, ialah adanya alat-alat komunikasi massa, koran, radio, televisi, dan bioskop.

Menyangkut kehidupan beragama, mitos yang berkembang ialah, masyarakat industri tidak lagi memerlukan agama. Agama menurut pendapat ini ialah tahap-tahap awal dari proses berfikir manusia yang masih hidup dalam era agraris. Kepercayaan kepada Tuhan dan pada hal yang gaib adalah akibat ketidakberdayaan manusia menghadapi kekuatan-kekuatan super natural, seperti terjadinya bencana alam, gempa bumi, banjir, dan lain-lainnya. Kemudian setelah tibanya era industri dan berkembangnya

teknologi, kepercayaan kepada Tuhan dan yang gaib itu akan hilang dengan sendirinya. Untuk mengetahui lebih jauh dasar pemikiran tentang agama itu, ada baiknya kita melihat teori perkembangan masyarakat kaum positivisme. Menurut teori itu, perkembangan masyarakat senantiasa melalui tahap-tahap teologis, metafisik, dan positivis.

Tahap teologis merupakan tahap terpanjang dalam perkembangan peradaban manusia, ditandai dengan kepercayaan adanya kekuatan supranatural yang mengatur seluruh jagad alam. Tahap berikutnya, yaitu metafisik, merupakan masa transisi antara tahap teologi dan positivis. Tahap ini ditandai oleh kepercayaan adanya kebenaran dasar dari hukum alam yang dapat dibuktikan melalui pemikiran. Sedangkan positivis adalah tahap peradaban manusia yang lebih mendasar dari pada nilai-nilai pengkajian pada kenyataan alam (data empiris).

Dari gejala-gejala yang timbul yaitu pergeseran nilai dan norma-norma moral, sebagian dari teori itu memang ada kebenarannya. Misalnya nilai kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dibanggakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia, berganti dengan gaya hidup konsumtif dan hedonistik, mementingkan diri sendiri. Soal sex yang dahulu tabu dibicarakan, sekarang dipublikir oleh media cetak dan ditayangkan di layar bioskop dan televisi, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap moral generasi muda.

Begitupun kepercayaan terhadap agama dan pada hal yang gaib, hukum halal dan haram, dan sebagainya mengalami perubahan-perubahan, kalau tidak hilang sama sekali. Masalah sorga dan neraka yang dahulu bisa membuat orang takut, sekarang dianggap sebagai dongeng belaka.

Akan tetapi di samping perubahan-perubahan yang mencemaskan itu, beberapa tahun belakangan ini kita melihat trend meningkatnya minat dan semaraknya kehidupan beragama di mana-mana. Rumah ibadah ramai mendapat kunjungan jamaah yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Masjid dan mushalla baru berdiri di kantor-kantor pemerintah, dan perusahaan swasta. Para remaja atas kemauan sendiri mendirikan organisasi remaja masjid yang banyak menarik generasi muda mempelajari agama. Dalam media massa setiap hari kita temukan liputan berita tentang kegiatan keagamaan, seminar-seminar dan berbagai isu mengenai agama.

Dalam buku "Megatrend 2000", yang ditulis oleh dua orang futurology, John Naosbitt dan Patricia Aburdene, dikemukakan terjadinya *Religious of the Third Millenium* (Kebangkitan Agama pada Millenium Ketiga), sebagai salah satu dari 10 trend dunia pada tahun 2000 yang akan datang. "*Religious believe is intensifying world wide under some gravitational pull from the year 2000 the Millenium*" (Keyakinan agama menghebat di seluruh dunia di bawah daya tarik bumi tahun 2000 Millenium). Semua agama di dunia, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Yahudi, Shinto, Mormon, Islam, saat ini mengalami kebangkitan. Tak ketinggalan di negara-negara Eropa Timur. Sovyet dan Cina dikuasai oleh kaum Komunis. Dapat ditambahkan "Revival Islam" saat ini melanda kota-kota besar di Eropa, dengan berdirinya masjid dan Islamic Centre di Paris, London, Roma, Breussel, dan sebagainya. Tak usah jauh-jauh, di Indonesia pun gejala itu terasa dengan semaraknya syiar agama, semakin digemarinya busana Muslimah, dan jamaah haji yang meningkat dari tahun ke tahun. Gejala-gejala ini sedikitnya membantah teori kaum positivisme di atas.

Beberapa kemungkinan factor yang menyebabkan terjadinya kebangkitan agama itu adalah:

1. Fitrah manusia sendiri yang senantiasa rindu pada Tuhan. Akibat godaan duniawi,

dan kelemahan manusia sendiri, satu saat manusia mungkin lupa pada Tuhannya, namun satu saat dia akan merasakan kejenuhan mengejar duniawi yang tak ada batasnya. Ingat sabda Tuhan:

"Wahai nafsu yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam sorga-KU"

2. Meningkatnya kesejahteraan hidup sehingga orang mampu membeayai kebutuhan untuk beribadat. Banyak di antara orang desa, karena kesulitan biaya tan bisa melaksanakan agama, tetapi ketika sudah pindah ke kota-kota besar, beroleh pekerjaan dan rezeki justru mereka tertarik kepada agama. Di samping jasmani manusia membutuhkan pula kepuasan rohani atau Agama.
3. Berkat kemampuan umat dan para pemimpin agama sendiri beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan menjawab tantangan. Hal ini yang menimbulkan gerakan-gerakan pembaruan yang membuat agama tetap eksis menghadapi perubahan.
4. Khusus di Indonesia, kesemarakkan agama ditunjang oleh program pembangunan yang bertujuan membangun manusia seutuhnya dan adanya kebebasan menjalankan agama.

Dalam kaitan pembicaraan kita saat ini, perhatian kita tertuju pada upaya umat dan pemimpin agama melakukan pembaruan dan penyesuaian terhadap perubahan keadaan, karena tanpa adanya pembaruan niscaya agama akan ditinggalkan umatnya.

Hampir dalam setiap agama, baik agama samawi, Islam, Kristen dan Yahudi, begitupun agama-agama Hindu, Budha, Shinto dan lain-lain, muncul gerakan pembaruan yang melakukan penyesuaian ataupun penafsiran ulang agamanya sesuai dengan perkembangan zaman. Di samping agama tak pernah absen menyampaikan pesan-pesan keagamaan, memecahkan berbagai persoalan umat manusia di zaman modern.

Demikianlah kita menyaksikan munculnya tokoh-tokoh pemimpin dan cendekiawan berbagai agama melalui media dan forum ilmiah, pada tingkat nasional maupun internasional, membahas berbagai masalah yang dihadapi umat manusia di zaman modern seperti masalah perdamaian, lingkungan hidup, kependudukan, penyakit Aids dan sebagainya. Pada tingkat nasional cendekiawan dan pemuka agama melibatkan diri dan memperdengarkan suaranya mengenai isu pembangunan, politik, sosial, kebudayaan dan lain-lain.

Bersamaan dengan itu, umat beragama pun tak melupakan nilai sucinya menyiarkan agama dan menambah penganut baru, yang ditujukan pada seluruh umat manusia. Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan komunikasi, penyiaran agama pada waktu ini tidak dilakukan secara tradisional dan amfiteater, tapi cara profesional, terencana, menggunakan media canggih, kerjasama internasional dan dana milyaran dolar.

Sejauh yang kita saksikan di Indonesia, penyiaran agama yang profesional itu dilakukan oleh pihak Kristen dan Katholik. Dalam masa duapuluh tahun selama pemerintahan Orde Baru, kita menyaksikan perkembangan kedua agama itu secara luar biasa dengan meningkatkan prosentase umat Kristen, dan banyaknya berdiri gereja, sekolah-sekolah sampai ke desa-desa.

Sebagaimana diketahui, daya tarik Kristen bukanlah pada ajaran dan kitab sucinya, tetapi melalui pelayanan masyarakat berupa pemberian makanan dan pakaian pada kaum dhuafa, santunan terhadap anak-anak yatim, kaum jompo, korban bencana alam dan sebagainya.

Perkembangan Kristenisasi seperti yang kita saksikan itu, sesungguhnya ditunjang oleh penguasaan informasi. Sebagai dimaklumi informasi sangat besar sekali

peranannya dalam gerakan mengubah tingkah laku manusia. Telah menjadi mitos bahwa siapa yang menguasai informasi dialah yang menguasai masa depan; *"The new source of power is not money in the hand of few, but information in the hand of many"* (sumber kekuatan baru masyarakat bukanlah uang dalam tangan segelintir orang, tetapi informasi dalam tangan banyak orang). Sejak lama pihak Kristen-Katholik unggul dalam informasi ini dengan adanya penerbitan-penerbitan besar seperti Kompas, Jakarta-jakarta, Suara Pembaruan, Intisari, majalah anak-anak Bobo, majalah remaja Hai, dan sejumlah media hiburan. Dalam beberapa tahun terakhir setelah adanya undang-undang pers baru, mereka membeli sejumlah SIUPP beberapa Koran daerah antaranya "Surya" di Jawa Timur, "Serambi Indonesia di Aceh, "Sriwijaya" di Palembang dan lain-lain.

Keunggulan media memungkinkan mereka membentuk pendapat umum dengan memberikan peluang sebesar-besarnya pada para pengarang, cendekiawan dan budayawan mereka menuangkan gagasan dan opini mengenai berbagai masalah nasional maupun internasional. Informasi memang tidak serta merta mengubah iman seseorang, namun tanpa adanya media lain sebagai bandingan, informasi besar sekali dampaknya terhadap pendapat umum dan pola pikir masyarakat, dan pada akhirnya menentukan pengambilan keputusan penguasa di suatu negara. Hingga saat ini informasi masih merupakan masalah yang belum terpecahkan oleh umat Islam. Pada skala yang lebih luas terjadi kesenjangan informasi antara negara maju (baca: Negara Barat) dengan negara berkembang, di mana sebagian besar negara Islam berada di dalamnya. Kantor-kantor berita seperti UPI, AFP, AP, REUTER dan media raksasa seperti Time, Newsweek, New York Herald, Le Figaro dan lain-lain yang menjadi sumber berita dunia, kerap kali dalam pemberitaannya tentang Islam bersikap bias, atau subjektif, hingga merusak citra Islam. Islam digambarkan sebagai fanatik, tidak toleran, biadab, haus darah dan sebagainya.

Begitupun di Indonesia, terasa adanya kesenjangan itu, di mana umat Islam yang menjadi golongan mayoritas menjadi konsumen media Kristen dan Katholik.

Menurut Almanak Media Massa di Indonesia tahun 1978, jumlah seluruh media cetak Islam di Indonesia, seperti Panji Masyarakat, Kiblat, Amanah, Pelita, Al-Muslimun, Pnggilan, Harmonis (sekarang sudah berhenti terbit), Suara Masjid, Media Dakwah dan Suara Muhammadiyah hanyalah 200.000. Mungkin pada tahun 1990 angka di atas telah berubah dengan terbitnya beberapa tabloid seperti Salman di Bandung, Mimbar Jum'at, dan terjadinya perubahan manajemen harian Pelita dan Berita Buana yang keduanya terbit di Jakarta. Namun dibanding dengan Kompas yang sirkulasinya mencapai 700.000 exemplar, media Islam masih berada di belakang.

Keterbelakangan informasi ini, bukan saja disebabkan lemahnya perekonomian dan akibat ketatnya persaingan antara sesama penerbit, juga menyangkut mental, yaitu lemahnya daya baca dan kesadaran informasi umat Islam sendiri.

Demikian sekilas peta media Islam dalam era informasi, yang sejak beberapa lama menjadi problem yang belum terpecahkan. Persoalannya kemudian, langkah-langkah apakah yang akan ditempuh Muhammadiyah melaksanakan misinya sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, di tengah masyarakat industri dan era informasi itu?

Secara sederhana dapat dikatakan upaya yang dapat dilakukan ialah mendayagunakan segala potensi dan peluang yang ada untuk dakwah, di samping memperkecil dampak negatif era informasi terhadap iman dan nilai-nilai keislaman. Untuk itu langkah-langkah yang ditempuh ialah:

1. Muhammadiyah memiliki asset yang tak ternilai harganya berupa amal usaha ribuan sekolah, puluhan perguruan tinggi, masjid, mushalla, panti asuhan, beberapa

organisasi otonom, jutaan anggota dan simpatisan, cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu, yang semuanya diperhitungkan oleh kawan dan lawan. Di samping asset berupa materi itu, tak kurang pentingnya ialah cita-cita khittah yang diemban oleh Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah berdasar Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Adanya cita-cita dan khittah yang jelas itu, niscaya memberikan motivasi para pendukungnya untuk berjuang sekuat tenaga. Yang diperlukan dalam rangka mendayagunakan potensi itu ialah peningkatan kualitas seluruh amal usaha dan jajaran Muhammadiyah. Sebagai gerakan pembaruan, Muhammadiyah memiliki ciri-ciri manusia modern seperti diuraikan pada awal makalah ini, antara lain: Berorientasi pada masa depan, terbuka menerima perubahan, memiliki etos kerja yang tinggi dan sebagainya. Ciri-ciri manusia seperti itu sesuai dengan ajaran Islam (lihat surat Al-Hasyr ayat 18 dan surat At-Taubah ayat 105).

Fakta Muhammadiyah bisa survive hingga mencapai usia 80 tahun adalah bukti benarnya langkah yang ditempuh selama ini. Berdasar itu, untuk masa yang akan datang dan seterusnya, citra Muhammadiyah sebagai gerakan Tajdid berdasar Al-Qur'an dan as-Sunnah wajib dikembangkan dan dijadikan sebagai materi dakwah.

2. Momentum kebangkitan agama dan meningkatnya minat kaum intelektual dan masyarakat kelas menengah terhadap Islam dalam beberapa tahun terakhir, memberikan kesempatan pada Muhammadiyah melakukan dakwah secara ofensif ke tengah-tengah masyarakat, di kantor-kantor pemerintah, perusahaan swasta, pabrik, kampus, dan sebagainya. Guna memenuhi hajat masyarakat terhadap agama, perlu adanya wadah atau korps Muballigh pada tingkat wilayah, di mana dapat dimusyawarahkan langkah-langkah, konsep dan materi dakwah yang terencana. Melalui wadah ini juga bisa dilakukan tukar menukar pengalaman antara para muballigh. Muballigh dalam era informasi bukan hanya sebagai guru atau juru nasehat, tapi juga sebagai *'opinion leader'* yang kaya akan informasi mengenai berbagai masalah yang aktual dalam masyarakat.
3. Tidak hanya di kalangan masyarakat kelas menengah di kota besar, rakyat di pedesaan pun memerlukan siraman rohani dan agama. Derasnya arus urbanisasi dan semakin berkurangnya ulama mengakibatkan redupnya kehidupan beragama di pedesaan. Desa juga rawan terhadap dampak gaya hidup kota yang dibawa oleh mass media berhubung adanya program Koran masuk desa, televisi masuk desa, masuknya wisatawan asing maupun wisatawan domestik, yang mengakibatkan terjadinya *"cultural shock"*. Dampak negatif dari semuanya itu ditandai dengan meningkatnya tindak kejahatan di pedesaan. Kristenisasi juga sangat intensif di daerah pedesaan, terutama yang menjadi sasarannya kaum fakir miskin, yang memerlukan sandang dan pangan. Kendati banyak kesulitan yang dihadapi, dakwah terhadap umat di pedesaan ini atau yang kita kenal dengan istilah dakwah bil hal perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Selama ini banyak orang menganggap Muhammadiyah hanya diikuti oleh orang-orang kota, sementara golongan *"tradisional"* berakar sampai ke desa-desa. Kiranya dalam beberapa waktu yang akan datang anggapan seperti itu akan berubah dengan lebih giatnya para muballigh Muhammadiyah mengarahkan dakwah ke pedesaan.
4. Mengenai keterbelakangan di bidang media massa yang menjadi masalah besar umat Islam, bagi Muhammadiyah sebenarnya bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi. Sejak puluhan tahun yang lalu sampai sekarang, meski dalam bentuk yang sederhana, Muhammadiyah tetap menerbitkan majalah sebagai media komunikasi

dan informasi. Saat ini Muhammadiyah memiliki majalah resmi Suara Muhammadiyah dan beberapa majalah yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi otonom serta beberapa majalah kampus.

Selain media resmi, sebagian besar media Islam yang terbit di Indonesia, Panji Masyarakat, Amanah, Media Dakwah dan lain-lain berasal dari kalangan yang dekat, bahkan oleh orang-orang Muhammadiyah sendiri. Hal itu sangat membantu mengembangkan ide dan aspirasi Muhammadiyah. Bukan hanya majalah Islam, media umum lain pun dapat dimanfaatkan, karena banyaknya wartawan dan penulis-penulis produktif yang berasal dari kalangan Muhammadiyah sendiri.

Untuk kepentingan pembentukan pendapat umum, pimpinan Muhammadiyah perlu menjalin kerjasama dengan semua penerbit di Indonesia dan sudah tiba waktunya membentuk biro hubungan masyarakat atau Public Relation di tingkat pusat hingga wilayah, begitu pun organisasi otonom, universitas, rumah sakit dan sebagainya.

5. Media lain yang belum tertangani secara efektif ialah seni budaya. Dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa kita membaca riwayat para wali yang menggunakan gamelan dan wayang untuk menarik orang ke dalam Islam. Begitupun di Aceh, Minangkabau, Banten dan lain-lain, seni budaya dijadikan sebagai media dakwah. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya unsur-unsur ke-Islaman pada tari, lagu, sastra, pantun dan pepatah-petitih di daerah-daerah Indonesia.

Penyebaran agama lewat seni yang dirintis oleh para wali Islam jaman dulu itu, saat ini diteruskan oleh pihak Kristen dan Katholik. Beberapa gereja di Jawa menggunakan gamelan untuk mengiringi lagu-lagu dalam kebaktian mereka, begitupun wayang yang sangat digemari oleh penduduk pulau Jawa digunakan untuk Kristenisasi. Seni adalah keindahan yang digandrungi oleh manusia; manusia tak bisa dipisahkan dari seni. Dalam rangka menarik wisatawan asing, seni tradisional itu juga dikembangkan, ekspresi pengembangan seni tradisional itu kita saksikan dengan berkembangnya nativisme, kepercayaan nenek moyang yang penuh dengan praktek syirik dan khurafat. Muhammadiyah wajib memberantas segala bentuk kemusyrikan dan khurafat itu, namun di samping itu, perlu ditempuh langkah-langkah positif mengambil peranan dalam mengembangkan seni budaya bangsa dengan memberi warna ke-Islaman atau menjadikan seni sebagai dakwah. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan dan kerjasama dengan para seniman, bagitupun dengan para pemuka adat di daerah-daerah.

Bukan saja seni tradisional, kesenian modern pun bisa dimanfaatkan sebagai media dakwah, sebagaimana dilakukan grup musik Bimbo, Pagelaran Kantata Taqwa, baru-baru ini di Jakarta dan Surabaya. Demikian beberapa langkah strategis dakwah dalam masyarakat industri dan era informasi yang selanjutnya bisa diperinci dalam Muktamar ini. Mengakhiri makalah ini, baiklah kita sadari bahwa setiap langkah dan program apa pun yang kita inginkan tidaklah akan terlaksana tanpa adanya dana. Oleh sebab itu, masalah dana ini menjadi pikiran dan tidak dapat dipisahkan oleh muktamar kita sekarang ini.

Wallahu a'lam bissawab

* * *

Lampiran 3-4:

STRATEGI DAKWAH DALAM ERA MASYARAKAT INDUSTRI DAN INFORMASI (Makalah 2)

Bismillahirrahmanirrahim

IFTITAH

Kalau orang bertanya mengapa Muhammadiyah masih tetap eksis sampai saat ini, maka salah satu jawaban yang dapat diketengahkan ialah karena Muhammadiyah tetap meletakkan **dakwah** sebagai tema sentral gerakannya. Dakwah sebagai upaya transformasi sosial dalam rangka menyongsong masyarakat utama, yang adil dan makmur di bawah pancaran *nur Ilahy*. Mungkin ada sementara fihak yang menganggap bahwa jawaban ini mengada-ada, tapi marilah kita lihat beberapa fakta. Resistensi (ketahanan) Muhammadiyah dari guncangan-guncangan sosial dan politik yang ada, baik pada masa penjajahan, masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, maupun masa Orde Baru misalnya, adalah karena Muhammadiyah tetap istiqamah sebagai gerakan dakwah. Ilustrasi yang amat nyata misalnya, dalam rangka menghadapi “*asas tunggal*”, banyak fihak meramalkan bahwa Muhammadiyah akan mengalami perpecahan dan kegiatannya akan menyusut. Namun kita ketahui bahwa ramalan tersebut sama sekali tidak terbukti, dan bahkan amal usaha Muhammadiyah dan kegiatannya makin berkembang saja.

Mempertahankan dakwah sebagai tema sentral perjuangan mempunyai dua makna, yaitu: (1) sifat **konsisten** (*istiqamah*) dan (2) sifat **plastis**. Yang dimaksud dengan sifat konsisten ialah kemampuan Muhammadiyah dalam mempertahankan identitas gerakannya sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Bahwa setiap kegiatan apa pun yang dilakukan Muhammadiyah (termasuk majelis dan ortomnya) merupakan perwujudan dakwah Islamiyah. Artinya, apa pun wujud kegiatan tersebut, di dalamnya terkandung nilai dakwah. Dengan ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa segala program dan kegiatan persyarikatan merupakan **realisasi dakwah**, sementara majelis, ortom, dan badan-badan persyarikatan adalah **pelaksana dakwah**.

Yang dimaksud dengan sifat **plastis** ialah kemampuan Muhammadiyah secara dinamis menjabarkan bentuk-bentuk atau model-model dakwah dikaitkan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang ada. Berangkat dari makna dinamis-plastis ini, pertanyaan kita adalah bagaimanakah perwujudan dakwah kita di masa mendatang?

BEBERAPA PIJAKAN DASAR DAN ASUMSI

Sebelum kita mencoba menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu merenungkan kembali keberadaan dan peran Muhammadiyah. Pengkajian akan keberadaan dan peran ini juga sekaligus dalam upaya mengembangkan program-program dakwah Muhammadiyah menghadapi era Indonesia modern, dengan berbagai macam corak permasalahan dakwah yang dihadapi. Untuk maksud tersebut, ada beberapa dasar pemikiran dan asumsi yang perlu kita renungkan lebih dulu.

Pertama, keberadaan (eksistensi) Muhammadiyah sebagai **asset umat** dan **asset nasional** telah terbukti dalam panggung sejarah perjuangan bangsa. Amal usaha Muhammadiyah dalam berbagai bidang, sewbagai perwujudan dakwah Muhammadiyah,

yang tersebar di seluruh tanah air adalah bukti lain. Namun demikian, kesyukuran kita akan prestasi tersebut tidak melalaikan kita untuk peningkatan lebih lanjut. Dari berbagai penilaian terungkap bahwa belum semua potensi yang kita miliki, baik secara individual maupun kelompok, teraktualisasikan secara penuh.

Kedua, sebagai **komponen umat**, Muhammadiyah telah menjadikan *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah* sebagai dasar keberjuangannya bagi terwujudnya masyarakat utama yang disinari oleh *nur Ilahy*. Muhammadiyah memandang Islam sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Dalam kaitan ini maka Islam memerlukan penjabaran dan operasionalisasi agar dapat berfungsi sebagai *rahmatan lil 'alamien*.

Ketiga, sebagai **komponen bangsa** Indonesia, Muhammadiyah terpanggil untuk mengambil peran aktif dalam rangka menyongsong masa depan bangsa menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur. Dengan ungkapan lain, tantangan yang dihadapi bangsa dalam mewujudkan cita-cita tersebut adalah juga merupakan tantangan bagi Muhammadiyah. Dalam kaitan ini, berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa, sebagai akibat perkembangan bangsa kita sendiri maupun akibat perkembangan dunia, perlu mendapat perhatian Muhammadiyah yang serius.

Keempat, kedua pijakan dasar dan peran Muhammadiyah di atas (butir dua dan tiga) **merupakan kesatuan yang terpadu** dalam wawasan **bidimensional**, yaitu "keislaman dan keindonesiaan". Keterpaduan wawasan ini yang perlu penjabaran lebih lanjut, baik pada tingkat persepsional maupun kebijakan dakwah yang dilakukan.

Kelima, tantangan yang secara nyata dihadapi oleh Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah yang mengemban peran ganda tersebut, dengan demikian meliputi aspek-aspek:

- a. perkembangan **global** dalam bidang-bidang budaya, sosial, politik, ekonomi, Iptek, dan tata-nilai yang secara langsung harus dihadapi bangsa Indonesia dan umat Islam;
- b. permasalahan **nasional** yang dihadapi bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. permasalahan yang **khusus** dihadapi oleh umat Islam Indonesia;
- d. permasalahan **intern** yang dihadapi Muhammadiyah sebagai organisasi atau sarana bagi pemenuhan peran-peran di atas.

Keenam, melihat peran dan tantangan di atas, maka diperlukan upaya **pengembangan gerak** Muhammadiyah dalam rangka **pemantapan dan aktualisasi** peran yang ada. Upaya tersebut makin dirasakan ke-*shahih*-annya (validitasnya) apabila kita tengok kondisi internal organisatorik, yang menurut sebagian penilaian mengalami "**keteringgalan budaya**" (*cultural lag*). Dengan ungkapan lain Muhammadiyah mengalami "kelambanan" disbanding peran dan permasalahan yang harus dihadapi.

Atas dasar keenam butir pemikiran dan asumsi di atas, maka kita makin menyadari bahwa Muktamar Muhammadiyah ke-42 ini memang merupakan **wahana yang tepat untuk melakukan upaya-upaya pembenahan** di atas. Pembenahan yang cukup "serius" perlu dilakukan, apabila kita menghendaki eksistensi Muhammadiyah tetap "berjaya" di masa depan, yaitu dengan sifat *istiqamah* dan plastis di atas. Bahkan menurut hemat penulis, momentum muktamar ini cukup *critical*, dalam arti bahwa kegagalan kita memanfaatkan momentum tersebut dalam melakukan upaya-upaya pembenahan akan membawa konsekuensi yang cukup fatal bagi sejarah perkembangan persyarikatan.

GAMBARAN MASYARAKAT INDONESIA MENDATANG (Potret Permasalahan Dakwah)

Kalau kita mencoba melakukan “pemotretan” masyarakat Indonesia di masa mendatang, di mana kiprah dakwah Muhammadiyah dilakukan, kita dapat menggunakan berbagai sudut pandang. Kita dapat membayangkan suatu masyarakat yang telah memasuki Era Tinggal Landas, dengan berbagai ciri sebagaimana selama ini sudah sering dikemukakan. Kita juga dapat menyebutkan suatu masyarakat Indonesia mendatang juga berarti masyarakat Indonesia Abad ke-21 yang ramalannya sudah sering dikemukakan para pakar. Penulis tidak akan mengupas gambaran masyarakat Indonesia mendatang tersebut secara rinci, namun dengan melihat beberapa kecenderungan yang secara langsung perlu dipertimbangkan oleh Muhammadiyah dalam rangka menggelarkan dakwahnya.

Ada tiga kecenderungan utama yang akan mulai terjadi dalam masyarakat Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kegiatan dakwah islamiyah. Ketiga kecenderungan yang dimaksud ialah: (1) loncatan **perkembangan ilmu pengetahuan teknologi**, (2) proses **ledakan informasi**, dan (3) proses **globalisasi** di berbagai aspek kehidupan. Ketiga hal tersebut saling kait-mengait dan akan memberi perubahan “wajah” masyarakat Indonesia yang amat berbeda dengan keadaan sekarang. Perubahan tersebut, oleh sebagian pakar, bahkan dilukiskan sebagai perubahan yang amat drastic, suatu proses diskontinyu dari tata masyarakat yang sekarang. Perubahan yang demikian dengan sendirinya akan melahirkan berbagai persoalan yang kita hadapi, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat Islam.

Tulisan ini hanya akan mengupas kecenderungan perubahan masyarakat secara ad-hock, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang harus dihadapi oleh Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Ketiga kecenderungan di atas akan “mengubah” wajah masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam, menjadi masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

Pertama, teknologi kehidupan. Masyarakat teknologis adalah masyarakat yang semua urusan dan kegiatannya harus dikerjakan menurut tekniknya masing-masing yang cenderung sudah baku (*standardized*). Pola kehidupan yang teknologis membawa konsekuensi nilai, yaitu makin dominannya pertimbangan **efisiensi, produktivitas (fisik)**, dan yang sejenis, yang umumnya menggambarkan suatu ciri-ciri materialistik. Pertanyaan yang timbul ialah, dalam masyarakat teknologi, di manakah sesungguhnya telak agama? Bagaimana kita mendudukkan sistem kehidupan religius dalam konteks masyarakat teknologis? Interpretasi nilai agama yang bagaimana yang dapat kita tawarkan pada masyarakat teknologis tersebut? Inilah pertanyaan-pertanyaan “pekerjaan rumah” bagi umat Islam, yang selama ini belum secara serius dikerjakan.

Kedua, kecenderungan perilaku masyarakat yang makin “fungsional”. Yang dimaksud masyarakat fungsional ialah masyarakat yang masing-masing warganya sekedar menjalankan fungsinya dalam semua aspek kehidupan. Hubungan sosial hanya terjadi karena adanya kegunaan atau fungsi tersebut, artinya hubungan antar manusia lebih diwarnai oleh motif-motif kepentingan (fungsional) yang biasanya berkonotasi **fisik-material**. Dalam masyarakat yang demikian, nilai-nilai agama kurang mendapat “pasaran” karena dianggap tidak fungsional. Persoalan langsung bagi kita ialah bagaimana kita dapat menjabarkan Islam dan kemudian menawarkan ke tengah masyarakat sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu “fungsional”, yang dibutuhkan.

Ketiga, masyarakat padat informasi. Dengan makin berkembangnya teknologi

informasi, maka masuknya masyarakat Indonesia dalam era informasi merupakan hal yang tak terelakkan. Ada beberapa hal, berkenaan dengan masyarakat informasi ini, yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dakwah islamiyah. *Pertama*, makin sentralnya kedudukan “komoditas” atau “modal” ekonomi, politik, maupun sosial. Mereka yang menguasai informasi berarti kelompok yang “menguasai” kehidupan. Hal yang demikian juga menyangkut bidang dakwah. Konsekuensi yang perlu kita pikirkan ialah makin pentingnya kedudukan “dialog informasi” sebagai salah satu bentuk dakwah persyarikatan. *Kedua*, masuknya Indonesia dalam era informasi berarti makin mudahnya berbagai tata-nilai dan budaya asing memasuki masyarakat kita. Kecenderungan yang ada ialah makin berkembangnya tata-nilai materialistic, hedonistik, rasionalistik, sekularistik, dan sebagainya, yang pada hakekatnya merupakan permasalahan dakwah yang harus dihadapi.

Keempat, kehidupan yang makin **sistemik** dan **terbuka**. Salah satu ciri masyarakat moderen ialah masyarakat yang sepenuhnya berjalan dan diatur oleh sistem. Dinamika kehidupan sosial kita diatur oleh sistem, bukan diatur oleh orang. Selanjutnya, sistem yang mengatur tersebut, tidak hanya bersifat lokal, nasional, atau regional, akan tetapi juga bersifat global. Dalam masyarakat yang demikian, maka masyarakat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang “terbuka” terhadap pengaruh luar dari mana pun. Di masa mendatang berbagai kekuatan asing (baik kekuatan sosial, politik, ekonomi, teknologi, maupun budaya) akan makin ikut menentukan bagaimana dinamika masyarakat kita berlangsung.

Kelima, **individualisasi kehidupan beragama**. Dalam konsep modernisasi tersebut memang agama tidak lagi menduduki peran yang layak, atau bahkan tersisih. Kalaupun agama dilakukan, semata-mata masalah individu belaka. Agama tidak lagi dipandang sebagai pedoman yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat. Pada peringkat individu pun, agama dipandang hanya menyangkut masalah ruhaniah (*transsidental*) saja, sedang terhadap kehidupan sehari-hari agama tidak mempunyai kompetensi untuk mengatur.

Pertanyaan yang timbul ialah, model dakwah seperti apa yang tepat untuk masyarakat Indonesia yang makin moderen dengan berbagai cirinya tersebut?

TIGA KEBIJAKAN UTAMA

Dari gambaran tentang masyarakat Indonesia mendatang di atas, maka dapat diajukan tiga kebijakan (strategi) utama Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Disebut strategi utama karena tulisan ini hanya menyodorkan secara garis besar langkah-langkah kebijakan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, sementara rangkaian langkah secara lebih rinci dapat dikembangkan lebih lanjut pasca muktamar nanti. Tiga kebijakan yang dimaksud meliputi: (1) kebijakan yang diperuntukkan bagi semua fungsionaris persyarikatan (unsure pimpinan persyarikatan / majelis/ ortom/ amal usaha, muballigh), (2) kebijakan yang diperuntukkan bagi warga persyarikatan pada umumnya, dan (3) kebijakan khusus yang berkaitan dengan pengembangan model dakwah yang dapat mengantisipasi problematika masyarakat di atas. Kebijakan pertama lebih menyentuh aspek wawasan (**Pengembangan wawasan**), kebijakan kedua menyentuh aspek kesadaran (**Pengembangan kesadaran**), dan yang ketiga berupa **Pengembangan Model Dakwah**.

Pengembangan Wawasan

Perlunya pengembangan wawasan di kalangan fungsionaris (pimpinan dan muballigh) Persyarikatan dapat difahami mengingat beberapa hal. *Pertama*, wawasan amat menentukan arah dan jiwa gerakan persyarikatan, baik pada tingkat individu maupun secara kolektif. *Kedua*, sering dilontarkan sinyalemen bahwa berbagai penyebab kelambanan dan “persoalan” yang dihadapi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah akhir-akhir ini mempunyai latar belakang penyebab pada wawasan fungsionaris yang kurang “pas”.

Berkaitan dengan kebijakan dakwah di atas, pada hemat penulis ada empat aspek pengembangan wawasan yang perlu dikaji, yaitu wawasan tentang: **(1) agama (Islam), (2) keilmuan, (3) gerak perjuangan, (4) organisasi, dan (5) informasi.**

Pengembangan wawasan agama (Islam). Dari dasar pemikiran kedua di atas diketahui bahwa dalam rangka merealisasikan pandangan bahwa Islam satu-satunya jalan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia, diperlukan penjabaran secara operasional makna Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamien*. Sejarah telah menunjukkan bahwa keberadaan Muhammadiyah di tengah-tengah kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh seberapa jauh Muhammadiyah mampu menjabarkan *rahmatan lil ‘alamien* tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan ungkapan lain, mempedomani Islam berarti juga menjadikan Islam sebagai “metode” dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.

Makna tajdid yang dilakukan Muhammadiyah, sebagaimana juga dirumuskan oleh Muktamar Tarjih 1989, tidak sekedar menyangkut masalah pemurnian (purifikasi) tetapi juga masalah penerjemahan Islam dalam kehidupan nyata. Hal yang terakhir ini menyangkut persoalan bagaimana **mengaktualisasikan (validasi)** Islam sebagai “metode” (*way of life*). Dalam aktualisasi ini dengan sendirinya perlu dilakukan pemahaman Islam yang terkait dengan realitas kehidupan manusia dengan cara melakukan **penyegaran kembali** pemahaman beberapa pengertian pokok tentang Islam dan tentang kehidupan menurut pandangan Islam, suatu redefinisi (reformulasi). Di samping itu, penjabaran juga perlu dilakukan agar Islam sebagai “metode” kehidupan dapat **operasional** (kontekstual). Dengan ungkapan lain, maka Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* akan mencoba melakukan tiga hal, yaitu: **(1) permurnian (purifikasi), (2) reformulasi, (3) operasionalisasi.**

Dari ketiga hal ini, Muhammadiyah (dengan Majelis Tarjihnya) telah melakukan dua hal yang pertama, namun kurang menjamah hal yang ketiga. Di samping itu, upaya reformulasi yang dilakukan juga baru terbatas masalah-masalah agama dalam makna sempit. Masalah-masalah *ad-dun-ya* (seperti masalah: sosial, ekonomi, politik, budaya, dan Iptek, dsb), yang secara riil amat menentukan perilaku kehidupan manusia, kurang tersentuh oleh *tajdid* Muhammadiyah. Sebagai pedoman dan “metode” kehidupan, Islam mestinya mencakup semua aspek kehidupan manusia. Dengan demikian upaya reformulasi Islam juga meliputi segala aspek kehidupan.

Dari uraian di atas, ada dua hal yang perlu diperhatikan Muhammadiyah dalam rangka pengembangan wawasan agama. *Pertama*, perlunya melengkapi tajdid dengan perumusan operasional Islam sebagai “metode kehidupan”. *Kedua*, “meluaskan” kawasan *tajdid* pada semua aspek kehidupan bermasyarakat.

Pengembangan wawasan keilmuan. Pengembangan wawasan keilmuan yang dimaksud dapat didekati dengan mengkaji dua pertanyaan, yaitu: *(1) bagaimana konsep dan pandangan Muhammadiyah (Islam) tentang ilmu dan teknologi?, dan (2) Bagaimana*

Muhammadiyah “mendudukan” ilmu dan teknologi dalam setting gerak keberjuangannya?

Pengkajian akan dua hal tersebut perlu dilakukan mengingat beberapa kenyataan. *Pertama*, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh **penguasaan** bangsa tersebut akan **ilmu pengetahuan dan teknologi**. Penguasaan Iptek akan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap corak dan perilaku masyarakat. *Kedua*, cirri masyarakat maju, termasuk masyarakat Indonesia di masa yang akan datang, akan diwarnai oleh sifat **saintifik** dan **ketergantungan pada teknologi**. Eksistensi suatu kelompok sosial pada masyarakat yang demikian akan ditentukan oleh seberapa jauh **kepedulian** dan **penyerapan Iptek** dalam langkah gerak kelompok tersebut. *Ketiga*, masih adanya kecenderungan pemahaman **dikotomik** dan **distortif** di kalangan umat (termasuk warga persyarikatan) tentang ilmu dan agama. Di sisi lain, angka statistik menunjukkan bahwa prosentase umat Islam yang terdidik jauh ketinggalan dari umat yang lain (misal angka relatif sarjana muslim hanya 1,8 permil dibanding umat nasrani yang 17 – 25 permil). Keempat, Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan sudah sedemikian luas, yang tidak lain merupakan **potensi** bagi **sosialisasi wawasan keilmuan** yang proporsional di atas.

Penulis tidak berpretensi untuk menjawab dua pertanyaan di atas. Namun masalah pengembangan wawasan keilmuan ini perlu dikaji secara mendalam, mengingat empat alasan yang dikemukakan di atas. (Beberapa pandangan awal pernah penulis lontarkan pada *forum Muktamar Tarjih di Malang tahun 1989* dan juga dalam buku “*Islam dan Dakwah: Pergumulan antara Nilai dan Realitas*”).

Pengembangan wawasan gerak perjuangan. Sebagaimana dikemukakan pada dasar pemikiran keempat di atas, kiprah perjuangan Muhammadiyah berdimensi **ganda**, yaitu dimensi agama (keislaman) dan dimensi nasional (keindonesiaan). Secara terpilah, Muhammadiyah juga telah melakukan, baik pada dimensi agama maupun dimensi nasional. Hal yang masih perlu diupayakan ialah pemahaman tentang **keterpaduan** dua dimensi tersebut. Sebagai ilustrasi misalnya, kita masih kurang mengembangkan *issue-isue* yang bersifat **nasional** tapi sekaligus juga **umatik**.

Rumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah sebenarnya telah merumuskan kedua dimensi gerak tersebut. Namun demikian elaborasi lebih lanjut perlu dilakukan. Dalam rumusan MKCH tersebut dimensi keindonesiaan, yang tertuang dalam butir kelima, terkesan masih kurang rinci dan tidak terpadu dengan empat butir terdahulu.

Apabila pengembangan wawasan gerak yang bersifat bidimensi tersebut telah terlaksana, maka penjabarannya perlu direfleksikan pada Khittah Perjuangan Muhammadiyah, baik yang bersifat ke dalam, umatik, maupun nasional.

Pengembangan wawasan yang menyangkut gerak perjuangan yang lain ialah dalam penjabaran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Walaupun upaya penyegaran wawasan dakwah sudah dilakukan sejak awal periode (1985), yang berupa pengembangan program Majelis Tabligh khususnya, serta telah ditetapkannya (strategi) dakwah Muhammadiyah (Tanwir 1987), namun upaya pengembangan wawasan dakwah ini belum sepenuhnya merata ke seluruh fungsionaris dakwah Muhammadiyah. Dari informasi yang terpantau di daerah-daerah serta forum Tanwir 1990, diketahui bahwa sosialisasi wawasan dakwah sebagaimana dirumuskan dalam Strategi Dakwah Muhammadiyah belum selancar yang diharapkan, terutama pada Ortom.

Pengembangan wawasan organisasi. Sebagaimana disebutkan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, Muhammadiyah sebagai organisasi adalah **alat perjuangan**. Pemahaman

organisasi sebagai “alat” untuk mencapai tujuan menyadarkan kita bahwa organisasi harus bersifat **dinamis**, dalam arti *subject to change* sesuai dengan kebutuhan gerak perjuangan yang ada. Dengan kata lain, perlu adanya upaya **sadar** secara **berkesinambungan** untuk melakukan *updating* organisasi sebagai perlengkapan perjuangan.

Inti utama pengembangan organisasi ialah bagaimana para pimpinan mampu memahami berbagai kedudukan dan peran Muhammadiyah sebagaimana dikemukakan pada bagian Dasar Pijakan dan Asumsi di atas. Dengan pemahaman tersebut, maka gerak organisasi sebagai alat perjuangan akan dapat mengantisipasi persoalan dan sekaligus mengemban peran yang dimiliki. Sebagai ilustrasi misalnya, bagaimana mengembangkan organisasi yang mampu menopang peran Muhammadiyah sebagai **komponen umat** dan sekaligus sebagai **komponen bangsa** secara terpadu, merupakan hal yang tidak mudah tetapi juga amat menentukan eksistensi Muhammadiyah di masa mendatang. Penjabaran peran ganda tersebut dalam mengantisipasi empat tingkatan permasalahan seperti dikemukakan di atas perlu mendapatkan perhatian lebih serius lagi di masa mendatang.

Di samping itu, berkaitan dengan wawasan berorganisasi kadang-kadang terlihat juga kecenderungan pandangan berorganisasi dengan **orientasi fiksatif ke belakang** (*backward*). Kebanggaan akan keberhasilan Muhammadiyah (dan para Pimpinannya) di masa lalu menjadikan kita kurang **berorientasi ke depan**, sehingga meniadakan inovasi untuk pengembangan organisasi. Wawasan masa lalu bukan hanya dianggap sebagai pelajaran sejarah, melainkan sebagai “model idealita” yang terlepas dengan kontekstualitas tuntutan gerak perjuangan dan tantangan yang dihadapi Muhammadiyah masa kini dan masa yang akan datang.

Dengan uraian tersebut, pengembangan wawasan berorganisasi mengandung dua pengertian. *Pertama*, adalah upaya **proporsionalisasi** pandangan, dan *kedua* adalah upaya **validasi** dan **updating** organisasi sesuai dengan tuntutan peran dan tantangan yang dihadapi Muhammadiyah.

Pengembangan wawasan informasi. Dengan masuknya Indonesia dalam era informasi maka adanya kesadaran dan wawasan tentang informasi di kalangan fungsionaris persyarikatan menjadi sesuatu yang tak terelakkan (*conditio sine quanon*). Sebagaimana dikemukakan di depan salah satu esensi masuknya Indonesia dalam era informasi menjadikan informasi sebagai asset atau modal berbagai aspek kehidupan. Bagi Muhammadiyah, dengan demikian, informasi merupakan “asset perjuangan”. Penguasaan dan kemampuan mengolah informasi dari para pimpinan dan muballigh Muhammadiyah akan amat menentukan keberhasilan Muhammadiyah dalam menggelarkan dakwah dalam masyarakat. Menjadikan informasi sebagai asset perjuangan bukan hanya berarti keseriusan Muhammadiyah dalam mengelola lembaga-lembaga penerbitannya, atau memperbanyak jumlah terbitan maupun oplagnya saja. Informasi akan menjadi asset perjuangan Muhammadiyah, terutama kalau pimpinan dan muballighnya mampu **mengolah** informasi dan ‘**menjual**’ kepada masyarakat (dalam membantu opini masyarakat, *public opinion*) dan pemerintah. Dengan demikian, informasi diolah sebagai “pesan-pesan dakwah”, baik dalam pengertian khusus maupun pengertian umum.

Pengembangan Kesadaran

Ada dua hal yang perlu dikembangkan di kalangan warga Muhammadiyah berkaitan dengan pengembangan kebijakan dakwah. *Pertama*, ialah menumbuhkan lagi kesadaran bahwa **tiap warga persyarikatan pada hakekatnya ialah da’i** atau muballigh

yang bertanggungjawab terhadap masa depan Islam di Indonesia. Bagi tiap muslim, berdakwah – menurut kemampuan dan bidang masing-masing – adalah *fardhu 'ain* hukumnya. Untuk ini memang perlu adanya kesadaran wawasan dakwah sebagaimana dikemukakan di atas. Dakwah bukan sekedar berarti tabligh dalam makna sempit, melainkan seluas aspek kehidupan manusia sendiri. Dakwah juga dapat berupa karya-karya nyata “penterjemahan” nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan “menjual” kepada masyarakat dalam berbagai bentuk dialog dakwah (informasi, nilai, gagasan, amal, spiritual dsb.)

Kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya informasi, atau dengan ungkapan yang lebih *trendi*, “**gerakan sadar informasi**”. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, di masa depan informasi merupakan “komoditas” kehidupan utama, yang amat menentukan keberhasilan melakukan kompetisi kehidupan, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Di sisi lain, dalam masyarakat yang “sadar informasi”, secara tidak langsung akan meningkat pula tingkat kecerdasannya, karena media informasi apa pun dapat berfungsi sebagai forum pendidikan informal. Sejalan dengan upaya pengembangan masyarakat sadar informasi ini, perlu pula dikembangkan langkah yang kongkrit dalam rangka menghadapi “banjir informasi”, termasuk di dalamnya berbagai tata-nilai yang dapat menjauhkan masyarakat dari kehidupan beragama sebagaimana dikemukakan di atas.

“Dakwah Fungsional”: Alternatif Model Dakwah

Uraian tentang perkiraan “wajah” masyarakat Indonesia mendatang di atas menyadarkan kita bahwa kita perlu melakukan **perenungan kembali** mengenai model dakwah yang selama ini kita lakukan. Kalau salah satu esensi dakwah Muhammadiyah ialah pengembangan masyarakat utama yang bersendikan Islam, ternyata dalam masyarakat Indonesia moderen tidak sedikit **tata-nilai** yang jauh atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Di samping persoalan tata-nilai, pada masyarakat yang makin maju tersebut juga dijumpai persoalan yang menyangkut berbagai tata-kehidupan, baik di bidang social, ekonomi, politik, dan sebagainya. Berbagai persoalan yang menyangkut tata-nilai dan tata-kehidupan tersebut tidak lain merupakan **permasalahan dakwah**.

Kalau kita mencoba membayangkan potret masyarakat Indonesia mendatang yang merupakan lahan dakwah Muhammadiyah, dikaitkan dengan berbagai model kegiatan dakwah yang dilakukan, maka akan terasa bahwa selama ini dakwah kita memang terlalu condong pada penekanan masalah nilai atau hubungan makna. Kecondongan yang demikian menyebabkan pesan-pesan dakwah kita cenderung diwarnai oleh pendekatan yang normatif. Kita melupakan, atau setidaknya tidak memperhatikan, pendekatan fungsional.

Yang dimaksud pendekatan fungsional ialah bagaimana memfungsikan dakwah sebagai suatu “pendorong” perkembangan masyarakat. Dengan ungkapan lain, bagaimana menjadikan dakwah sebagai “variabel perkembangan” masyarakat, dan da’i sebagai agen perubahan masyarakat. Dakwah bukan dilakukan dalam suatu “kevakuman”, melainkan dalam *setting* masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Oleh karenanya, agar dapat berfungsi, dakwah harus bersifat integratif, artinya kegiatan dakwah harus “menyatu” dengan kegiatan masyarakat. Menyatu di sini bukan berarti larut, tetapi kegiatan dakwah perlu:

- (1) dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang aktual;
- (2) didasarkan (mengantisipasi) pada persoalan yang secara riil sedang dirasakan masyarakat.

Dengan ungkapan lain, sifat integrative dakwah mengharuskan dakwah “dari dalam” masyarakat dan bukan yang berada “di luar” masyarakat. Ungkapan ini, di samping membawa konsekuensi pada sifat kegiatan dakwah, juga pada subjek dakwah (da`i) yang juga harus bersifat integratif. Yang dimaksud ialah, dalam melakukan tugasnya, pada da`i jangan mengidentifikasi diri sebagai “manusia super” yang datang dari “luar” melainkan ia adalah bagian dari masyarakat juga, namun yang sadar akan fungsinya (sebagai da`i), yaitu berinteraksi dengan sesamanya.

Sifat integratif dakwah hanya dapat terlaksana dengan baik apabila, pesan dakwah dapat mengantisipasi problem dan *needs actual* masyarakat. Dengan demikian dakwah menjadi nyata dan “dibutuhkan” oleh masyarakat, dan inilah yang dimaksud dengan “dakwah yang fungsional”. Dakwah fungsional ialah dakwah yang secara nyata menjawab “kepentingan” riil masyarakat (umat dakwah).

Pendekatan dakwah secara fungsional berarti melakukan penyadaran dan pembuktian pada umat bahwa Islam adalah ajaran yang fungsional (berguna, valid) dalam masyarakat. Untuk ini, maka penjabaran dimensi kerahmatan dakwah merupakan jawaban yang tepat. Dalam dimensi kerahmatannya, dakwah bertugas membuktikan validitas Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin* dengan cara mengembangkan nilai-nilai normatif Islam dalam konsep-konsep yang operasional, yang fungsional dalam kehidupan masyarakat.

Allahu a’lam bish-shawab.